

**Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
(PNPM MP)**

(Studi pada Desa Bendungan kec. Gondang kab. Tulungagung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas
Brawijaya**

**SIAGA BASU MURBENG
NIM. 0610313163**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
MALANG
2012**

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 13 November 2012

Jam : 11

Skripsi atas nama : Siaga Basu Murbeng

Judul : Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) (Studi pada Desa Bendungan kec Gondang kab. Tulungagung)

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

Dr. M. Saleh Soeaidy, MA.

Drs. Riyanto, M.Hum.

Nip : 19540212 198103 1 006

Nip : 19600430 198601 1 006

Anggota

Anggota

Dr. Imam Hardianto, M.AP

Dr. Hermawan, S.IP, M.Si

Nip : 19460619 197412 2 001

Nip : 19720405 200312 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apa bila dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU No. 20 Thn 2003, pasal 25 ayat pasal 70).

Malang, 15 September 2012

TTD



Nama : Siaga Basu Murbeng
NIM : 0610313163

MOTTO

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua

(Aristoteles)

*Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah
dilaksanakan / diperbuatnya.*

(Ali Bin Abi Thalib)

*Kebajikan tidak bernilai selama diucapkan akan tetapi bernilai
sesudah dikerjakan.*

RINGKASAN

Siaga Basu Murbeng, 2012. **Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP)**. Skripsi Jurusan Administrasi Publik, Konsentrasi Administrasi pembangunan (Studi pada Desa Bendungan kec. Gondang kab. Tulungagung. Pembimbing (1) Dr. M. Saleh Soeaidy .MA (2) Drs. Riyanto. M.Hum. ± 181 hal.

Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah mengakomodir pembangunan desa dalam program kerjanya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang “Pelaksanaan PNPM MP” dengan permasalahan Bagaimana pelaksanaan (PNPM MP) dalam upaya memberdayakan masyarakat dan Apa sajakah yang menjadi Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan PNPM MP di desa Bendungan kecamatan Gondang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif; sumber data yaitu data primer dan sekunder; teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi; instrument yang digunakan yaitu wawancara, catatan lapangan, peneliti sendiri; metode analisa dan interpretasi data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan PNPM MP Didesa Bendungan Kecamatan Gondang. secara sistematis dibagi kedalam beberapa tahap diantaranya tahap Perencanaan terbagi menjadi proses Sosialisasi, Penggalan gagasan, Musyawarah perencanaan, Verifikasi usulan, Musyawarah Antar Desa prioritas usulan, Musyawarah desa Informasi Hasil Musyawarah Antar Desa, kemudian Tahap Pelaksanaan terdiri dari Alur Pencairan Dana PNPM Mandiri Perdesaan, Pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan, Pengadaan Tenaga Kerja, Pengadaan Bahan dan Alat, Rapat Evaluasi TPK dan kemudian yang terakhir ialah Tahap/proses pelestarian. Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan diantaranya Hambatan pada pemahaman terhadap PNPM MP dan kualitas pengelola, Hambatan pada komunikasi organisasi pelaksana, Waktu pengerjaan yang dibatasi untuk setiap kegiatan

Dari hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan bahwa Desa Bendungan dalam Pelaksanaan PNPM MP terhitung cukup baik. Hal ini dapat dilihat dimana desa Bendungan telah melaksanakan proses pelaksanaan PNPM–MP sesuai dengan langkah-langkah dan metode pemberdayaan dalam buku pedoman umum PNPM yaitu tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap atau proses pelestarian. Namun dalam proses pelaksanaan PNPM MP di Desa Bendungan sangat dipengaruhi beberapa hambatan, diantaranya, Hambatan pada pemahaman terhadap hambatan pada komunikasi organisasi pelaksana, PNPM MP dan kualitas pengelola, Waktu pengerjaan yang dibatasi untuk setiap kegiatan serta adanya sebagian warga yang tidak ikut berpartisipasi dalam program PNPM MP dan yang terakhir ialah Terlambatnya pasokan bahan baku bangunan

SUMMARY

Siaga Basu Murbeng, 2012. **The Implementation of Rural Community Empowerment National Program (PNPM MP)**. Thesis. Public Administration Department, Concentration of Development Administration (A Study at Bendungan Village, Gondang Subdistrict, Tulungagung District). Promotors: (1) Dr. M. Saleh Soeaidy, MA, (2) Drs. Riyanto, M.Hum. ± 181 pages.

Rural development plays important role because its synergy is inseparable from the local and national developments. Many development programs have been planned by the government for the rural. Almost all offices in the local government accommodate rural development into the work program. Therefore, the objective of the research is to discuss “The Implementation of PNPM MP”. Problem of research is how the implementation of PNPM MP in empowering the community is and what barriers are constraining the implementation of PNPM MP at Bendungan Village, Gondang Subdistrict.

The type of research is descriptive with qualitative approach. Data sources are primary and secondary data. Data collection techniques are observation, interview and documentation. Research instruments involve interview, field observation and the author. The method of data analysis and interpretation includes data collection, data reduction, data presentation and conclusion remark.

Result of research indicates that the implementation of PNPM MP at Bendungan Village, Gondang Subdistrict, is systematically divided into some stages. First is planning stage including socialization, idea exploration, planning assembly, idea verification, inter-village assembly, idea prioritization, village assembly, and information about the result of village assembly. Second is implementation stage involving fund delivery path for PNPM Mandiri Perdesaan, the management of fund, the supply of workforce, the supply of material and equipment, and evaluation assembly of TPK. Final stage is preservation stage. The barriers are lack of understanding of PNPM MP and the quality of management, less communication with the implementing organization, and limited time for accomplishing the activity.

Based on result of data analysis, it is concluded that Bendungan Village is relatively good for the implementation of PNPM MP. Bendungan Village has implemented PNPM MP based on the steps and empowerment method in the general guide of PNPM. This guide explains about planning, implementation and preservation stages. However, some barriers impede the implementation of PNPM MP at Bendungan Village such as lack of understanding of PNPM MP and the quality of management, less communication with the implementing organization, and limited time for accomplishing the activity. Other less prominent barriers are less participation of citizen in the PNPM MP program and the overdue of the supply of construction material.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) (Studi pada Desa Bendungan Kec. Gondang Kab. Tulungagung).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof.Dr.Sumartono,MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr.M.R.Khairul Muluk,S.Sos.,M.Si selaku Ketua jurusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Dr. M. Saleh Soeaidy, MA atas bimbingan, saran dan masukan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Riyanto, M.Hum atas kesabaran dan bimbingan secara terus menerus selama penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen FIA, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sebagai bekal untuk terjun dilingkungan masyarakat pada masa yang akan datang.
6. Bapak Siswoyo selaku Kepala Desa Bendungan yang telah memberikan informasi sehingga penulis dapat melengkapi penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Bapak/Ibu Kasi dan seluruh Staf Kantor Kepala Desa Bendungan yang telah membantu memberikan informasi dan data-data untuk melengkapi penyusunan skripsi ini.

8. Ir. Fatchur Rochman selaku Fasilitator Kabupaten yang telah memberikan informasi dalam melengkapi penyusunan skripsi ini.
9. Bapak/ibu Pelaku PNPM MP yang berada di tingkat Kecamatan Maupun Desa yang memberikan informasi dalam melengkapi penyusunan skripsi ini.
10. Bapak/ibu warga Desa Bendungan yang memberikan informasi dalam melengkapi penyusunan skripsi ini.
11. Rekan-rekan angkatan 2006 yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 15 September 2012



DAFTAR ISI

HALAMAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan.....	10
Pengertian Pembangunan.....	13
1. Konsep Pembangunan.....	13
2. Strategi Pembangunan.....	17
3. Sasaran Pembangunan.....	18
B. Pembangunan Desa.....	19
1. Pengertian PembangunanDesa.....	19
2. Tujuan pembangunan desa.....	22
C. Pemberdayaan Masyarakat.....	23
1. Pengertian Pemberdayaan.....	23
2. Tingkatan Pemberdayaan masyarakat.....	33
3. Tahapan Pemberdayaan masyarakat.....	34
4. Proses Pemberdayaan.....	37

D. Program Pemberdayaan Masyarakat.....	40
1. P4K.....	40
2. Pengembangan Kawasan Terpadu.....	45
3. Inpres Desa Tertinggal.....	47
4. Program Pengembangan Kecamatan.....	51
5. P3DT.....	52
6. P2KP.....	54
E. PNPM Mandiri Perdesaan.....	57
1. PNPM mandiri Perdesaan.....	57
2. Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan.....	59
3. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan.....	60
4. Prinsip dasar PNPM Mandiri Perdesaan.....	60
5. Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan.....	62
6. Mekanisme Usulan Kegiatan.....	63
7. Swadaya Masyarakat.....	64
8. Kesetaraan dan Keadilan gender.....	65
10. Jenis kegiatan yang dilarang.....	65
11. Sanksi.....	66
12. Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Lembaga dan Pemerintahan lokal.....	67
13. Pendampingan masyarakat dan Pemerintahan lokal.....	68

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	69
B. Fokus Penelitian.....	70
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	71
D. Sumber Data.....	71
E. Instrumen Penelitian.....	72

F. Teknik Pengumpulan Data..... 72

G. Analisa Data..... 73

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data 76

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 76

a. Sejarah Berdirinya Kabupaten Tulungagung 76

b. Visi dan Misi..... 77

c. Prinsip 78

d. Kondisi Geografis 79

e. Gambaran Umum Desa Bendungan..... 82

2. Gambaran Umum Program Nasional Mandiri Perdesaan

di desa Bendungan 87

a. Sejarah singkat

PNPM MP..... 87

b. Organisasi

Pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan

desa Bendungan..... 88

c. Sekertariat

PNPM MP..... 89

d. Program-program

Pemberdayaan PNPM

Desa Bendungan..... 89

B. Penyajian data Penelitian..... 91

1. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan..... 91

a. Perencanaan..... 91

1). Sosialisai..... 91

2). Penggalian Gagasan..... 94

3). Musyawarah Perencanaan..... 95

4). Verifikasi Usulan..... 96

5). Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan..... 97

6). Musyawarah desa Informasi Hasil Musyawarah

Antar Desa..... 98

b. Tahap Implementasi 99

1). Alur Pencairan Dana PNPM MP.....	100
2). Pengadaan Tenaga Kerja.....	106
3). Pengadaan Bahan dan Alat.....	108
4). Pelaksanaan Pembangunan.....	111
5). Pelaksanaan Kegiatan SPP.....	116
6). Rapat Evaluasi TPK.....	121
c. Proses Pelestarian.....	121
2. Hambatan-hambatan yang Ada dalam Pelaksanaan PNPM MP.....	123
a. Hambatan pada pemahaman terhadap PNPM MP dan kualitas pengelola.....	123
b. Hambatan pada komunikasi organisasi pelaksana.....	125
c. Waktu pengerjaan yang dibatasi untuk setiap kegiatan..	127
d. Adanya sikap warga yang tidak berpartisipasi dalam PNPM MP di desa Bendungan.....	128
e. Terlambatnya pasokan bahan baku bangunan.....	129
f. Hambatan pada Program SPP.....	130
C. Pembahasan.....	131
1. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.....	131
2. Hambatan-hambatan Pelaksanaan PNPM MP.....	142

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	150
B. Saran.....	153

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1 daftar susunan pemerintahan desa Bendungan dan Tingkat Pendidikan.....	83
2.	Tabel 2 Daftar Usulan dari Dusun dan MDPK Bendungan.....	95
3.	Tabel 3 Daftar Usulan PNPM MP Desa Bendungan tahun 2011.....	96
4.	Tabel 4 Susunan Tim Monitoring Desa Bendungan.....	99
5.	Table 5 Pengadaan bahan rabat beton PNPM MP desa Bendungan.....	110
6.	Tabel 6. Pengadaan alat rabat beton PNPM MP desa Bendungan.....	111
7.	Tabel 7 Rancangan Anggaran Biaya khusus Swadaya.....	112
8.	Tabel 8 Rancangan Anggaran Biaya khusus Swadaya.....	113
9.	Tabel 9 Rancangan Anggaran Biaya PNPM MP desa Bendungan.....	114
10.	Tabel 10 Tim Pemelihara desa Bendungan.....	123

DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar 1 Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif..	75
2.	Gambar 2. Penyaluran Dana PNPM MP di Desa Bendungan tahun 2011.....	105



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pembangunan yang dilaksanakan memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang berhasil diwujudkan secara nyata telah menyebabkan turunnya jumlah penduduk miskin (Rusli dkk, 1995:1). Jumlah orang miskin menurun tajam dalam kurun waktu 1976-1996 dari 40,1% menjadi 11,3% dari total penduduk Indonesia. Akibat krisis multidimensi yang menerpa Indonesia, jumlah penduduk miskin periode 1996-1998 melonjak kembali dari 22,5 juta (11,3%) menjadi 49,5 juta (24,2%) (BPS, 2003:576).

Oleh sebab itu pembangunan nasional pada hendaknya diarahkan untuk membangun manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya, yang berarti menciptakan kualitas hidup manusia Indonesia agar mampu melanjutkan pembangunan guna mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut perlu diselenggarakan upaya pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu termasuk juga dalam pembangunan pedesaan.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upayanya memberdayakan dilaksanakan dengan kebijakan penataan kelembagaan pada pemerintahan desa. Dengan menjadikan pemerintah desa sebagai bagian langsung dari birokrasi negara yang melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Negara di wilayahnya. Penataan kelembagaan dimaksudkan sebagai peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dilakukan dengan pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagai wahana partisipasi dalam pembangunan, dengan dibentuknya LKMD dimaksudkan agar pelayanan pemerintah dan tugas pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa, disamping itu terdapat pula Badan Perwakilan Desa (BPD) yang bersama Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa.

Penataan kelembagaan di dalam masyarakat desa secara relatif telah mampu menciptakan wadah bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Konsep otonomi desa yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kedudukan yang kuat bagi desa

untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi riil masyarakat desa yang bersangkutan, termasuk di dalamnya dalam menentukan program-program pembangunan.

Namun terlebih dari itu semua, apapun upaya dan daya untuk memberdayakan masyarakat tersebut paradigma pembangunan secara substantif akan selalu diartikan mengandung unsur proses dan adanya suatu perubahan yang direncanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat. Karena ditujukan untuk merubah masyarakat itulah maka sewajarnya masyarakat juga turut diikutsertakan dan menjai pemilik (*owner*) kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan supaya perubahan yang hendak dituju adalah pembangunan yang diketahui dan sebenarnya yang dikehendaki oleh masyarakat (Conyers, 1991:154-155). Ada kesiapan masyarakat untuk menghadapi dan menerima perubahan itu. Untuk itu keterlibatannya harus diperluas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pemanfaatan, sehingga proses pemabangunan yang dijalankan dapat memberdayakan masyarakat, bukan memperdayakan.

Lebih lanjut bahwa pembangunan (wilayah) desa secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi social, ekonomi. Dan budaya masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat dua stakeholder yang berperan utama dan sejajar (*equal*) yaitu pemerintah dan masyarakat (Korten, 1988:378). Meskipun demikian dalam konteks yang lebih luas juga terdapat peranan "Agen eksternal" seperti LSM, konsultan, lembaga Donor, dll.

Oleh sebab itu, dilihat dari prospeknya pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Hampir seluruh instansi terutama pemerintah daerah mengakomodir pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk bermukim. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.

Meskipun demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan (centre of excellent), masih minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Semuanya itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan penduduk.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, hasil – hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Perlu kita ketahui bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya. Akan tetapi dalam kenyataannya masalah kesenjangan sosial secara mendasar belum dapat dipecahkan. Menyadari hal ini kita harus berupaya untuk mencari jalan agar kesenjangan ini dapat diperkecil tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi.

Hasil data BPS tahun 2006 menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami angka kenaikan setiap periode. Mencapai 39,05 juta jiwa (17,75 %) meningkat 3,95 juta jiwa dari angka kemiskinan pada tahun 2005 sebesar 35,1 juta jiwa. Dengan semakin meningkatnya angka kemiskinan maka permasalahan sosial lainnya sebagai dampak kemiskinan juga bertambah. Seperti, masalah lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya angka kriminalitas, berkembangnya konflik – konflik sosial antar masyarakat, dan makin rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan hidup. Disamping angka kemiskinan yang disampaikan BPS, maka dilihat dari Human Development Index (HDI) atau indeks pembangunan manusia di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan kualitas manusia negara – negara lain di dunia.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang ditempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru (UU No. 25 Tahun 2000 tentang Pro-Penas).

Permasalahan utama dalam hal kemiskinan adalah bagaimana memperkuat kemampuan masyarakat lapisan bawah yang masih dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, mereka membutuhkan pertolongan agar

lebih berdaya dalam kemandirian, keswadayaan, partisipasi dan demokratisasi, persoalan ini begitu melekat dalam kehidupan masyarakat.

Berkenaan dengan persoalan – persoalan diatas, maka upaya pemberdayaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan. Maka dari itu pemerintah mencanangkan berbagai program – program dalam upaya memberdayakan masyarakat salah satunya adalah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM – Mandiri) yang saat ini sedang gencar dilaksanakan di berbagai daerah yang dirasakan memerlukan program bantuan ini. Sasaran yang perlu di berdayakan adalah masyarakat yang strata sosialnya rendah seperti, kaum buruh, nelayan, petani, orang miskin di kota dan di desa.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) pada hakekatnya adalah gerakan nasional yang dijalankan oleh semua kalangan untuk menanggulangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui upaya – upaya pemberdayaan masyarakat dengan tujuan peningkatan kualitas hidup, kemandirian kesejahteraan ditingkat masyarakat.

Didalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPPENAS) Tahun 2000 – 2004 dan Program Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dinyatakan bahwa,

“ tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan lembaga dan organisasi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat, peningkatan keswadayaan masyarakat luas guna membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial dan politik.”

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MP) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang di gunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.

PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998. PNPM Mandiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di kota Palu, Sulawesi Tengah. Program pemberdayaan ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan terbesar ditanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat atau

kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana bantuan langsung untuk masyarakat (BLM).

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri diperluas dengan melibatkan program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai departemen/sector dan pemerintah daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga diprioritaskan pada desa–desa tertinggal untuk dapat menjangkau masyarakat–masyarakat yang benar–benar mengalami kesulitan.

Strategi yang dilakukan adalah dengan pengintegrasikan berbagai program pemberdayaan masyarakat dalam kerangka kebijakan PNPM Mandiri, cakupan pembangunan diharapkan dapat diperluas hingga ke daerah terpencil dan terisolir. Efektifitas dan efisiensi dari kegiatan yang selama ini berduplikasi antar proyek diharapkan juga dapat terwujud. Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan cita – cita Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban umum. Dengan tujuan masyarakat yang adil dan makmur, keterlibatan pemerintah yang memahami dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Adapun kegiatan PNPM Mandiri perdesaan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan, hal penting yang dilakukan orientasi ataupun pengenalan kondisi yang ada di desa dan kecamatan. Sehingga kemudian pemerintah menyadari akan pentingnya pengembangan kegiatan PNPM Mandiri yang dianggap sebagai salah satu mengurangi beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Dengan adanya PNPM Mandiri Perdesaan dan tidak luputnya peran camat sebagai pemimpin di kecamatan untuk membina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada desa – desa di wilayah kecamatannya.

Selain itu camat juga bertugas untuk membuat surat penetapan camat (SPC) tentang usulan – usulan kegiatan yang telah disepakati musyawarah antar desa untuk didanai melalui PNPM Mandiri. Kebijakan pembangunan yang merupakan pembangunan yang berwawasan kemasyarakatan melalui PNPM Mandiri Pedesaan telah diterapkan di kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu wujud pendekatan pembangunan partisipatif yang menempatkan semua pelaku pembangunan, termasuk kesetaraan gender sehingga masyarakat menjadi subyek dan pelaku utamadari perencanaan, pengelolaan sampai dengan monitoring dan evaluasi pembangunan.

Berangkat dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti **Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) (studi pada Desa Bendungan Kec. Gondang Kab. Tulungagung)**

B. Rumusan Masalah

Pembangunan yang memberdayakan masyarakat adalah pembangunan yang memberi ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat berperan dalam menggerakkan dan mengerahkan segala sumber daya (resources) yang dimilikinya, baik sumber daya material maupun non material, terutama sumber daya manusianya sendiri untuk mandiri. Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa Bendungan kecamatan Gondang?
2. Apa sajakah yang menjadi Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) di desa Bendungan kecamatan Gondang ?

C. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui dan memdesripsikan pelaksanaan PNPM MP di desa Bendungan kecamatan Gondang

2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) di desa Bendungan kecamatan Gondang

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai nilai sebagai :

1. Dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam proses partisipasi masyarakat pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan khususnya yang ada di kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung pada umumnya.
2. Bahan masukan bagi pihak lain yang hendak mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta untuk mengetahui dan mengembangkan analisa yang lebih baik dalam memahami permasalahan yang ada.

E. Sistematika Pembahasan

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latarbelakang penelitian, perumusan masalah yang ingin diteliti, tujuan dari penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan teori-teori yang mempunyai kaitan dengan penulisan skripsi yang selanjutnya diungkapkan pada studi pustaka untuk memperoleh gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul, teori-teori yang dapat mendukung penelitian tersebut, Dalam bab ini diuraikan tentang Administrasi Pembangunan, Program dan Proyek Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Adalah metode penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, penentuan jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil dan pembahasan, menguraikan tentang hasil penelitian yang berupa data-data yang berhasil dikumpulkan selama penelitian. Data yang terkumpul, untuk selanjutnya dianalisa dan diinterpretasikan. Analisa dari data tersebut disusun sebagai hasil dari penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang dicapai dari hasil analisis data dan interpretasinya pada bab sebelumnya yang disertai dengan saran-saran oleh penulis sebagai masukan kepada Pelaku PNPM MP dan pemerintah desa Bendungan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata sosial, politik, dan ekonominya, agar pembangunan dapat berhasil. Dari sudut praktik, administrasi pembangunan merangkum dua kegiatan besar dalam satu kesatuan pengertian, yakni administrasi dan pembangunan. Sebagai bidang studi, administrasi pembangunan berkembang dari studi administrasi perbandingan (*comparative administration*), yang merupakan upaya untuk menyegarkan kembali ilmu administrasi, dan untuk menyempurnakan sistem administrasi di negara-negara berkembang agar dapat mendukung pembangunan nasional di negara-negara tersebut. Administrasi pembangunan bersifat dinamis dan inovatif, karena menyangkut upaya mengadakan perubahan-perubahan sosial. Dalam upaya itu administrasi pembangunan sangat berkepentingan dan terlibat dalam pengerahan sumber daya dan pengalokasiannya untuk kegiatan pembangunan. (Kartasmita, 1997:5)

Administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu pertama tentang administrasi dan yang kedua tentang pembangunan. Menurut Siagian (2003:4), administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Lebih lanjut Siagian juga menyebutkan bahwa pemerintah memainkan peran yang dominan dalam proses pembangunan nasional. Peran-peran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peran Selaku Stabilisator.

Ciri-ciri dari negara terbelakang dan sedang membangun ialah labilnya situasi politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu salah satu peran

pemerintah yang sangat penting yang harus dimainkan oleh pemerintah secara efektif ialah peran selaku stabilisator.

2. Peran Selaku Inovator.

Inovasi merupakan salah satu "produk" dari kreativitas. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting, cara berpikir baru. Dengan demikian, dalam memainkan peran selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru yang dikemukakan di atas.

3. Peran Selaku Modernisator.

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi sebuah negara yang modern. Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Kuat berarti mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dengan tetap menyadari pentingnya kerjasama dengan negara-negara lain di dunia. Mandiri dalam arti tidak menggantungkan diri kepada negara lain.

4. Peran Selaku Pelopor.

Pemerintah harus memainkan peranan selaku pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan perkataan lain, selaku pelopor, aparat pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat.

5. Peran Selaku Pelaksana Sendiri

Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata-mata, namun terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah.

Sementara itu salah satu fungsi dalam ruang lingkup administrasi pembangunan yaitu administrasi bagi pembangunan. Pada administrasi bagi pembangunan tercakup upaya untuk mengenali peranan administrasi negara dalam pembangunan, atau dengan kata lain administrasi dari proses pembangunan, yang membedakan administrasi negara dalam pengertian umum.

Menurut Tjokroamidjojo (1974:14) administrasi bagi pembangunan memiliki dua fungsi, yaitu

perumusan kebijakan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif. Administrasi bagi pembangunan lebih berorientasi untuk mendukung usaha-usaha pembangunan negara yang belum maju. Beberapa pendekatan yang dilakukan dalam administrasi bagi pembangunan adalah:

- a. Perencanaan
- b. Pengerahan Sumber Daya
- c. Menggerakkan Partisipasi Masyarakat
- d. Koordinasi
- e. Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan

Kemudian menurut forum pengembangan pembaharuan desa (2006), dalam pembangunan dikenal tiga jenis Paradigma Pembangunan yaitu:

- a. Paradigma Pembangunan yang berfokus pada pemerataan
- b. Paradigma Pembangunan yang berfokus pada Pertumbuhan
- c. Paradigma Pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat.

Paradigma Pembangunan yang berfokus pada pemerataan adalah yang menjadikan pemerataan hasil-hasil pembangunan sebagai isu sentral dalam pembangunan. Kesejahteraan rakyat yang merata menjadi keinginan yang didahulukan. Paradigma Pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan adalah Paradigma yang menjadikan pertumbuhan sebagai isu sentral dalam pembangunan. Paradigma itu mengharapkan perolehan devisa negara yang tinggi, namun kurang memperhatikan kondisi kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Sedangkan Paradigma Pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat adalah Paradigma yang menjanjikan rakyat sebagai pusat pembangunan, baik dalam konstruksi konsep dan praktik pembangunan, yang menyetarakan kehendak dan kreativitas rakyat, yang mengembangkan kemampuan rakyat, dan yang mempertimbangkan penilaian terhadap hasil-hasil pembangunan.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1981:49) administrasi pembangunan adalah suatu administrasi bagi suatu usaha pembangunan sosial ekonomi yang bersifat dinamis dan inovatif dan mengupayakan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat melalui berbagai

pengeralahan dan alokasi sumber daya untuk kegiatan pembangunan. Secara lebih spesifik, administrasi pembangunan berfungsi merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan (ke arah modernisasi, pembangunan bangsa atau pembangunan sosial ekonomi), dan melaksanakannya secara efektif dengan pendekatan yang multidisiplin.

Pengertian Pembangunan

1. Konsep Pembangunan

Pembangunan secara etimologi berasal dari kata “bangun” yang berarti sadar, siuan, bangkit berdiri, dan juga berarti bentuk. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembangunan meliputi bentuk (anatomis), kehidupan (fisiologis), dan perilaku (*behavioral*).

Pembangunan merupakan keinginan bangsa-bangsa untuk mengejar bahkan memburu masa depan yang lebih baik menurut kondisi dan cara masing-masing melahirkan berbagai konsep pembangunan. Konsep pembangunan tersebut antara lain

1. Pertumbuhan (*growth*)
 2. Rekonstruksi (*reconstruction*)
 3. Modernisasi (*modernization*)
 4. Westernisasi (*westernization*)
 5. Perubahan sosial (*social change*)
 6. Pembebasan (*liberation*)
 7. Pembaruan (*innovation*)
 8. Pembangunan bangsa (*nation building*),
 9. Pembangunan nasional (*national development*),
 10. Pembangunan (*development*), pengembangan dan pembinaan.
- (Agus Suryono & Trilaksono Nugroho, 2008:1).

Menurut Todaro dalam Hanani dan Purnomo (2003:28) pembangunan adalah suatu proses yang multidimensional yang tersusun dan terencana secara sistematis yang bertujuan untuk menciptakan suasana dan sistem baru. Sedangkan Sanusi (2000:15) memberikan pengertian pembangunan bahwa pembangunan mempunyai arti yang khas dalam upaya mengubah keadaan ekonomi suatu bangsa dan negara berkembang jauh lebih baik daripada sebelumnya, yakni dengan upaya meningkatkan pendapatan nasional, pendapatan perkapita,

melenyapkan ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan kerja dan sebagainya.

Pembangunan sering diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Siagian (2003:4) mendefinisikan pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Pembangunan bangsa adalah bagian integral dari pembangunan nasional suatu negara.

Pembangunan setiap negara berkembang bersifat multidimensional, yakni pembangunan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Arif Budiman dalam Saiful (2000:108) menjelaskan bahwa pembangunan pada akhirnya mesti ditujukan pada manusianya itu sendiri. Manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif mereka harus merasa bahagia, aman dan bebas dari rasa takut, karenanya mesti diciptakan lingkungan politik dan budaya yang kondusif, sehat, dan dinamis. Sebuah proses pembangunan semacam ini menggambarkan suatu kondisi dimana konsep pembangunan seyogyanya memperhatikan seluruh aspek pembangunan. Dengan demikian pendekatan pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan terhadap seluruh aspek pembangunan tersebut.

Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (1994:10) mengatakan bahwa pembangunan adalah upaya suatu masyarakat atau bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai pandangan masyarakat atau bangsa itu.

Hal senada disampaikan oleh Tjokrowinoto dalam Suryono (2004:21), yang menyimpulkan bahwa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu), sebagai berikut :

1. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ke tataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
2. Pembangunan sebagai upaya manusia sadar, terencana dan melembaga.
3. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*).
4. Pembangunan memperoleh sikap dan konsep transedental, sebagai *meta disciplinary phenomom*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideologi of developmentalism*.
5. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*). Menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa semakin meningkat.
6. Pembangunan menjadi *cultur specific, situation specific* dan *time specific*.

Pendapat diatas memberikan pemahaman bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang bersifat dinamis dan multidimensional yang pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hikmat (2001:15) mengatakan bahwa permasalahan sosial yang terjadi juga diakibatkan masalah struktural, kebijakan yang keliru, implementasi kebijakan yang tidak konsisten dan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dimensi tersebut memberikan legitimasi atau penguatan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan yang juga merupakan bentuk dinamika demokratis yang dapat melibatkan semua stakeholder pembangunan. Partisipasi masyarakat harus dimaknai sebagai kemampuan untuk berinisiatif dengan cara melibatkan diri dalam proses pembangunan termasuk menentukan arah dan bentuk program pembangunan yang mereka inginkan.

Dari pengertian-pengertian pembangunan yang telah dikemukakan diatas, apabila dikaji lebih jauh akan tampak terdapat beberapa unsur yang sama, yang kiranya dapat dijadikan sebagai ciri pokok dari konsep pembangunan yaitu:

1. Adanya pergeseran keadaan yaitu perubahan dari keadaan yang satu kepada keadaan yang lebih baik dan pertumbuhan yang mengarah pada modernisasi.
2. Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan.
3. Perubahan yang terlaksana dilakukan secara sadar dan berencana.
4. Proses perubahan secara sadar tersebut berdasarkan pada norma-norma atau metode-metode tertentu (rasionalitas) dan bertujuan pada usaha pembinaan bangsa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Tjokrowinoto (1996:8) ada lima paradigma yang mendasari proses pelaksanaan pembangunan di suatu negara, yaitu pertumbuhan, *welfare state*, neo ekonomi, *structuralize* dan *humanizing*. Namun, kelima paradigma ini hanya bergerak pada tiga dimensi yaitu: pertumbuhan, kesejahteraan, dan *people centered*. Salah satu paradigma pembangunan yang hingga saat ini masih populer sebagai acuan pembangunan di sebagian besar negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah paradigma “*people centered development*”.

2. Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan menurut Slamet (1981:110) diartikan sebagai keseluruhan langkah-langkah pokok (kebijaksanaan-kebijaksanaan) dan pelaksanaan yang melalui perhitungan yang pasti digunakan untuk mencapai tujuan atau mengatasi sesuatu persoalan (*policy decision and execution*). Dalam penyusunan strategi pembangunan nasional suatu negara, kita dapat memilih beberapa pendekatan secara alternatif yang masih berorientasi kepada teori. Yaitu berupa *Growth theory*, *Rural Development Theory*, *Agro-First Theory*, *Basic Needs Theory* dan sebagainya.

Strategi pembangunan yang berasal “dari atas” sebaiknya dibarengi dengan strategi pembangunan “dari bawah” yang sistematis, holistik dan kontekstual (sesuai dengan konteks lokal).

Ciri kontekstual memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan merasa menjadi bagian dan diuntungkan oleh program tersebut. Lebih lanjut menurut Suparlan dan pendekatan ini merupakan variabel yang bertemu melalui program pembangunan dari atas dan dari bawah berdasarkan interpretasi budaya masyarakat lokal sebagai program yang sistematis atau holistik. Adapun strategi dasar dari pendekatan ini memberi kesempatan agar bisa melakukan interpretasi sesuai dengan perspektif kebudayaan yang dimiliki.

Alasan utama strategi pembangunan yang berasal dari bawah adalah menciptakan suasana yang mendorong adanya stimulasi yang mampu menanggapi dan memperlakukan program yang datang dari atas berdasarkan interpretasi budaya (*cultural interpretation*), tindakan (*action*) yang sesuai dengan acuan dan tujuan yang ingin dicapai. Alasan berikutnya (konteks lokal) adalah satuan administrasi sebagai proses interpretasi atas program yang dilaksanakan secara bertingkat dari propinsi sampai tingkat dusun.

Dengan strategi pembangunan yang kontekstual, maka program-program pembangunan dari atas ada yang bersifat linier dan sektoral dipadukan menjadi program yang sistematis atau

holistik. Disamping itu program-program pembangunan yang bercorak nasional yang datang dari atas dan dari bawah mampu memberikan ruang yang digunakan untuk membentuk kembali tradisi-tradisi yang dimiliki.

3. Sasaran pembangunan

Pembangunan pada hakekatnya adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Menurut Sumodiningrat (1999:172), peningkatan kesejahteraan umum masyarakat merupakan inti dari sasaran pembangunan. Suatu pembangunan bisa dikatakan berhasil jika mampu mengangkat derajat rakyat sebanyak mungkin pada tatanan kehidupan ekonomi yang lebih baik dan layak.

Sasaran pembangunan khususnya pembangunan kota adalah bagaimana masyarakat dimampukan agar secara mandiri mengarahkan dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada untuk meningkatkan taraf hidupnya. Sejalan dengan uraian tersebut Ismani (1991:45) mengemukakan bahwa :

“Sebagaimana diketahui dalam pembangunan pada umumnya terdapat subyek dan obyek atau pelaksana dan sasaran. Namun dalam pembangunan masyarakat, pelaksana dan sasarannya menjadi satu. Oleh karena itu masyarakat berperan ganda. Itulah sebabnya pembangunan masyarakat sebagai modernisasi dan juga perubahan sosial (social change) yang dilakukan pemerintah bersama-sama dengan masyarakat”.

Memang pada awalnya pembangunan perlu didorong oleh kekuatan dari luar, tetapi setelah itu diharapkan masyarakat mampu membangun dirinya sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembangunan masyarakat pada hakekatnya merupakan usaha memperbaiki taraf hidup masyarakat akan berhasil baik kalau ada motivasi dari mereka untuk mengembangkan dirinya. Dengan demikian akan timbul peran serta aktif dalam pembangunan yang hasilnya akan mereka nikmati, sehingga diperlukan *need for achievement* dari mereka.

Untuk itulah salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan dalam pengembangan usaha ekowisata adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan di tingkat daerah, meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, dan meningkatnya perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

B. Pembangunan Desa

1. Pengertian Pembangunan Desa

Setelah memahami pengertian tentang pembangunan secara umum, tentu akan lebih mudah bagi kita untuk merumuskan apa yang disebut dengan pembangunan pedesaan. Pembangunan (wilayah) desa secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi social, ekonomi. Dan budaya masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat dua stakeholder yang berperan utama dan sejajar (equal) yaitu pemerintah dan masyarakat (Korten, 1988:378). Meskipun demikian dalam konteks yang lebih luas juga terdapat peranan “Agen eksternal” seperti LSM, konsultan, lembaga Donor, dll

Dalam bahasa Inggris, pembangunan pedesaan ini sering disebut dengan *Community Development*. Meskipun cukup mudah untuk merumuskan pengertian tentang pembangunan pedesaan, tetapi secara praktis menurut Khairuddin (1992:66) sangat banyak aspek-aspek kehidupan pedesaan yang harus disoroti di dalam memberikan pengertian tersebut.

Pembangunan pedesaan menurut Hellen Miller (Wiryoemarto, 1977:2) adalah istilah yang dipakai guna menjelaskan pendekatan yang digunakan untuk mendekati masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan inisiatif dan kekuatan lokal yang lebih efektif untuk meningkatkan produksi dan standar hidup yang lebih baik. Sedangkan Hagul (1985:11) berpendapat yang dimaksud dengan pembangunan pedesaan ialah suatu proses yang membawa peningkatan kemampuan penduduk menguasai lingkungan sosial yang disertai meningkatnya taraf hidup mereka sebagai akibat dari penguasaan tersebut.

Lebih lanjut menurut Tjokrowinoto (Khairuddin, 1992:67) yang dimaksud pembangunan desa merupakan suatu bentuk tindakan kolektif suatu masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut dalam arti material dan spiritual. Dari pendapat para ahli tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan pedesaan yaitu merupakan suatu aktivitas ataupun proses yang sengaja dilakukan oleh masyarakat desa tersebut yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar lebih mandiri dan swadaya.

Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar desa (outsider stakeholder) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk ke desanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu.

Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki.

Sejalan dengan itu, segala potensi lokal betapapun kecilnya tidak dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dan entry point dari sebuah pembangunan. Midgley (1995:78-79) mengemukakan ada beberapa aspek dalam pembangunan desa, diantaranya mementingkan proses dan adanya intervensi. Dua hal tersebut perlu disoroti karena terkait dengan konsep pemberdayaan. Suatu program pembangunan yang hanya mementingkan hasilnya untuk dipersembahkan pada masyarakat justru mengingkari martabat masyarakat, karena hal tersebut menghambat masyarakat untuk berperan serta dalam proses. Sedangkan intervensi dimaksudkan bahwa dalam pencapaian perubahan sosial dengan pemerataan kesejahteraan bagi semua penduduk tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, karena pemerintah yang menguasai berbagai sumber daya (Strategies for Social Development by Governments).

Hal tersebut juga berkaitan dengan penumbuhan keberdayaan mereka dalam program-program pembangunan, apalagi yang memang berskala lokal dan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sudah sewajarnya didesentralisasikan pada masyarakat setempat untuk direncanakan dan dilaksanakan. Peran pemerintah terbatas dalam hal penyediaan dana stimulan dan memfasilitasinya. Banyak pembahasan yang dinamis tentang pembangunan desa, dan diantara berbagai tema yang berulang-ulang dimunculkan, Bryant & White (1987:389) menyebutkan tiga hal yang penting dan menentukan tentang pembahasan tersebut, yakni :

- a. Pentingnya organisasi lokal yang partisipatif dan beorientasi pada belajar dari pengalaman, yang merupakan salah satu cara pokok untuk menanggulangi kekeliruan kekeliruan dan ketidakpastian dalam lingkungan pembangunan yang sangat tidak pasti.
- b. Tidak dapat hanya dengan mengandalkan kompetensi teknokratik semata-mata yang dianggap sebagai “pemberesan kilat”. Kompetensi tersebut dianggap menggunakan top down planning yang kecenderungannya bukannya merupakan bagian dari jalan keluar, melainkan justru merupakan bagian dari permasalahan.
- c. Pentingnya menyimak kebutuhan-kebutuhan yang spesifik dari masyarakat lokal yang dipengaruhi oleh aspek sosial dan budayanya. Kompleksitas budaya lingkungan itu merupakan bagian penting dari kehidupan lokal.

Secara khusus, Bryant & White (1987:391) menyikapi pembangunan desa sebagai suatu proses yang mempunyai banyak dimensi permasalahan dan penyelesaiannya tidak bersifat instant, lebih jelasnya, yaitu :

Bahwa pemecahan yang cepat dan tepat bagi pembangunan desa tidak ada, khususnya jika pembangunan dipahami dalam hubungan dengan kapasitas, keadilan dan penumbuhan kekuasaan (empowerment) dalam suatu dunia yang lestari, berkecukupan dan saling bergantung. Dengan demikian siapapun yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan desa harus menghindari dua hal yang sangat merugikan yaitu sikap pesimistik dan metode pemecahan yang simplimistik.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa konsep pembangunan desa telah menempatkan perlakuan terhadap masyarakat dalam pembangunan pada posisi yang begitu berarti dan sentral. Sehingga keterlibatannya dalam proses pembangunan menjadi titik penentu apakah proses pembangunan itu menjadi wahana proses belajar atau hanya sekedar sebuah rekayasa yang mana pemerintah menjadi pemain tunggal.

2. Tujuan Pembangunan masyarakat desa

Pembangunan masyarakat desa, sebagai bagian dari pembangunan nasional, tentu saja mempunyai tujuan yang tidak terlepas dari pembangunan secara keseluruhan. Karena kondisi pedesaan mempunyai spesifikasi tertentu, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi, maka tujuan pembangunan di pedesaan lebih sering ditekankan pada bidang ekonomi, sebab kondisi ekonomi inilah yang pada umumnya sangat memprihatinkan. Oleh sebab itulah tujuan pembangunan desa harus lebih diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Disamping itu, menurut Khairuddin (1992:68) tujuan pokok untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pembangunan desa mempunyai tujuan-tujuan yang sifatnya lebih strategis dan dapat mempercepat proses pembangunan desa, antara lain:

1. Memperlancar sarana hubungan dan komunikasi, untuk lebih membuka desa terhadap daerah sekitarnya sehingga tidak menjadi daerah yang terisolasi
2. Meningkatkan dan menyempurnakan struktur administrasi pedesaan beserta persoalannya sebagai usaha menciptakan pembangunan desa yang lebih terarah dan efisien

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*”, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “*pemberkuasaan*”, dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (disadvantaged). Ginandjar Kartasasmita (“Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan : Teori, Kebijakan, dan Penerapan”, 1997) memberikan pengertian pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

“Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat berpusat pada masyarakat, partisipasi, pembinaan, dan berkelanjutan. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut, yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu.”

Konsep pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Upaya pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat. Perubahan struktural yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati. Begitu pula sebaliknya, yang menikmati haruslah yang menghasilkan. Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro. Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program

pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian, proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut ; *pertama*, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. *Kedua*, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. *Ketiga*, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Implementasi program pembangunan yang menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan suatu konskuensi dari pergeseran paradigma pembangunan nasional yang mengarah pada tercapainya upaya pembangunan yang berpusat pada manusia. (www.ginandjar.com)

Sementara Swift dan Levin (dalam Suharto, 1997:214) mengatakan bahwa pemberdayaan menunjuk pada usaha "reallocation of power" melalui perubahan struktur sosial. Sedangkan menurut Rappaport mengungkapkan pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya (Suharto, 1997:215). Jadi yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat ialah dimana terdapat upaya untuk memandirikan

(memberikan kekuasaan) masyarakat melalui sebuah perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat merupakan proses dimana masyarakat diberikan kepercayaan agar dapat menentukan proses pembangunan yang dibutuhkan mereka sendiri, sementara pemerintah dan lembaga lain mempunyai peran sebatas pendukung dan memfasilitasi. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini akan mengantar masyarakat dalam berproses untuk mampu menganalisa masalah dan peluang yang ada serta mencari jalan keluar sesuai sumberdaya yang mereka miliki. Sejalan dengan pemahaman pengertian pemberdayaan di atas terdapat beberapa pengertian pemberdayaan masyarakat.

Chambers mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan suatu paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *people-centered, participatory, empowering and sustainable* (Kartasasmita, 1996:142).

Namun demikian, untuk memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian proses yang panjang (tidak seketika atau tidak langsung jadi), agar mereka lebih berdaya. Suzanne Kinder Vetter seperti yang dikutip oleh Saraswati (1997:79) mengatakan bahwa "*people gaining an understanding of and control over social economic and or political forces in order to improve their standing in society*".

Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong (*driving forces*) social ekonomi dan politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai "power" (*driving force*) dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri (self-development). Secara konseptual menurut Saraswati (1997:79-80) pemberdayaan harus mencakup enam hal sebagai berikut :

- a. *Learning by doing*. Artinya , pemberdayaan adalah sebagai proses hal belajar dan ada suatu tindakan konkrit yang terus-menerus, yang dampaknya dapat terlihat.
- b. *Problem solving*. Pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara dan waktu yang tepat.
- c. *Self-evaluation*. Yaitu bahwa pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evaluasi secara mandiri.
- d. *Self-development and coordination*. Artinya mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
- e. *Self-selection*. Suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah kedepan.

f. *Self-decisim*. Dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya dimiliki kepercayaan diri (*self-confidence*) dalam memutuskan sesuatu secara mandiri

Keenam unsur tersebut merupakan pembiasaan untuk berdaya, sebagai penguat atau pengait pemberdayaan jika dilakukan secara kontinyu maka pengaruh yang ditimbulkan semakin lama semakin kuat dan apabila telah kuat diharapkan dapat terjadi proses menggelinding dengan sendirinya. Dalam pandangan kartasasmita (1997:11-12) memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Seperti yang ditulis oleh Sustiyonadi dalam tesis bahwa indikator-indikator pemberdayaan masyarakat menurut Robert Chambers :

1. *Self reliant* (pengakuan diri)
2. *Self confident* (percaya diri)
3. *Self respecting* (kemandirian)

Dari konsep pemberdayaan menurut Chambers ini digabung dengan konsep pemberdayaan gorbonda kikuchi seperti yang ditulis oleh Sustiyonadi sebagai berikut:

1. *Benevolence* (pengabdian), yaitu suka menolong orang lain yang memerlukannya.
2. *Independence* (kemandirian), yaitu suka kebebasan karena kebenaran dan suka membebaskan orang lain karena kemampuannya.
3. *Support* (dukungan), yaitu suka memberi bantuan dan bersedia menerima dukungan dari orang lain.
4. *Recognition* (pengakuan), yaitu suka memberi perhatian dan suka menjaga nama diri maupun kelompoknya.
5. *Leadership* (kepemimpinan), yaitu suka memecahkan persoalan orang lain dengan kemampuan dan kewibawaannya.
6. *Conformity* (kesesuaian), yaitu suka mematuhi peraturan dan tata tertib serta memilih jalan tengah.

Dampak dari pemberdayaan ini adalah:

1. Adanya nilai kelompok yang konsisten dan sangat penting bagi individu.
2. Kelompok memiliki nilai yang jelas tentang apa yang harus dilaksanakan oleh anggota dan melakukan indoktrinasi yang efektif kepada anggota tentang model tersebut.
3. Kegiatan kelompok dalam mencapai tujuan memberikan kesempatan kepada individu berpartisipasi.
4. Individu ikut ambil bagian dalam aktivitas kelompok dan imbalan yang diperoleh merupakan usaha-usaha yang dilakukannya.

Sedangkan menurut Kartasasmita, memberdayakan masyarakat mengandung pengertian sebagai berikut :

“Upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat”.(Kartasasmita, 1996: h.144).

Disamping tersebut diatas, pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat ia tinggal.(Priyono dan Pranarka, 1996: 62-63)

Sedangkan dari perspektif lingkungan menurut Borrini dan Shatty bahwa pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alam dan pengelolaannya secara berkelanjutan.(Priyono dan Pranarka, 1996: h.63).

Sedangkan proses pemberdayaan setidaknya memiliki dua kecenderungan diantaranya:

“Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini disebut juga sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.

Kedua, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Disebut juga dengan kecenderungan sekunder”. (Priyono dan Pranaka, 1996: h.56-57).

Dari beberapa uraian pengertian dan penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan bahwa pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam proses ini, lembaga berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Usulan-usulan

masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program nasional.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat menurut Kartasasmita dapat dilakukan melalui tiga cara: Pertama, menciptakan suasana (iklim) yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi untuk mengorganisasi dirinya sendiri dan potensi kemandirian tiap individu perlu diberdayakan.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana baik fisik (irigasi, jalan, dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Ketiga, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan. (Priyono dan Pranarka, 1996:105-106)

Di samping itu pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*) karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). (Kartasasmita, 1996:20) Hal senada juga dikemukakan oleh Sumodiningrat bahwa dalam upaya pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi yaitu :

1. Pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Setiap anggota masyarakat secara alamiah memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Itu berarti bahwa setiap anggota masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki menuju kehidupan yang lebih baik.
2. Pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar.
3. Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat berarti upaya melindungi untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang. (Sumodiningrat, 1997: h.6)

Menurut kartasasmita (1996:144) bahwa keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional.

Disamping itu keberdayaan masyarakat merupakan kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan baik yang menyangkut penentuan nasib sendiri sebagai faktor penentunya. Mitos-mitos yang umumnya terkait dalam upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diuraikan oleh Kartasasmita (1996:146-149), meliputi sepuluh hal berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan material, rasional, dan bertumpu pada pengembangan ekonomi masyarakat.
2. Pemberdayaan masyarakat akan lebih mudah dan lebih baik diwujudkan melalui pendekatan pembangunan yang berasal dari atas (*top down approach*) daripada pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat di tingkat *grass root* (*bottom up approach*).
3. Pemberdayaan masyarakat lebih membutuhkan dan mementingkan bantuan material.
4. Pengetahuan dan teknologi internasional selalu lebih baik daripada pengetahuan dan teknologi masyarakat dalam proses pengembangan masyarakat (*the international knowledge and technology are always superior compared to the indigeneous knowledge and technology*).
5. Kelembagaan lokal (*indigenous institution*) selalu tidak efisien dan tidak akan mampu mewujudkan upaya pemberdayaan masyarakat.
6. Masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah, tidak tahu apa yang diinginkan.
7. Kemiskinan lahir akibat kebodohan dan kemalasan anggota-anggota masyarakat.
8. Efisiensi adalah tujuan pembangunan dan tujuan alokasi sumber daya masyarakat.
9. Sektor pertanian dan pedesaan adalah sektor inferior yang tidak perlu diprioritaskan pengembangannya.
10. Ketidakseimbangan dalam akses dan kepemilikan/penguasaan sumberdaya pembangunan merupakan syarat perlu untuk melakukan perubahan.

Kemampuan masyarakat dalam mewujudkan dan mempengaruhi arah serta pelaksanaan suatu program ditentukan dengan mengandalkan *power* (daya) yang dimilikinya sehingga pemberdayaan (*empowerment*) merupakan "*central theme*" atau jiwa partisipasi yang sifatnya aktif dan kreatif. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Curtis dalam moeljarto, sebagai berikut:

"participation is concerned with the distribution of power in society, for it is power which enables groups to determine which needs, and whose needs will be met through the distribution of resources".

(Partisipasi adalah ditunjukkan dengan pembagian kekuasaan dalam masyarakat untuk kekuasaan ini yang memungkinkan kelompok-kelompok untuk membagi kebutuhan-

kebutuhan, dan kebutuhan-kebutuhan itu akan menimbulkan distribusi sumber daya). Priyono dan Pranarka, 1996:133-134).

Pemberdayaan merupakan "*the missing ingredient*" dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang aktif dan kreatif. Secara sederhana, pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan kontrol atas sumber-sumber kehidupan yang penting. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat untuk bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mampu mengembangkan diri untuk mencapai tujuan hidupnya.

Menurut Prasojo (2004:11), ada beberapa permasalahan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat antara lain:

1. Kontinuitas dan diskoordinasi, yaitu keseluruhan program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan tidak dikoordinasikan dengan baik dan dilaksanakan secara sporadis.
2. Disinformasi program, yaitu pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan bantuan para konsultan terkadang tidak dipahami oleh masyarakat.
3. Disorientasi, yaitu pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan proses biasanya memerlukan waktu yang cukup lama.
4. Generalisasi, yaitu diferensiasi sosial, politik, dan budaya yang ada di Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ternilai.
5. Rentang birokrasi dan tingginya biaya operasional, yaitu berbagai peraturan hukum dan Undang-Undang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang kaku, yang hanya didasarkan pada Surat Keputusan (SK), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) juga sistem penganggaran dapat menjadi penghambat dalam pemberdayaan masyarakat.
6. Indikator yang tidak tepat, pemberdayaan masyarakat selama ini selalu di ukur dalam bentuk fisik, komoditas dengan berorientasi pada input dan kualitatif daripada non fisik dengan ukuran keberhasilan dari dampak dan proses.

Selain itu, untuk memberdayakan masyarakat tentu harus melalui proses pendekatan yang mudah diterima oleh masyarakat yang tidak membuat aneh dan kaget serta curiga. Seperti yang dikemukakan oleh tokoh pergerakan pembangunan masyarakat China, Y.C. Yen (1920) dalam Islamy (2004) yang mengatakan bahwa setiap penggerak pembangunan masyarakat harus melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) *Go to people*, mendatangi masyarakat yang hendak diberdayakan.
- 2) *Live among the people*, hidup dan tinggalah dengan mereka agar kita mengenal dengan baik kepentingan dan kebutuhannya.
- 3) *Learn from the people*, belajarlah dari mereka supaya dapat dipahami apa yang ada di benak mereka, potensi apa yang mereka miliki.
- 4) *Plan with the people*, ajak dan ikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan.

- 5) *Work with the people*, ajak dan libatkan mereka dalam proses pelaksanaan rencana.
- 6) *Start with what the people know*, mulailah dari apa yang masyarakat ketahui dan pahami.
- 7) *Build on what the people have*, bangunlah sesuatu dari modal yang dimiliki masyarakat.
- 8) *Teach by showing, learn by doing*, ajarilah masyarakat dengan contoh kongkret/nyata.
- 9) *Not a showcase, but a pattern*, mereka jangan dipameri dengan sesuatu yang menyilaukan, tetapi berikanlah kepada mereka suatu pola.
- 10) *Not odds and ends, but a system*, jangan tunjukkan kepada mereka sesuatu yang aneh dan akhir dari segalanya tetapi berikanlah kepada mereka suatu sistem yang baik dan benar.
- 11) *Not peacemeal, but integrated approach*, jangan menggunakan pendekatan yang sepotong-potong, tetapi pendekatan yang menyeluruh dan terpadu.
- 12) *Not to conform but to transform*, bukan penyesuaian cara/model, tetapi transformasi model.
- 13) *Not relief but realise*, jangan berikan penyelesaian akhir kepada mereka tetapi beri kebebasan kepada mereka sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. (Agus Suryono & Trilaksono Nugroho:27-28)

Pemberdayaan masyarakat juga tidak hanya menyangkut aspek ekonomi. Ada berbagai macam pemberdayaan, antara lain: pemberdayaan bidang politik, bidang ekonomi, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, bidang ekologi, dan pemberdayaan bidang spiritual. Meskipun tujuan dari masing-masing pemberdayaan berbeda, namun untuk keberhasilan pemberdayaan yang menyeluruh, berbagai macam bentuk pemberdayaan tersebut seharusnya dapat dipadukan dan saling melengkapi. (Prasojo, 2004:13) Kemudian Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan diterima dalam pengembangan atau perubahan struktur dan kelembagaan untuk akses yang lebih merata terhadap sumber daya atau pelayanan, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan melalui aksi sosial menitikberatkan pada pentingnya perjuangan politik dan perubahan dalam mengembangkan kekuatan efektif. Sedangkan pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran mengembangkan pentingnya proses pendidikan yang dapat melengkapi warga masyarakat untuk meningkatkan kekuasaannya.

2. Tingkatan Pemberdayaan masyarakat

Sudah saatnya paradigma pembangunan yang selal menempatkan pemerintah sebagai sumber segala-galanya digeser dengan menempatkan masyarakat sebagai pemain utama yang mempunyai peran penting. Kekuasaan sejatinya dikembalikan kepada masyarakat, agar masyarakat menjadi aktor utama dalam pembangunan. Sebuah proses seharusnya dilakukan untuk meningkatkan derajat keberdayaan masyarakat sampai kepada tingkat keberdayaan masyarakat yang optimal.

Secara bertingkat, keberdayaan masyarakat menurut susiladiharti yang dikutip oleh Huraerah (2008:90) dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar (basic needs).
- b. Tingkat keberdayaan kedua adalah penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan.
- c. Tingkat keberdayaan ketiga adalah dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya.
- d. Tingkat keberdayaan keempat adalah kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
- e. Tingkat keberdayaan kelima adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan

Untuk mewujudkan derajat keberdayaan masyarakat tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah secara runtun dan simultan antara lain:

1. Meningkatkan suplai kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat yang paling tidak berdaya (miskin)
2. Upaya penyadaran untuk memahami diri berupa potensi, kekuatan dan kelemahan serta memahami lingkungannya.
3. Pembentukan dan penguatan institusi, terutama institusi di tingkat lokal.
4. Upaya penguatan kebijakan, dan
5. Pembentukan dan penguatan jaringan usaha/kerja.

3. Tahapan Pemberdayaan

Sebagai sebuah proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan. Tahapan-tahapan pemberdayaan tersebut yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. (Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007).

Tahap penyadaran, target sasaran yaitu masyarakat miskin diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada. Di samping itu juga diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Pada tahap ini, masyarakat miskin dibuat mengerti bahwa proses pemberdayaan itu harus berasal dari diri mereka sendiri. Diupayakan pula agar komunitas ini mendapat cukup informasi. Melalui informasi aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara alamiah. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan.

Tahap Pengkapasitasan, tahap ini bertujuan untuk memampukan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan *life skill* dari masyarakat miskin. Pada tahap ini sekaligus dikenalkan dan dibukakan akses kepada sumberdaya kunci yang berada di luar komunitasnya sebagai jembatan mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya.

Tahap Pendayaan, pada tahap ini masyarakat miskin diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi aspirasinya serta dituntun untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan.

Upaya pemberdayaan menurut Kartasmita (1996:74) dilakukan melalui 3 (tiga) arah, yaitu:

1. Menetapkan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan, pemberdayaan adalah usaha untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berusaha untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat daya atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai masukan, surat pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.
3. Memberdayakan mengandung arti melindungi, dalam proses pemberdayaan harus mampu mencegah yang lemah, karena kurang berdaya menghadapi pihak-pihak yang kuat. Oleh karena itu perlindungan dan pemihakan kepada masyarakat yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan. Dengan demikian untuk menciptakan masyarakat yang berdaya, perlu adanya pemihakan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang diarahkan langsung pada akses rakyat kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan peluang-peluang bagi masyarakat di lapisan bawah untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga mampu mampu mengatasi kondisi keterbelakangan dan memperkuat daya saing ekonomi.

Ketiga arah pemberdayaan diatas berpangkal pada 2 (dua) sasaran utama, yaitu:

1. Untuk melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.
2. Untuk memperkuat posisi masyarakat dalam struktur kekuasaan. (Sumodiningrat, 1996)

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diperlukan suntikan modal usaha, penguatan institusi, dan pembangunan prasarana dasar. Hal ini terkait pula dengan penciptaan kesempatan kerja dan peluang usaha yang memberikan kesejahteraan yang memadai bagi masyarakat.

Untuk sampai pada ketiga sasaran diatas maka proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui 3 tahapan yaitu:

1. Inisial, yaitu pemberdayaan dari pemerintah oleh pemerintah dan untuk rakyat.
2. Partisipatoris, pemberdayaan dari pemerintah bersama rakyat dan untuk rakyat.
3. Emansipatoris, pemberdayaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dan didukung oleh pemerintah.

Pada tahap ketiga ini, masyarakat sudah dapat menemukan eksistensi dirinya, sehingga dapat melakukan pembaruan-pembaruan dalam mengaktualisasi diri atau emansipatoris, kegiatan pemberdayaan masyarakat telah mencapai puncaknya dan untuk merealisasikannya diperlukan dua persyaratan pokok, yaitu:

1. Perencanaan Pembangunan, dimana perencanaan pembangunan yang berwajah pemberdayaan masyarakat adalah yang mengarah pada strategi dasar pemberdayaan masyarakat yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan, dan strategi ini memiliki tiga arah yaitu (Sumodiningrat, 1996) yaitu:
 - a. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Pemantapan ekonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan didaerah yang mengembangkan peran serta masyarakat.
 - c. Modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat lokal.
2. Pelaksanaan program pembangunan yang berwajah pemberdayaan masyarakat memiliki ciri antara lain: (Kartasasmita, 1996)
 - a. Kegiatan yang dilakukan harus terarah dan menguntungkan masyarakat yang lemah
 - b. Pelaksanaan harus dilakukan oleh masyarakat sendiri, dimulai dari pengenalan apa yang harus dilakukan.
 - c. Karena masyarakat lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri, akibatnya kekurangan keberdayaannya, maka upaya pemberdayaan masyarakat menyangkut pula pengembangan kegiatan bersama (*cooperative*) dalam kelompok yang dapat dibentuk atas dasar wilayah tempat tinggal.

Mengerahkan partisipasi yang luas dan masyarakat untuk turut serta membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial, disini termasuk keikutsertaan orang-orang setempat yang telah maju dan anggita masyarakat yang mampu lainnya, organisasi masyarakat termasuk LSM, Perguruan Tinggi dan sebagainya.

4. Proses Pemberdayaan

Pranarka & Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa ”proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan

atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”.

Sedangkan Kartasmita (1996) menyatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu: *Pertama*: Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumberdaya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang.

Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini.

Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya.

Ketiga, memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan berkamampuan. Kaitannya dengan indikator masyarakat berdaya, Sumardjo (1999) menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu: (1) mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan), (2) mampu mengarahkan dirinya sendiri, (3) memiliki kekuatan untuk berunding, (4) memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan (5) bertanggungjawab atas tindakannya.

Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan

mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab. Kemudian menurut Adi (2003), meskipun proses pemberdayaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, namun dalam implementasinya tidak semua yang direncanakan dapat berjalan dengan mulus dalam pelaksanaannya.

Tak jarang ada kelompok-kelompok dalam komunitas yang melakukan penolakan terhadap ”pembaharuan” ataupun inovasi yang muncul. (www.damandiri.or.id/file/dasminsiduipbbab2.pdf)

D. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upayapenanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsure masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.

Masyarakat yang mandiri tidak mungkin diwujudkan secara instan, melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Melalui kegiatan yang dilakukan dari, untuk, dan oleh masyarakat, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif. Untuk harmonisasi dan sinergi pelaksanaan berbagai program pemberdayaan.

1. Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K)

Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-nelayan Kecil (P4K) merupakan suatu upaya khusus yang dikelola Departemen Pertanian bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia di dalam membimbing dan membantu keluarga-keluarga miskin di perdesaan, sehingga mereka mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara berkelanjutan. P4K lahir sebagai suatu respon terhadap situasi yang berkembang pada dekade 70-an.

Program pembangunan diakui telah membawa banyak perubahan, terutama sekali dengan semakin tersedianya beragam kesempatan yang bisa dikelola oleh masyarakat guna memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraannya. Tapi bagi sebagian yang lain, mereka yang hidup dalam ketertinggalan, mereka yang hidup dibawah garis maya kemiskinan, kesempatan yang tersedia terasa sulit mereka jangkau.

Dua Jalur Pendekatan P4K. P4K menempuh dua jalur pendekatan dalam membantu menanggulangi kemiskinan di perdesaan, yakni pendekatan pembangunan sumberdaya manusia melalui serangkaian proses pemberdayaan petani-nelayan kecil, dan pendekatan pelayanan keuangan mikro guna mendukung bertumbuh kembangnya usaha-usaha mikro dan usaha keluarga di perdesaan. Jalur pembangunan sumberdaya manusia/pemberdayaan. Pembangunan sumberdaya manusia (human resources development), didefinisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan mencakup: (i) investasi dalam sumberdaya manusia untuk meningkatkan kapabilitas produktifnya; (ii) pemanfaatan sumberdaya manusia tersebut untuk memproduksi hasil-hasil yang meningkat; dan (iii) partisipasi masyarakat di dalam menikmati manfaat pembangunan.

Pada dasarnya penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan sumberdaya manusia/pemberdayaan dimulai dengan membantu penduduk miskin agar makin sadar, percaya diri dan menghargai potensi yang dimilikinya. Tahap berikutnya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penduduk miskin, serta menjamin bahwa kebutuhan hidup standar mereka dapat tercapai, yang di antaranya mencakup bagaimana menyediakan kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan pendapatan. Pada jalur ini, P4K memobilisasi petugas-petugas pendamping yang notabene adalah para Penyuluh Pertanian di tingkat lapangan, untuk bersama-sama masyarakat berusaha membantu keluarga-keluarga miskin menumbuhkan kesadaran, membangkitkan keinginan, dan memperkuat kepercayaan diri mereka bahwa mereka mampu mengatasi masalah kemiskinan yang mereka hadapi dengan kekuatan mereka sendiri.

Untuk proses pemberdayaan ini, P4K sampai saat ini telah memobilisasi sejumlah 4.097 penyuluh pertanian di 9.550 desa. Jumlah seluruh penyuluh pertanian di tingkat perdesaan saat ini mencapai 37.288 orang, sehingga sebenarnya masih tersedia potensi yang besar untuk memobilisasi mereka sebagai petugas pendamping dalam rangka penanggulangan kemiskinan, bila program seperti ini dikembangkan sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan

di era otonomi daerah . Ada beberapa tahap yang dilakukan petugas-petugas pendamping ini di lapangan. Pertama, mereka memilih lokasi (desa) yang memiliki potensi kemiskinan tinggi, antara lain dicirikan dari tingginya populasi penduduk miskin, infrastruktur desa yang masih lemah, terbatasnya akses kepada sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di luar. Kedua, memfasilitasi proses participatory rural appraisal (PRA) yang dilakukan oleh masyarakat untuk menemukan rumahtangga-rumahtangga miskin sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh masyarakat sendiri.

Ketiga, memfasilitasi dan memotivasi keluarga-keluarga miskin tersebut untuk mau mengatasi masalah secara bersama-sama dalam wadah kelompok kecil yang beranggotakan 5–16 orang (saat ini diperbesar menjadi 15-25 orang) yang didasarkan atas adanya afinitas di antara mereka. Keempat, memfasilitasi penguatan kapasitas kelompok, sehingga anggota kelompok mampu mengelola kelompoknya, membangun visi bersama, menumbuhkan kebiasaan menabung dan kemampuan pengelolaan ekonomi rumah tangga, memulai dan mengembangkan usaha mikro yang dapat meningkatkan pendapatan mereka, serta memperkuat jejaring antar kelompok ataupun lembaga keuangan mikro yang dimiliki dan dikelola oleh mereka sendiri. Penumbuhan dan pengembangan kelompok-kelompok swadaya telah terbukti merupakan instrumen yang efektif bagi penduduk miskin untuk mampu keluar dari kemiskinan.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa dukungan kepada kelompok swadaya menyediakan kesempatan bagi penduduk miskin untuk membangun kepercayaan dirinya.

Demikian pula, dinamika kelompok-kelompok seperti itu dapat memperkuat proses pembelajaran dan menyediakan sarana untuk berbagi pengalaman.

2. Jalur pelayanan keuangan mikro.

Pada jalur yang lain, P4K juga berusaha mendekatkan kesempatan yang selama ini sulit dijangkau oleh keluarga-keluarga miskin di perdesaan, khususnya dalam bidang pelayanan keuangan mikro yang diperlukan oleh penduduk miskin. Pelayanan keuangan mikro diperlukan untuk membantu kelompok swadaya memobilisasi tabungan dan akses kredit untuk menambah pembiayaan usaha kelompok yang mendukung usaha keluarga dan usaha mikro mereka. Mendorong mobilisasi tabungan, kendatipun berjangka pendek, telah terbukti amat efektif di

dalam membantu penduduk miskin mengakumulasi modal kerja mereka, di mana hal itu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemandirian mereka.

Bekerjasama dengan BRI, dikembangkan suatu skema kredit mikro dengan kemudahan khusus (tanpa agunan), dengan tingkat suku bunga mendekati suku bunga pasar, yaitu 22,15% per tahun (1% flat per bulan). Pada sisi ini BRI bertindak sebagai bank pelaksana (executing bank), dimana keputusan apakah suatu usulan pengajuan kredit disetujui atau ditolak sepenuhnya merupakan kewenangan bank. Putusan pencairan pinjaman dikeluarkan setelah melalui beberapa tahapan. Begitu aplikasi kredit diajukan ke BRI, dalam bentuk RUA/RUB, pihak bank meneliti kelengkapan administratifnya, kemudian petugas account officer-nya melakukan pemeriksaan on the spot di lapangan, meliputi eksistensi dan kesehatan kelompok, usaha mikro yang dikelola setiap anggotanya, dan kelayakan pengembangan usaha yang diusulkan.

Skema kredit yang disediakan dirancang sebagai skema kredit yang berdimensi edukasi dengan tahapan kredit sebagai berikut: (i) tahap pertama maksimum sejumlah Rp 500.000 per anggota kelompok; (ii) tahap kedua maksimum sejumlah Rp 1.000.000 per anggota kelompok; (iii) tahap ketiga maksimum sejumlah Rp 1.500.000 per anggota kelompok; dan (iv) tahap keempat maksimum sejumlah Rp 2.000.000 per anggota kelompok.

Dengan pola seperti ini, maka implikasi dari disetujuinya suatu pengajuan pinjaman/kredit, misalnya kemungkinan kredit macet dan tunggakan meninggi, menjadi tanggung jawab pihak bank untuk mengatasinya. Pilihan ini ditempuh untuk membiasakan para petani-nelayan kecil berada pada kondisi normal, sehingga setelah proses fasilitasi selesai (program withdrawl), mereka dapat akses secara mandiri ke dalam mainstream ekonomi secara normal. Melalui pendekatan dua jalur yang tak terpisahkan ini, P4K senyatanya berusaha untuk mengembangkan suatu sistem dan mekanisme penanggulangan kemiskinan yang menjamin bila kesempatan berusaha datang kepada keluarga-keluarga miskin di perdesaan, maka mereka mampu meraihnya dan mengelolanya guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup mereka.

Kebutuhan Kerjasama Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan keuangan mikro kepada kelompok, kebutuhan kerjasama diperlukan terutama dalam aspek :

1. Layanan financial dari Bank untuk pengembangan usaha anggota kelompok, motivasi kelompok, gabungan kelompok dan koperasi.
2. Dukungan layanan status hukum kelembagaan dari organisasi para petani/nelayan kecil sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya.
3. Tehnologi tepat guna.
4. Informasi pemasaran/perizinan dan akses pasar dalam berbagai skala.

Pembelajaran Pengalaman P4K Dalam Pelayanan Keuangan Mikro

1. Kredit sebagai instrumen pemberdayaan perlu dipahami sebagai suatu Sarana Pembelajaran bagi kelompok dalam pengembangan usahanya. Oleh karena itu perkembangan pemberian kredit pada kelompok harus mengacu kepada pola pengembangan kapasitas kelompok secara utuh. Kelompok harus mampu terlebih dahulu membuktikan bahwa mereka memiliki kapasitas untuk mengelola kredit, sebagai modal usaha.
2. Pendekatan kelompok merupakan salah satu instrumen yang efektif dalam membangun kepercayaan, dengan bergabung dalam kelompok mereka memiliki kemampuan mengelola kredit, tidak hanya sekedar menerima penyaluran kredit.

2. Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT)

Program Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) adalah suatu program pembangunan yang dirancang secara khusus dengan tujuan menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merangsang perkembangan sosial ekonomi masyarakat di kawasan-kawasan yang relatif tertinggal. Kawasan-kawasan tersebut pada umumnya masih belum tersentuh oleh program-program pembangunan yang ada, antara lain karena keterpencilan lokasi dan keterbatasan sumber daya.

Penanggulangan kemiskinan melalui program PKT pada dasarnya mencakup tiga aspek penting yang bersifat multisektoral yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia,

pengembangan wilayah dan perbaikan mutu lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan dan memperoleh hasil yang efektif, digunakan pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu, sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat yang besar dan berkesinambungan terhadap usaha masyarakat dan perbaikan lingkungan tempat tinggal mereka.

Pengelolaan program diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah yang bersangkutan mengikuti pedoman umum agar tepat sasaran, tepat guna dan dapat secara langsung meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Program PKT telah dimulai sejak awal Repelita V, pada tiga tahun pertama (tahun 1989-1991) telah dialokasikan dana sebesar Rp 103,10 miliar untuk menangani masalah kemiskinan di 365 kawasan/kecamatan di 264 kabupaten/kotamadya di 27 propinsi. Pada tahun anggaran 1992/93 telah dialokasikan dana sebesar Rp 152,45 miliar untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan dan keterbelakangan di 494 kawasan/kecamatan di 248 kabupaten/kotamadya di 27 propinsi. Di samping itu juga untuk menangani permukiman kembali penduduk dari kota Dili ke desa-desa asal di 11 kabupaten lainnya di Timor Timur.

Sampai tahun keempat Repelita V telah dapat ditangani 850 kawasan/kecamatan yang mencakup tidak kurang dari 4.100 desa, dan telah memberikan manfaat langsung kepada 210.000 KK serta secara tidak langsung kepada 140.000 KK penduduk di wilayah sekitarnya.

Dari hasil pemantauan program PKT diperoleh indikasi awal bahwa program ini pada umumnya telah menunjukkan hasil-hasil yang diharapkan, antara lain: lebih terbukanya daerah-daerah yang semula terisolasi/terpencil, meningkatnya kemampuan usaha ekonomi masyarakat, dan terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar sosial masyarakat serta terbangunnya prasarana dan sarana penunjang sosial ekonomi lainnya. Secara keseluruhan hasil-hasil tersebut dapat menjadi modal dasar bagi masyarakat kelompok sasaran mengembangkan dirinya sendiri serta membantu perkembangan masyarakat di sekitarnya.

Keberhasilan tersebut dicapai karena sejak awal masyarakat diikutsertakan dalam proses pelaksanaan program PKT, baik masyarakat kelompok sasaran, LSM, LKMD, PKK, KPD ataupun organisasi masyarakat desa lainnya. Cara demikian terbukti dapat memperbesar tingkat

partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan tidak hanya pada masa pelaksanaan tetapi juga pada masa pasca proyek.

Diterapkannya sistem keterkaitan bantuan dari satu kelompok masyarakat dengan yang lainnya, adanya pengelolaan dan pengembangan terhadap hasil-hasil bantuan, lebih terorganisasikannya kegiatan usaha produksi, pengolahan, pemasaran dan penggalangan modal masyarakat merupakan dampak langsung yang diharapkan dari pelaksanaan program PKT. Pembinaan masyarakat dan pengembangannya masih perlu terus dilanjutkan oleh pemerintah.

Kesiapan masyarakat dan tingkat keterbukaan desa yang telah dicapai oleh program PKT akan mempermudah pemerintah daerah dan sektor-sektor terkait untuk menindaklanjuti. Dampak penting lainnya yang terlihat dari program PKT adalah adanya peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat pemerintah daerah dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan mengelola program dan kegiatan pembangunan, sehingga pemerintah daerah mempunyai kesiapan dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan daerah pada umumnya dan menanggulangi kemiskinan pada khususnya di masa-masa mendatang.

3. Inpres Desa Tertinggal (IDT)

Program IDT dimaksudkan untuk meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di desa-desa tertinggal. Melalui program IDT akan dipadukan berbagai program sektoral maupun regional yang mencakup desa-desa tersebut sehingga secara efektif akan berdampak besar terhadap upaya penanggulangan kemiskinan.

Setelah hampir dua tahun pelaksanaan program IDT yang dirasakan membawa beberapa keberhasilan, maka pemerintah memperluas cakupan dari sasaran penduduk miskin yang berada di luar desa tertinggal. Melalui Kantor Menteri Kependudukan kemudian dilancarkan program Takesra dan Kukesra yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan, terutama bagi penduduk yang berada di desa non IDT yang masih belum sejahtera (pra sejahtera). Program Takesra dan Kukesra ini pada dasarnya adalah dimaksudkan sebagai pelengkap program IDT dan sebagai bagian dari upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan, secara keseluruhan dari tujuan pembangunan nasional.

Program IDT adalah program untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan penduduk miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka kesempatan berusaha. Dalam rangka itu, program IDT diarahkan pada pengembangan kegiatan sosial ekonomi untuk mewujudkan kemandirian penduduk miskin di desa/kelurahan tertinggal dengan menerapkan prinsip gotong royong, keswadayaan dan partisipasi. Kegiatan sosial ekonomi yang dikembangkan adalah kegiatan produksi dan pemasaran, terutama yang sumberdayanya tersedia di lingkungan masyarakat setempat. Guna mempercepat upaya itu disediakan dana sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk membangun dan mengembangkan kemampuan dirinya. Dengan ketersediaan modal, penduduk miskin diharapkan akan lebih mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya secara mandiri.

Program IDT merupakan kebijaksanaan terpadu untuk meningkatkan potensi dan dinamika ekonomi masyarakat lapisan bawah. Penguatan ekonomi rakyat yang merupakan bagian terbesar dari penduduk diharapkan dapat menghasilkan landasan yang lebih kukuh bagi pembangunan nasional karena meningkatkan daya beli masyarakat secara menyeluruh. Dalam kerangka ini, program IDT secara umum bertujuan memantapkan segi kelembagaan sosial ekonomi penduduk miskin sebagai wadah penyaluran aspirasi mereka dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui usaha produktif yang berkelanjutan.

Pemanfaatan dana program IDT pada dasarnya diserahkan kepada penduduk miskin itu sendiri karena merekalah yang paling mengetahui usaha yang dapat mereka lakukan dan kebutuhan yang paling mendesak, dengan bimbingan dan pendampingan. Tata cara penyaluran yang menjadi sasaran program dapat dengan mudah memahami dan menggunakannya.

Program IDT diarahkan untuk mempercepat upaya mengurangi jumlah penduduk miskin dan jumlah desa atau kelurahan tertinggal. Selain itu, program IDT dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan memadukan berbagai program pembangunan yang sudah ada dalam kerangka penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Pada tingkat kelompok sasaran, program IDT bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, mendorong perubahan struktur masyarakat, dan membangun kemampuan masyarakat melalui pengembangan, peningkatan dan pemantapan kondisi sosial ekonomi.

Hakekat Program IDT

Dengan hakikat ini maka dalam program IDT terkandung tiga pengertian dasar. Pertama, sebagai pemicu dan pemacu gerakan nasional penanggulangan kemiskinan melalui kepedulian diantara yang telah maju dan kuat untuk saling membantu yang miskin dan tertinggal. Kedua, merupakan strategi pemerataan dan penajaman program pembangunan yang ditujukan kepada penduduk miskin di desa tertinggal. Penajaman program ini tertuang dalam pengalihan program yang semula dipusatkan, secara bertahap dan terprogram dialihkan dan ditujukan langsung kepada masyarakat yang paling memerlukan. Ketiga, sebagai upaya meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat dalam perubahan struktur yang tumbuh dari kemampuan masyarakat sendiri.

Sebagai suatu strategi pembangunan terkandung adanya moral pembangunan bahwa pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, adanya pemihakan kepada penduduk miskin di desa tertinggal, serta terselenggaranya koordinasi program pembangunan prasarana dan sarana yang diarahkan untuk membuka keterisolasian, dan meningkatkan peran serta dan produktivitas rakyat dalam kegiatan sosial ekonomi. Kesimpulannya, program IDT adalah upaya pembangunan moral melalui peningkatan kesadaran, kemauan, tanggung jawab, rasa kebersamaan, harga diri dan percaya diri masyarakat. Pada akhirnya, aparat pemerintah dituntut untuk semakin terbuka, peka, peduli dan tanggap terhadap permasalahan pembangunan sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan hati nurani rakyat.

Komponen Program IDT

Untuk melaksanakan program IDT terdapat tiga komponen, yaitu 1) penyediaan dana bergulir sebagai modal usaha ekonomi produktif, 2) penyediaan tenaga pendamping, dan 3) pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal. Ketiga komponen tersebut sedapat mungkin dapat menjangkau dan langsung dilaksanakan oleh penduduk miskin di desa yang memerlukan.

Disamping ketiga kegiatan di atas, dalam rangka memperkuat perencanaan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan selanjutnya juga dilaksanakan komponen kegiatan penguatan kelembagaan, yang akan dilaksanakan bagi Aparat Daerah dan Pusat, kegiatan Bantuan Pengembangan Kecamatan yang saat ini sedang dalam tahap penyiapan; dan kegiatan Sistem Pengelolaan Informasi program IDT, sebagai kegiatan pendukung dan penunjang

program penanggulangan kemiskinan berupa kegiatan evaluasi, pemantauan dan publikasi program IDT.

4. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan program Pemerintah Indonesia, yang diimplementasikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Dinas Pembangunan Masyarakat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, memperkuat pemerintah lokal dan institusi masyarakat, serta meningkatkan tata pemerintahan lokal. PPK mulai dijalankan pada tahun 1998, yaitu pada saat gejolak politik dan krisis financial terjadi.

Program ini didanai melalui alokasi anggaran pemerintah, hibah donor, dan pinjaman dari Bank Dunia. Bank Dunia menyediakan hibah sebanyak kurang lebih Rp 500 juta sampai 1,5 milyar (US\$ 50,000 hingga US\$ 150,000) untuk kecamatan, tergantung pada ukuran populasi suatu kecamatan. Penduduk desa terlibat dalam perencanaan partisipatif dan proses pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya bagi kebutuhan pembangunan dan prioritas pembangunan desa mereka. PPK focus pada masyarakat desa termiskin di Indonesia. Pada Agustus 2006, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sebuah program pembangunan masyarakat nasional yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan.

PNPM akan memberikan kerangka tunggal untuk semua program pembangunan berbasis masyarakat di Indonesia, dan PNPM akan secara bertahap mengkonsolidasikan program yang saling tumpang tindih di beberapa sektor yang berbeda. PNPM akan menciptakan rancangan kesatuan untuk penghantaran program, menargetkan penduduk nasional termiskin dengan lebih akurat, memindahkan dana secara langsung ke desa, dan meningkatkan alokasi dana hibah. PPK bersama dengan proyek sejenis, Proyek Kemiskinan Urban (UPP), merupakan dasar dari program pembangunan nasional berbasis masyarakat yang sudah memiliki kesuksesan selama bertahun-tahun.

Program sektoral terkait dengan proyek ini, program sektoral ini memberikan input khusus untuk memperbaiki jasa yang dihasilkan kepada masyarakat miskin. Pemerintah daerah juga diharapkan untuk mengintegrasikan pendidikan, kesehatan dan pertanian di dalam program PNPM.

5. Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT)

program P3DT merupakan program yang strategis sebagai program pendukung pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan yang berasal dari eksternal.

Dana P3DT merupakan dana hibah dari pemerintah kepada masyarakat desa tertinggal untuk memenuhi kebutuhan prasarana desa sesuai keputusan yang diambil oleh masyarakat namun tidak mengurangi ketentuan kualitas fisik agar fungsi prasarana bertahan lama untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan.

Filosofi bantuan P3DT adalah memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk kompetisi dalam usulan – usulan terbaik dari semua usulan yang di ajukan, demokrasi dengan memberikan kesempatan banyak desa berkompetisi dengan usulan dari bawah, transparansi dengan penilaian dan keputusan dilakukan dan dilaporkan secara terbuka.

Ciri khas P3DT adalah :

- a) desa diberi dana bantuan hibah untuk membangun prasarana yang sesuai kebutuhan masyarakat.
- b) Dana bantuan di salurkan melalui rekening LKMD.
- c) Administrasi dan pengelolaan dana bantuan dilakukan oleh desa sendiri.
- d) Di setiap desa di tempatkan seorang konsultan untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan.
- e) Aparat pemerintah daerah hanya berperan sebagai fasilitator dan pembina.

Tujuan umum P3DT adalah merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi yang di butuhkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan di perdesaan.

Sedang tujuan khusus dari program P3DT adalah :

- a) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan prasarana yang berkelanjutan dengan indikator meningkatnya kemampuan aparat desa dalam pembuatan usulan, pelaksanaan dan pelestarian program.
- b) Menyediakan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- c) meningkatkan kemampuan peran kelembagaan dan peran masyarakat dalam pembangunan.
- d) menciptakan lapangan kerja.
- e) memprkuat kemampuan aparat memfasilitasi masyarakat dalam pembangunan.

Prinsip dasar Peogram P3DT adalah :

- a) P3DT mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan LKMD
- b) mengutamakan partisipasi semua lapisan masyarakat terutama kelompok miskin, pemuda dan wanita.
- c) menggunakan prinsip keterbukaan semua informasi.
- d) mengutamakan kualitas konstruksi
- e) pengalihan teknologi dan ketrampilan.

6. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

P2KP adalah singkatan dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. P2KP merupakan salah satu proyek nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi berbagai persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan (urban). Pemerintah Indonesia selanjutnya menugaskan Direktorat Jendral Perumahan dan Permukiman – Departemen Kimpraswil sebagai pelaksana proyek (executing agency) dari P2KP. P2KP sebagai suatu “proyek” merupakan suatu upaya pemerintah yang bermuara pada “program” penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui strategi pemberdayaan (empowerment) sebagai investasi modal sosial (social capital) menuju pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Artinya

“proyek” yang diprakarsai pemerintah ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadi “program” penanggulangan kemiskinan yang tumbuh atas inisiatif dan prakarsa masyarakat sendiri, dan didukung oleh pemerintahnya maupun kelompok – kelompok peduli, organisasi - organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha yang ada.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang didukung oleh Bank Dunia dalam kegiatannya memberikan peluang besar pada peran serta masyarakat, dari tingkat pengambilan keputusan dan pelaksanaan, mempunyai sasaran lebih nyata untuk mengentaskan penduduk miskin di perkotaan. Program ini merupakan penajaman dari program penanganan masalah perkotaan sebelumnya yang ada. Penajaman dan dukungannya proyek ini terutama untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin kota dan memperkuat lembaga institusi lokal yang ada. Maksud penanggulangan adalah untuk mencegah penambahan dan mengurangi jumlah penduduk miskin di perkotaan. Kegiatan utama proyek adalah membiayai usaha – usaha yang memberikan manfaat kepada masyarakat miskin kota di kelurahan yang telah ditetapkan.

Biaya – biaya yang dikeluarkan Proyek berupa pinjaman modal kerja bergulir kepada perorangan atau keluarga miskin sebagai modal bagi peningkatan pendapatan yang berkelanjutan.

Tujuan P2KP adalah membiayai kegiatan – kegiatan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat miskin di kelurahan sasaran, melalui :

1. Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru.
2. Penyediaan dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menunjang butir 1 di atas.
3. Peningkatan kemampuan perorangan dalam keluarga miskin melalui upaya bersama berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan usaha – usaha baru yang bersifat produktif dengan berbasis pada usaha kelompok.
4. Penyiapan, pengembangan dan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.

5. Pencegahan menurunnya kualitas lingkungan melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan.

Kelompok sasaran masyarakat yang ingin disentuh melalui P2KP, yaitu :

1. Masyarakat kelurahan, yaitu seluruh masyarakat kelurahan dengan penerima manfaat langsung adalah keluarga miskin (sesuai dengan rumusan kriteria kemiskinan setempat yang disepakati warga).

2. Pemerintah daerah, yaitu perangkat pemerintahan dari tingkat kota/kabupaten, kecamatan hingga kelurahan.

3. Para pihak terkait lainnya, yaitu seluruh pihak terkait di luar kelompok masyarakat kelurahan sasaran dan aparat pemerintahan daerah seperti : Perbankan, LSM, Perguruan Tinggi setempat, Lembaga – lembaga keuangan (misalnya : BRI) dll.

P2KP dilaksanakan melalui strategi – strategi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan konsep Tridaya (pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan lingkungan).

2. Pemberian dana hibah untuk pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan, serta pinjaman dana bergulir untuk modal kerja kegiatan produktif.

3. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat membuka peluang usaha baru.

4. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat agar inisiatif mereka dapat ditumbuhkan dan diwujudkan.

5. Pendampingan pada KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).

Prinsip – prinsip yang dijunjung tinggi, ditumbuh – kembangkan dan dilestarikan dalam pelaksanaan P2KP adalah :

1) Demokrasi,

2) Partisipasi,

3) Transparansi,

4) Akuntabilitas,

5) Desentralisasi

E. PNPM MANDIRI PERDESAAN

Negara Republik Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan.

Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Secara sederhana kemiskinan dapat dipahami sebagai tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar kendati masyarakat telah bekerja. Sumber pendapatan masyarakat pada dasarnya diperoleh melalui :

a. Hasil dari berusaha seperti berwiraswasta, pendapatan dari penjualan tenaga, jasa kemampuan atau keahlian yang sesuai dengan permintaan pasar.

- b. Hasil eksploitasi aset seperti pemilik saham memperoleh deviden, sawah atau tanah, hutan yang dapat digarap, gedung yang dapat disewakan, dan sebagainya.
- c. Hasil dari subsidi baik yang diterima anggota masyarakat secara langsung maupun yang secara tidak langsung melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi umum seperti sarana jalan umum, jaringan irigasi dan sebagainya.

Mengingat sumber – sumber pendapatan seperti gambaran di atas maka sangatlah wajar bila upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan berkisar pada upaya peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan usaha dan kesempatan kerja atau upaya peningkatan produksi dan pemberian subsidi.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat pedesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu : a) Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (capacity building), dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen/Kementrian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), apatisipasi dari CSR (Corporante Social Responcibility) dan dari dana hibah serta pinjaman dari sejumlah lembaga dan negara pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

3. Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan

Visi PNPM mandiri perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya diluar lingkungan, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sedangkan Misi PNPM mandiri perdesaan adalah :

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan
2. Kelembagaan system pembangunan partisipatif
3. Pengektifan dan peran pemerintah local
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana social dasar dan ekonomi masyarakat.
5. Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dari visi dan visi yang telah disebutkan maka PNPM mandiri Perdesaan berupaya menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih yaitu menuntaskan tahapan pelembagaan system pembangunan partisipatif, setelah tahapan inisiasi dan internalisasi telah seslesai dilakukan oleh PPK.

4. Tujuan

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatkannya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Sedangkan tujuan khusus dari program ini ialah :

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya local.

3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan local dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
4. Menyediakan prasarana sarana social dasar dan ekonmi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan kerja sama antar desa dalam pengeloaan pembangunan masyarakat.
7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan.

5. Prinsip dasar PNPM Mandiri Perdesaan.

Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi:

- b. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata.
- c. Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar
- d. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat
- e. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin
- f. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materill
- g. Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap

tahap program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik

h. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat

i. Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif

j. Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan

k. Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya

6. Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan.

Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian. Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan secara lebih terarah. Ketentuan dasar meliputi :

a. Desa berpartisipasi.

Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Namun, untuk kecamatan -kecamatan yang pemilihan maupun penentuan besarnya BLM didasarkan pada adanya desa tertinggal, maka kegiatan yang diusulkan oleh desa-desa tertinggal akan mendapat prioritas didanai. Besarnya pendanaan kegiatan dari desa tertinggal tergantung pada besar/volume kegiatan yang diusulkan. Pembagian dana BLM secara otomatis kepada desa-desa tertinggal samasekali tidak diinginkan, karena setiap usulan kegiatan harus dinilai kelayakannya secara teknis maupun manfaat sosial ekonominya.

Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan program, bagi kecamatan yang memiliki jumlah desa lebih dari 20 disarankan untuk menggabungkan desa-desa tersebut menjadi sekurang-kurangnya 10 satuan desa cluster. Penggabungan tersebut didasarkan atas kesepakatan desa-desa dengan mempertimbangkan kedekatan wilayah. Proses pembentukan desa cluster dilakukan dalam MAD Sosialisasi.

b. Kriteria dan jenis kegiatan

Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria:

1. lebih bermanfaat bagi RTM, baik di lokasi desa tertinggal maupun bukan desa tertinggal
2. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
3. dapat dikerjakan oleh masyarakat
4. didukung oleh sumber daya yang ada
5. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM.
- b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan non formal)
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal)
- d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP)

7. Mekanisme Usulan Kegiatan

Setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai dengan BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/ satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan.

Tiga usulan dimaksud adalah:

- a. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan kapasitas/ ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan
- b. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM kecamatan. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok
- c. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan.

Jika usulan non-SPP dari musyawarah khusus perempuan sama dengan usulan musyawarah desa campuran, maka kaum perempuan dapat mengajukan usulan pengganti, sehingga jumlah usulan kegiatan dari musyawarah desa perencanaan tetap tiga. Maksimal nilai satu usulan kegiatan yang dapat didanai BLM PNPM Perdesaan adalah sebesar Rp 350 juta. Usulan kegiatan pendidikan atau kesehatan harus mempertimbangkan rencana induk dari instansi pendidikan atau kesehatan di kabupaten.

8. Swadaya Masyarakat

Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan.

Dasar keswadayaan adalah kerelaan masyarakat, sehingga harus dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan. Upah hari orang kerja (HOK) bagi tenaga kerja RTM, baik laki-laki maupun perempuan, tidak boleh dipotong atau diminta sebagai bentuk kontribusi swadaya

masyarakat, karena upah HOK ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini sesuai dengan tujuan PNPM Mandiri.

9. Kesetaraan dan Keadilan gender

Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan pemihakan kepada perempuan. Pemihakan memberi makna berupa upaya pemberian kesempatan bagi perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, ekonomi, dan politik serta mengakses aset produktif.

Sebagai salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan, PNPM Mandiri Perdesaan mengharuskan adanya keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan dan pelaku pada semua tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai.

10. Jenis kegiatan yang dilarang (Negative List)

Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik
- b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah
- c. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan lain-lain)
- d. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya,
- e. Pembiayaan gaji pegawai negeri
- f. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja
- g. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau
- h. Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut
- i. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan penggunaan terumbu karang
- j. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain

- k. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai
- l. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 Hektar (Ha)
- m. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha
- n. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik

11. Sanksi

Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Sanksi dapat berupa :

- a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan,
- b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
- c. Sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM Mandiri Perdesaan dengan baik, seperti: menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan dimasukkan sebagai kecamatan bermasalah sehingga dapat ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung, serta tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya.

12. Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Lembaga dan Pemerintahan lokal

Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga dan pemerintahan lokal menuju kemandirian, maka:

- a. Di setiap desa dipilih, ditetapkan, dan dikembangkan: Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K dengan kualifikasi teknik dan pemberdayaan), Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Pemantau, dan Tim Pemelihara

- b. Di di kecamatan dibentuk dan dikembangkan : Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD), Tim Verifikasi, UPK, Badan Pengawas UPK (BP-UPK) dan Pendamping Lokal (PL)
- c. Diadakan pelatihan kepada pemerintahan desa meliputi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau bentuk kegiatan lain yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Pelatihan yang akan diadakan di antaranya meliputi: penyusunan peraturan desa, pengawasan terhadap pelaksanaan, pemerintahan, dan pembangunan, pengelolaan penanganan masalah dan perencanaan kegiatan pembangunan yang partisipatif
- d. Dilakukan kategorisasi tingkat perkembangan kelembagaan hasil PPK di desa dan kecamatan. Kategorisasi meliputi tahapan pembentukan dan tahapan pengakaran. Tahap pembentukan untuk mengetahui hubungan antara dinamika kolektivitas dan strategi pendampingan, sedangkan tahap pengakaran untuk mengetahui dinamika kolektivitas dan statuta
- e. Dilakukan penataan dan pengembangan Kelembagaan Desa serta Antar Desa

Organisasi kerja yang dibangun melalui PPK, pada awalnya adalah lembaga-lembaga di desa dan antar desa yang dibentuk untuk kebutuhan fungsional program. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, organisasi kerja tersebut diharapkan mampu mengelola secara mandiri atas hasil-hasil program, baik yang telah dikerjakan melalui PPK maupun yang akan dikerjakan melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk mencapai kemampuan ini perlu dilakukan kebijakan penataan kelembagaan. Kebijakan penataan menyesuaikan perkembangan yang terjadi di lapangan dan kebijakan serta peraturan perundangan yang ada.

Penataan sebagaimana di atas memadukan aspek statuta dan payung hukum. Statuta menuntaskan status hak milik, keterwakilan dalam delegasi, serta batas kewenangan.

13. Pendampingan masyarakat dan Pemerintahan lokal

Masyarakat dan pemerintahan lokal dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan mendapatkan pendampingan dari fasilitator. Peran pendampingan ditujukan bagi penguatan atau peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal dalam mengelola pembangunan secara mandiri di wilayahnya. Fasilitator yang akan mendampingi masyarakat dan pemerintahan lokal adalah sebagai berikut:

- a. Di setiap kecamatan disediakan Fasilitator Kecamatan (F-Kec) dan Fasilitator Teknik Kecamatan (FT-Kec)

- b. Di setiap kabupaten disediakan Fasilitator Kabupaten (F-Kab), dan Fasilitator Teknik Kabupaten (FT-Kab)
- c. Berdasarkan pertimbangan TK Kab PNPM Mandiri, salah seorang dari Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Teknik Kabupaten ditetapkan sebagai Koordinator Fasilitator Kabupaten (KF-Kab) oleh Satker Provinsi PNPM Mandiri Perdesaan
- d. Di wilayah regional (beberapa kabupaten) disediakan Pendamping UPK



Bab III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian, langkah-langkah yang akan diambil bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta memperoleh informasi yang lengkap. Maka terlebih dahulu harus dipahami dasar-dasar yang menjadi tumpuan berpikir dalam menggunakan metode ilmiah, khususnya dalam rangka sistem etika penelitian. Dengan kata lain sebelumnya peneliti harus dapat memahami dasar pemikiran terhadap masalah yang akan diselidiki serta untuk memberikan gambaran dari masalah yang akan diteliti.

Memperhatikan tujuan penelitian yang terkait dengan topik yang sedang diteliti, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan tujuan agar peneliti bisa menggambarkan fenomena dan fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Program Nasional Pebedayaan Masyarakat Perdesaan (PNPMP) yang dilaksanakan di desa Bendungan kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung.

“Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisis kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan-lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Pada penulis laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya”. (Lexy J Moleong, 1995: 6)

Bogdan & Taylor dalam Moleong (2001: 3), mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penggunaan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini dipandang lebih mendukung dan memberi arti dalam menyerap permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selain itu, pengumpulan data dilakukan melalui dokumen-dokumen maupun wawancara dalam memahami realitas. Dokumen diteliti baik secara tekstual maupun kontekstual. Hal ini dikarenakan semua data yang berkaitan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPMP) yang diambil, dilakukan berdasarkan keadaan atau data murni di lapangan.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2001: 297), fokus penelitian adalah penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian pada suatu penelitian. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

a. Perencanaan

- 1) Sosialisasi
- 2) Penggalan gagasan
- 3) Musyawarah perencanaan
- 4) Verifikasi usulan
- 5) Musyawarah Antar Desa prioritas usulan
- 6) Musyawarah desa Informasi Hasil Musyawarah Antar Desa

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Alur Pencairan Dana PNPM Mandiri Perdesaan
- 2) Pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan
- 3) Pengadaan Tenaga Kerja
- 4) Pengadaan Bahan dan Alat
- 5) Rapat Evaluasi TPK

c. Tahap/proses pelestarian

2. Hambatan-hambatan yang Ada dalam Pelaksanaan PNPM MP

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah di desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungganung Propinsi Jawa Timur. Penetapan lokasi penelitian ini didasari oleh pertimbangan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan substansi penelitian
2. Mampu memberi entry berupa proses, program, struktur, interaksi dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan deskriptif yang mendalam
3. Dapat menerima kehadiran peneliti dalam waktu yang cukup lama.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana seharusnya peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Adapun yang menjadi situs dalam penelitian ini meliputi:

1. Kantor desa Bendungan Kecamatan Gondang (kepala desa)
2. Warga penerima program PNPM mandiri perdesaan
3. TPK,FK,dan KPMD, UPK,

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam sumber data ini peneliti memanfaatkan orang-orang yang tahu persis dan mengetahui bidang ini (*key person*). Adapun data yang dikumpulkan akan dilakukan secara resmi maupun tidak resmi yaitu dengan mendatangi sumber data.

Berdasarkan jenis datanya, data dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Data primer, menurut M. Sitorus (2003:24), yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama dari mana data tersebut diperoleh.

Adapun sumber data primer dalam kegiatan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Kepala Desa Bendungan
- b. Tim TPK, UPK dan Kader Pemberdayaan
- c. Warga sekitar yang terkena Program PNPM MP

2. Data sekunder, ialah data yang diperoleh bukan dari sumber asli atau pertama (M.sitorus, 2003:24). Maksudnya yakni data atau informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. untuk data sekunder ini bisa diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi, laporan, majalah, surat kabar dan naskah hasil penelitian serta materi lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah atau mencapai tujuan penelitian.

Sedangkan yang digunakan sebagai alat/instrumen dalam penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian yaitu peneliti sendiri yang telah dibantu dengan menggunakan alat-alat pedoman wawancara serta sarana dokumentasi, tempat dan peristiwa. Instrumen tersebut disusun berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya

F. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan maka digunakan beberapa macam teknik pengumpulan yaitu :

1. Observasi, pengamatan, pencatatan secara sistematis fenomena, kondisi serta situasi yang akan diteliti. Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung dan mencatat hal-hal yang diperlukan dan berkaitan dengan fokus penelitian. Observasi dilakukan terhadap proses jalannya pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) di Kecamatan Gondang.
2. Wawancara, yaitu dengan melakukan dialog secara langsung atau tanya jawab dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan kebutuhan peneliti. teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data primer tentang pelaksanaan asas Diskresi dan tingkat pelayanan pada Dinas Perizinan. Wawancara dilakukan dengan :
 - a. Kepala Desa Bendungan
 - b. Pengurus PNPM MP desa Bendungan
 - c. Warga sekitar yang terkenan Program PNPM MP
3. Dokumentasi (dokumenter), merupakan cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisis data-data tertulis dalam dokumen-dokumen surat kabar catatan harian, dan media cetak lainnya yang mempunyai hubungan dengan tema penelitian.

D. Analisis Data

Analisa data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisa data dapat diberi arti, makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian itu sendiri. Analisis data menurut Patton dalam buku karangan Moleong yang berjudul “Metode penelitian kualitatif” (1994:103) adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar”.

Maka dari itu sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian yang dilakukan adalah deskriptif. Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan yang pada hakekatnya merupakan upaya mencari jawaban dari permasalahan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk memperoleh gambaran dan interpretasi yang menyeluruh tentang fenomena sosial yang dikaji, diperlukan proses interpretasi atas data yang ada.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi,

selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1992), yaitu :

1. Reduksi data

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahap ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penempilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

2. Penyajian data

Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

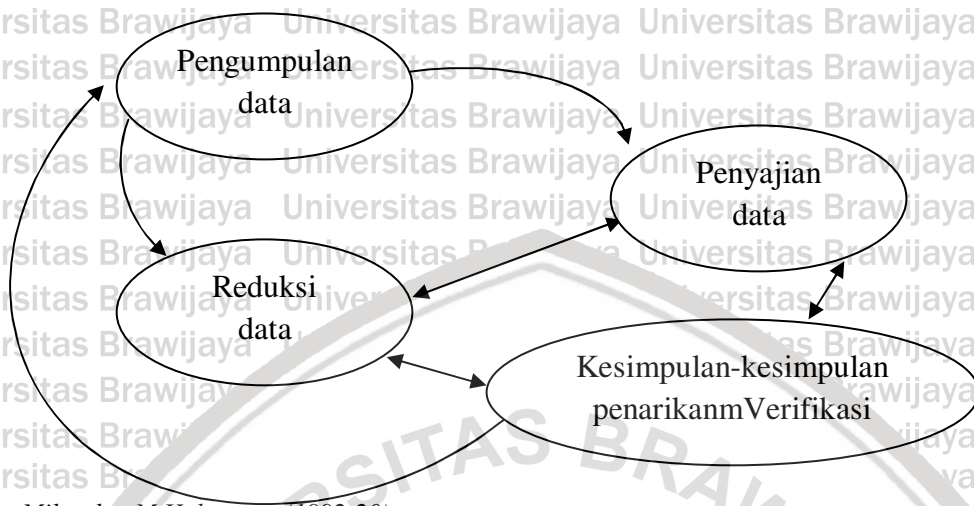
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, penjelasan-penjelasan serta alur sebab-akibat dan kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan.

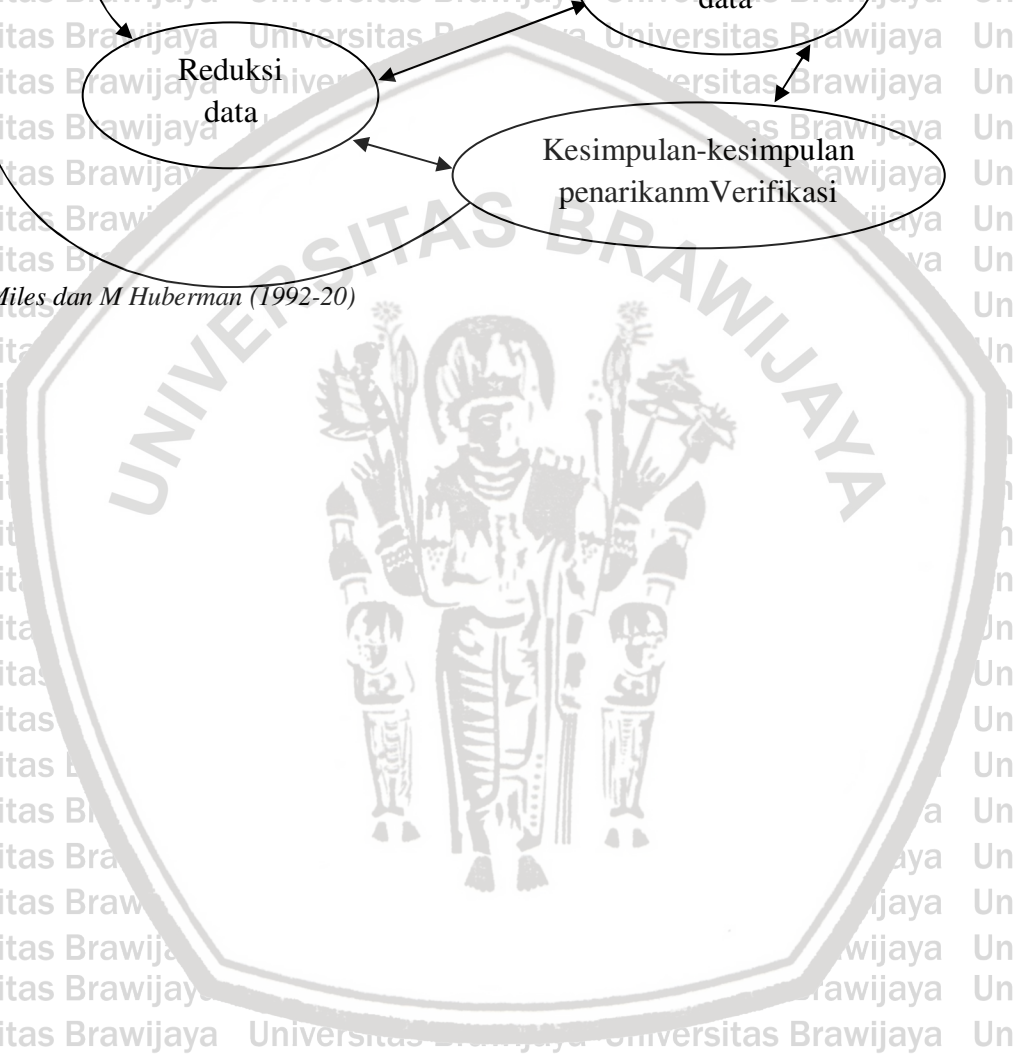
Teknik analisis data dalam penelitian ini sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam alur skema berikut :

Gambar 1

Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif



Sumber : Miles dan M Huberman (1992-20)



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Umum

1. Gambaran umum Kabupaten Tulungagung

a. Sejarah

Awalnya, Tulungagung hanya merupakan daerah kecil yang terletak di sekitar tempat yang saat ini merupakan pusat kota (alun-alun). Tempat tersebut dinamakan Tulungagung karena merupakan sumber air yang besar - dalam bahasa Kawi, *tulung* berarti mata air, dan *agung* berarti besar - Daerah yang lebih luas disebut Ngrowo. Nama Ngrowo masih dipakai sampai sekitar awal abad XX, ketika terjadi perpindahan pusat ibu kota dari Kalangbret ke Tulungagung.

Pada tahun 1205 M, masyarakat Thani Lawadan di selatan Tulungagung, mendapatkan penghargaan dari Raja Daha terakhir, Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada Raja Kertajaya ketika terjadi serangan musuh dari timur Daha. Penghargaan tersebut tercatat dalam Prasasti Lawadan dengan candra sengkala "Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa" yang menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya prasasti tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003.

Di Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, terdapat Candi Gayatri. Candi ini adalah tempat untuk mencandikan Gayatri (Sri Rajapatni), istri keempat Raja Majapahit yang pertama, Raden Wijaya (Kertarajasa Jayawardhana), dan merupakan ibu dari Ratu Majapahit ketiga, Sri Gitarja (Tribhuwanatunggadewi), sekaligus nenek dari Hayam Wuruk (Rajasanegara), raja yang memerintah Kerajaan Majapahit di masa keemasannya. Nama Boyolangu itu sendiri tercantum dalam Kitab Nagarakertagama yang menyebutkan nama Bayalangu/Bhayalango (*bhaya*= bahaya, *alang*= penghalang) sebagai tempat untuk menyucikan beliau. Berikut ini adalah kutipan Kitab Nagarakertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia:

Prajnyaparamitapuri itulah nama candi makam yang dibangun

Arca Sri Padukapatni diberkati oleh Sang Pendeta Jnyanawidi

Telah lanjut usia, paham akan tantra, menghimpun ilmu agama

Laksana titisan Empu Barada, menggembarakan hati Baginda

(Pupuh LXIX, Bait 1)

*Di Bayalangu akan dibangun pula candi makam Sri Rajapati
Pendeta Jnyanawidi lagi yang ditugaskan memberkati tanahnya*

Rencananya telah disetujui oleh sang menteri demung Boja

Wisesapura namanya, jika candi sudah sempurna dibangun

(Pupuh LXIX, Bait 2)

Makam rani: Kamal Padak, Segala, Simpang

Sri Ranggapura serta candi Budi Kunci

Bangunan baru Prajnyaparamitapuri

Di Bayalangu yang baru saja dibangun

(Pupuh LXXIV, Bait 1)

b. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada dasar filosofis yang dianut oleh masyarakat maka ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009-2013, sebagai berikut:

"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Dalam Suasana Kerukunan dan Kebersamaan Melalui Pembangunan DIHATIKU INGANDAYA"

Visi ini memiliki makna sebagai berikut:

1. Kesejahteraan masyarakat adalah merupakan tujuan akhir dari sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2. Kerukunan dan kebersamaan adalah merupakan sifat utama serta modal dasar masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai secara konsisten dan berkesinambungan;
3. Dihatiku Ingandaya adalah merupakan sebuah arah pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran terhadap potensi-potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Tulungagung.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Tulungagung, maka ditetapkan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009-2013, sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis dihatiku ingandaya dengan mendorong pertumbuhan investasi dan pemberdayaan potensi masyarakat;
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan sosial budaya melalui usaha pencapaian pembangunan manusia;
3. Meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan insan pembangunan yang beriman dan bertaqwa guna menjamin pencapaian masyarakat maju dan mandiri yang berkeadilan sosial;
5. Meningkatkan derajat kehidupan politik yang demokratis, yang didukung oleh terpeliharanya ketertiban, ketentraman di masyarakat serta tegaknya supremasi hukum.

c. Prinsip-Prinsip

Prinsip dan nilai merupakan koridor bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung yang akan menjadi penyelarasan gerakan pembangunan sekaligus menjadi pengikat persatuan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pembangunan. Prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Tulungagung, antara lain adalah:

1. Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik serta dalam setiap tahapan pembangunan secara bertanggungjawab.
2. Demokrasi, yaitu manajemen pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat yang dilandasi dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme.
3. Transparansi, yaitu ketersediaan berbagai informasi kebijakan publik dan pembangunan yang memadai bagi masyarakat.
4. Akuntabilitas, yaitu kemampuan mempertanggungjawabkan seluruh aktifitas dan kewenangan yang di dimiliki kepada masyarakat.

d. Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Tulungagung terletak antara koordinat ($111^{\circ}43'$ - $112^{\circ}07'$) Bujur Timur dan ($7^{\circ}51'$ - $8^{\circ}18'$) Lintang Selatan dengan titik nol derajat dihitung dari Greenwich Inggris. Dan terletak kurang lebih 154 km ke arah Barat Daya dari Kota Surabaya.

Luas wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan sebesar 1.150,41 Km² (115.050 Ha) atau sekitar 2,2% dari seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur.

Adapun batas-batas administrasi Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kediri, Nganjuk dan Blitar.

- Sebelah Timur : Kabupaten Blitar.

- Sebelah Selatan : Samudera Hindia/Indonesia.

- Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo.

e. Demografis

1. Jumlah Penduduk

Jumlah dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Tulungagung selama 5 Tahun (Tahun 2003-2007) yaitu Tahun 2003 sebanyak 984.730 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 0,68%; Tahun 2004 sebanyak 989.856 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 0,52%; Tahun 2005 sebanyak 996.962 jiwa dengan tingkat pertumbuhannya 0,72%; Tahun 2006 sebanyak 1.002.807 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 0,59%; dan Tahun 2007 sebanyak 1.020.217 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1,74%.

2. Sebaran Penduduk

Distribusi Penduduk di Kabupaten Tulungagung dapat diukur dengan angka kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan unit wilayah/luas wilayah. Kepadatan penduduk Kabupaten Tulungagung Tahun 2004 yaitu 875 jiwa/km² dan pada Tahun 2008 adalah 907 jiwa/km².

Berdasarkan klasifikasi angka kepadatan penduduk masing-masing kecamatan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008, bahwa kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Tulungagung sebesar 4.961 jiwa/km². Kepadatan terendah adalah Kecamatan Tanggunggunung sebesar 212 jiwa/km².

Berdasarkan klasifikasi angka kepadatan penduduk masing-masing desa/kelurahan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 menunjukkan bahwa kepadatan tertinggi adalah Kauman, Plandaan, Karangwaru, Bago, dan Kedungwaru. Sedangkan kepadatan terendah adalah Rejoagung, Gendingan, Tanjungsari.

3. Perubahan Penduduk

Perubahan penduduk di Kabupaten Tulungagung dipengaruhi oleh faktor: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan migrasi. Di Kabupaten Tulungagung angka kelahiran dan angka kematian yang tinggi telah lama diusahakan untuk diturunkan.

Program kesehatan masyarakat telah lama dilaksanakan melalui program peningkatan gizi penduduk, perpanjangan hidup anak, dan persebaran prasarana kesehatan seperti Puskesmas, Posyandu di desa-desa disertai dengan program perawat, bidan masuk desa, dan lain sebagainya yang dapat menurunkan angka kematian dengan cepat.

Di bidang kelahiran telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang mengkoordinasikan usaha-usaha untuk menurunkan angka kematian dan kini usaha tersebut telah berhasil dengan baik.

4. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik-karakteristik yang sama, seperti: komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, komposisi penduduk menurut jenis pekerjaan dan lain sebagainya.

Perkembangan jumlah di Kabupaten Tulungagung Tahun 2003-2007, komposisi penduduk dapat dikelompokkan menurut jenis kelamin pada masing-masing kecamatan menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun jumlah penduduk wanita selalu lebih besar dibanding jumlah penduduk laki-laki.

- **Tenaga Kerja**

Tenaga kerja adalah penduduk yang dapat diikutsertakan dalam proses ekonomi. Di Kabupaten Tulungagung usia kerja tenaga kerja dengan usia antara (15 – 64) tahun pada Tahun 2006 sejumlah 590.552 jiwa, Tahun 2007 sejumlah 600.003 jiwa dan Tahun 2008 sejumlah 628.598 jiwa.

- **Mata Pencanharian**

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2008 yang menonjol adalah dibidang pertanian 169.246 jiwa. Sedangkan mata pencaharian yang lain yaitu buruh sebanyak 91.007 jiwa, peternakan sebanyak 70.844 jiwa, lain-lain 28.103 jiwa dan swasta sebanyak 34.671 jiwa.

Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Propinsi Jawa Timur. Dimana kabupaten ini terletak sekitar 154 km dari arah barat daya Kota Surabaya. Secara etimologis, kata Tulungagung dipercaya sebagai kata “Pitulungan Agung” atau dalam bahasa Indonesia berarti pertolongan yang Kuasa.

Topografis wilayah initerletak pada ketinggian wilayah sekitar 85 m dpl. Dimana wilayah-wilayah kabupaten ini terbagi atas :

- Daerah pegunungan yang terletak di bagian wilayah barat laut kabupaten yang merupakan bagian dari pegunungan Wilis-Liman
- Daerah dataran rendah yang terletak di bagian wilayah tengah kabupaten
- Daerah pegunungan yang terletak di bagian wilayah selatan dimana merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Kidul

2. Gambaran Umum Desa Bendungan

Desa Bendungan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Wilayah desa Bendungan Kecamatan Gondang mempunyai jarak dari ibu kota kecamatan 1,5 km.

a. Luas dan Batas Desa

Luas Desa : 131,792 Ha

Batas Desa

- ▶ Sebelah Utara : Desa Mojoarum
- ▶ Sebelah Timur : Desa Ngrendeng dan Desa Gondang
- ▶ Sebelah Selatan : Desa Notorejo
- ▶ Sebelah Barat : Desa Mojoarum

b. Pembagian Wilayah

Desa Bendungan terbagi ke dalam 2 Dusun, yaitu :

1. Dusun Krajan
2. Dusun Patoman

Serta terbagi menjadi 14 RT dan 4 RW

c. Jumlah penduduk.

Saat ini jumlah penduduk desa bendungan kecamatan gondang mencapai 2796 orang, yang terdiri dari laki – laki 1358 orang dan perempuan 1438 orang, dengan jumlah 892 kepala keluarga.

Adapun susunan kepemerintahan Desa Bendungan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Tingkat Pendidikan

no	nama	jabatan	pendidikan
1	Siswoyo	Kepala Desa	SLTA
2	Yuwono	Sekretaris Desa	SLTA
3	Imam Mastur	Kasun Patoman	SLTA
4	Suparman	Kasun Krajan	SLTA
5	SUHARMANTO	KAURPEMERINTAHAN	SLTA
6	Imam Kanapi	Kaur Pembangunan	SLTA
7	Hari Ikhwanto, S sos	Kaur Kesra	S1
8	Heru Kuswanto, ST	Kaur Keuangan	S1
9	Suwandi	Kaur Umum	SLTA
10	Sujianto	Pelaksana Teknis	SLTA
11	PARYAJI	Pelaksana Teknis	SLTA
12	SRIANI	Pelaksana Teknis	SLTA

Sumber : Kantor Desa Bendungan

d. Visi Desa Bendungan

Dalam merumuskan sesuatu tentunya ada pijakan sebagai arah dalam perumusan, begitu juga dengan rumusan pembangunan Desa kita harus tahu akan dibawa ke mana dan apa saja yang harus dikerjakan agar dapat mencapai tujuannya. Perumusan RPJM-Desa tidak lepas dari pada Visi dan Misi suatu desa,

untuk itu Desa Bendungan mempunyai VISI:

**“TERJALINNYA KEBERSAMAAN DALAM PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEHINGGA TERCIPTA DESA**

BENDUNGAN YANG MAKMUR, AMAN, SEJAHTERA, NYAMAN DAN GUYUB RUKUN”.

Misi Desa Bendungan.

Guna mencapai visi tersebut, pemerintah Desa Bendungan mempunyai misi:

- Mewujudkan Desa BENDUNGAN menjadi desa yang selalu terdepan dengan memanfaatkan sektor-sektor unggulan, mewujudkan insan pembangunan yang beriman dan bertaqwa sebagai modal pembangunan manusia yang berkualitas.
- Guyub Rukun antar warga dan antar agama dalam mewujudkan kebersamaan
- Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga.
- Meningkatkan tugas pokok dan fungsi Pemerintah dan Lembaga Desa, mewujudkan masyarakat yang terampil dan mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri melalui pelatihan-pelatihan, mewujudkan kerja sama / kemitraan yang harmonis antara masyarakat, aparat dan lembaga-lembaga desa serta kaum peduli dalam melaksanakan pembangunan.
- Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembinaan usaha kecil dan bantuan modal.
- Meningkatkan derajat kehidupan politik yang demokratis.
- Pembinaan generasi muda lewat organisasi sosial, keagamaan dan karang taruna.

e. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa pada tahun 2011 Desa Bendungan diarahkan pada:

- Peningkatan sosial budaya dengan melestarikan hari besar agama yang dianut oleh masyarakat Bendungan yang mayoritas beragama Islam dengan jalan saling menumbuhkan rasa hormat menghormati dan kerja sama antar pemeluk agama dengan jalan melestarikan Hari Besar agama masing-masing.
- Melestarikan kebudayaan yang hampir punah yaitu berupa Jedor, Hadroh/Rebana, Jaranan dan Karawitan. Untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan itu kita perlu adanya kebersamaan antara masyarakat dengan pemerintah desa, yang saat ini sangat membutuhkan uluran dana, agar dapat bangkit lagi.

- Peningkatan peran serta dalam perencanaan desa untuk ini, BPD dan LPM dan lembaga yang terkait sangat erat kaitannya dengan perencanaan desa dengan jalan meningkatkan sumber daya manusia berupa pelatihan-pelatihan, sehingga dapat memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

f. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kecamatan / Kabupaten

Prioritas program dan kegiatan skala kecamatan / kabupaten pada tahun 2011 Desa BENDUNGAN diarahkan pada:

- Peningkatan sarana pendidikan dengan jalan membangun gedung PAUD di Desa BENDUNGAN untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memperlancar proses belajar mengajar.
- Peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan dengan jalan pemberian honor guru PAUD, guru TPA dan honor kader posyandu yaitu untuk menambah kesejahteraan guru dan kader posyandu.
- Peningkatan mutu kesehatan masyarakat Desa BENDUNGAN dengan jalan pembangunan gedung POLINDES yaitu untuk memudahkan masyarakat mendapatkan prasarana kesehatan karena gedung yang lama masih bergabung dengan kantor desa dan keadaannya sudah tidak mamadai.
- Peningkatan mutu transportasi masyarakat dusun Krajan Desa Bendungan dengan bentuk kegiatan pengaspalan akses jalan menuju desa Mojoarum sehingga memperlancar transportasi masyarakat antar desa.
- Peningkatan sarana Olah Raga dengan jalan pembangunan talud jalan pinggir lapangan untuk menanggulangi longsornya badan jalan menuju ke lapangan Olah Raga Desa BENDUNGAN.
- Peningkatan kesejahteraan dan derajat kehidupan masyarakat miskin dengan cara perbaikan rumah / pemugaran rumah tidak layak huni di Desa BENDUNGAN sehingga masyarakat miskin mempunyai rumah layak untuk di tempati.
- Peningkatan mutu perekonomian masyarakat yaitu dengan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan pelatihan usaha kecil, untuk menambah modal usaha agar dapat mengembangkan usaha sehingga meningkatkan hasil pendapatan.

- Peningkatan mutu produksi hasil ternak dengan jalan pengadaan alat pengolah pakan ternak sehingga masyarakat dapat mengolah pakan ternak dengan baik, sehingga hasil ternak dapat meningkat.
- Peningkatan perekonomian masyarakat Desa BENDUNGAN dengan cara pemberian bibit sapi dan kambing. Sehingga perekonomian masyarakat dapat berkembang dan mendapatkan hasil ternak yang baik.
- Peningkatan hasil pertanian dengan cara pengadaan benih unggul dan pupuk organik maka hasil pertanian dapat dioptimalkan dengan baik, sehingga pendapatan hasil panen bertambah.
- Peningkatan gizi anak Balita dengan cara penyuluhan ke Posyandu-posyandu dan pemberian makanan tambahan pada anak-anak Balita terutama yang kekurangan gizi.
- Peningkatan kualitas pendidikan bagi anak kurang mampu hingga ke jenjang yang lebih tinggi dengan cara pemberian beasiswa bagi anak sekolah yang tidak mampu.

3. Gambara umum PNPM Mandiri Perdesaan di desa Bendungan

a. Sejarah singkat PNPM MP

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sasarannya adalah masyarakat perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998-2007.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu : a) Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) untuk kegiatan pembangunan, b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (capacity building), dan c) pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Desa Bendungan kecamatan Gondang merupakan salah satu desa yang mendapat bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM MP).PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Sejak tahun 2011 desa Bendungan mendapat bantuan dari PNPM MP, bantuan tersebut berupa bantuan dana untuk pembangunan fisik dan non fisik. Di desa Bendungan program yang telah dijalankan selama setahun terakhir adalah program pembangunan infrastruktur dan program simpan pinjam perempuan (SPP) yang masih terus berlangsung.

Program-program yang telah dilaksanakan di desa Bendungan diantaranya adalah pengaspalan jalan desa, pembangunan MCK, perbaikan dan pembuatan gorong – gorong, pembangunan polindes, pembangunan kantor desa dan yang sedang baru selesai dilaksanakan adalah perabatan beton jalan di setiap jalan alternative desa.

Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan. (PPK)

b. Organisasi Pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan desa Bendungan

Pelaku PNPM MP terdiri dari pelaku tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Untuk para pelaku PNPM MP tingkat desa di desa Bendungan adalah sebagai berikut :

1. Fasilitator kabupaten : Ir. Fatchur Rochman
2. Fasilitator kecamatan : Fajar iman Santoso .ST
3. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) : Drs. Sujianto
4. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
 - a. Ketua : Anik Widayati, Amd
 - b. Sekertaris : Siti Wuawanah
 - c. Bendahara : Ahmad Burhan SE
5. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

- a. Ketua : Ibrahim
- b. Sekertaris : Triasih
- c. Bendahara : Ma'ruf

6. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) perempuan : Ninik S.

7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) laki-laki : Nuryanto

Para pelaku PNPM MP tersebut adalah masyarakat desa Bendngan yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat pada saat diadakan Musyawarah desa (musdes) yang di fasilitasi oleh fasilitator kecamatan.sebelum masuk dalam proses pelaksanaan para pelaku PNPM MP ini diberikan pemahamn dan pembekalan agar mereka dapat memahami apa yang harus dilakukan sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

c. Sekertariat PNPM MP

Di setiap kecamatan terdapat sekertariat PNPM MP yang dijadikan sebagai tempat atau wadah dari semua desa yang mendapatkan bantuan untuk melaporkan dan mendapatkan informasi mengenai kegiatan PNPM MP. Sekertariat PNPM MP tersebut adalah kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan yang terletak di Jalan Raya Gondang No.4 kecamatan Gondang.

d. Program – program Pemberdayaan PNPM Desa Bendungan

1. Pembangunan Infrastruktur

Program – program yang telah dilaksanakan :

- a. Pembuatan gorong – gorong sebagai saluran pembuangan air yang dilakukan sepanjang dusun krajan dan pajaran menjadikan jalan tidal lagi banjir dan digenangi air pada waktu musim hujan, sehingga masyarakat juga lebih nyaman dalam mengerjakan aktivitasnya yang sering melewati jalan antara dusun krajan dengan dusun pajaran.
- b. Rabat beton jalan alternatif desa salah satunya adalah jalan alternative dusun krajan dengan dusun patoman yang mana dulu sebelum adanya program PNPM MP desa Bendungan jalan alternative yang ada di dusun patoman dan krajan tersebut sungguh parah keadaannya, jalan yang rusak dan sulit dilewati oleh masyarakat apalagi pada waktu musim penghujan dikarenakan akan becek dan licin. Padahal jalan alternative tersebut menjadi pilihan warga ketika akan pergi kesawah karena banyak warga dusun krajan yang sawahnya terletak di dusun patoman dan demikian juga sebaliknya. Tapi setelah adanya perabatan beton jalan tersebut memudahkan para petani masyarakat dusun Karajan dan patoman dalam melakukan

aktivitasnya apalagi pada waktu musim panen tiba dimana dalam mengangkut hasil panen warga tidak takut lagi melewati jalan tersebut yang memang lebih cepat untuk pulang pergi dalam mengangkut hasil panennya. Perabatan beton ini juga dilakukan pada jalan – jalan alternative lainnya yang ada di desa Bendungan.

2. Pembangunan Non Fisik

Di Desa Bendungan Kecamatan kecamatan Gondang terdapat 3 (tiga) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang didanai oleh PNPM Mandiri Pedesaan yaitu Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu; Mawar, Anggrek dan rosela. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mawar berada di Dusun Induk Desa, Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Anggrek berada di Dusun krajan, sedangkan Kelompok Simpan Perempuan (SPP) berada di Dusun patoman.

B. Penyajian data Penelitian

2. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

Sebagai gambaran lengkap terkait pelaksanaan PNPM MP di Desa Bendungan Kecamatan Gondang, berikut penjelasan pelaksanaannya secara bertahap

a. Perencanaan.

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, sampai pada Musdes Informasi Hasil. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari MAD Sosialisasi sampai dengan Pelatihan KPMP/K. Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap penggalian gagasan sampai dengan musdes perencanaan atau dikenal dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMPD). Perencanaan kegiatan di kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai dengan MAD penetapan usulan. Perencanaan kegiatan di kabupaten adalah perencanaan koordinatif, dimulai dari keterlibatan utusan kecamatan dalam forum SKPD sampai dengan musrenbang kabupaten.

1). Sosialisasi

a. Musyawarah Antar Desa sosialisasi (MAD) sosialisasi.

MAD sosialisasi merupakan pertemuan antar desa untuk sosialisasi awal tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan serta untuk menentukan kesepakatan kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Siswoyo selaku Kepala Desa Bendungan :

“ MAD sosialisasi adalah pertemuan antar desa untuk sosialisasi awal tentang PNPM adapun tujuan dari musyawarah tersebut adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai PNPM – MP dan untuk menetapkan kesepakatan antar desa untuk melaksanakan PNPM – MP... ” (wawancara 5 Januari 2012).

Bapak kepala desa juga menambahkan *“ Adapun yang hadir dalam MAD sosialisasi adalah kepala desa dan aparat desa, 2 orang wakil BPD, LPM, wakil rumah tangga miskin dari setiap desa, wakil perempuan tiap desa, dan anggota masyarakat yang berkenan hadir ” (wawancara 5 Januari 2012).*

Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Sarwani salah satu anggota BPD desa Bendungan yang turut serta dalam MAD sosialisasi ini, beliau menyatakan :

“ iya memang benar mas, saya salah satu anggota BPD desa Bendungan yang Hadir dalam MAD sosialisasi, dimana dalam MAD sosialisasi itu penyampaian tentang materi

PNPM – MP...dan dari MAD tersebut juga akan disepakati mengenai jadwal musdes sosialisasi dari setiap desa dan waktu penyusunan kegiatan” (wawancara 5 Januari 2012)

Bapak Sarwani juga menambahkan dalam pernyataannya,

“ salah satu hasil dalam MAD sosialisasi kemarin adalah Disepakatinya jadwal kegiatan musyawarah desa sosialisasi dari tiap desa dan rencana pelaksanaan musyawarah antar desa prioritas usulan...” (wawancara 5 Januari 2012).

b. Musyawarah Desa (musdes) sosialisasi.

Sedangkan tahapan sosialisasi di Desa diawali dengan Musyawarah desa sosialisasi sebagai ajang sosialisasi atau penyebarluasan informasi PNPM Mandiri Perdesaan di desa. MusDes sosialisasi ini sekaligus sebagai perpanjangan tangan dari MAD sosialisasi di kecamatan sebelumnya.

Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh bapak kepala desa Bendungan:

“ MusDes Sosialisasi di desa Bendungan pada tanggal bulan Februari 2011, sebagai penyebarluasan informasi mengenai Program PNPM MP kepada masyarakat...Musyawarah Desa Sosialisasi yang dilaksanakan, dalam bentuk pengarahan.” (wawancara 5 Januari 2012)

Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh salah satu warga desa Bendungan, yang turut hadir dalam MD sosialisasi bapak Mudjoko sw:

“Pertama-tama, diadakan sosialisasi tentang PNPM MP di Balai Desa, yang dihadiri oleh semua aparat desa, tokoh-tokoh masyarakat serta beberapa perwakilan warga...”(wawancara 5 Januari 2012)

Materi Musyarawah desa sosialisasi tersebut berkisar tentang Petunjuk Teknis Operasional Program PNPM MP. Selain digunakan untuk sosialisasi, musyawarah desa ini juga digunakan untuk memilih perwakilan masyarakat guna menjadi Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

yang mempunyai fungsi dan peran untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, serta keuangan PNPM Mandiri Perdesaan.

Bapak Ibrahim selaku ketua TPK desa Bendungan menambahkan pernyataannya :

“ dalam musyawarah desa ini juga membentuk dan memili anggota TPK yang dilakukan secara demokratis serta pemilihan kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dimana kader tersebut harus 1 perempuan dan 1 laki – laki, mas...”
(wawancara dengan bapak ibrahim 5 Januari 2012).

Hal ini dibnarkan oleh pernyataan ibu Triasih selaku sekretaris TPK desa Bendungan, *“ memang didalam musdes kemrin juga bertujuan untuk menetapkan struktur oengurus TPK mas...”* (wawancara 6 januari 2012)

Bapak Nuryanto juga membenarkan bahwa dalam musdes sosialisasi juga untuk memilih kader KPMD

“ memang benar mas saya ditunjuk sebagai KPMD dari pihak laki – laki, sedang dari pihak perempuan dipilih ibu Ninik S...” (wawancara 8 Januari 2012)

Didalam musdes sosialisasi ini dihadiri oleh kepala desa dan perangkat desa, perwakilan BPD, LSM dan beberpa masyarakat baik laki – laki dan perempuan. Akan tetapi tidak semua masyarakat desa bendungan mengetahui waktu pelaksanaan musdes.

2). Penggalan Gagasan

Tahap awal dari proses penggalan gagasan adalah mengadakan pertemuan di dusun untuk membuat peta sosial kemiskinan bersama-sama dengan warga dusun setempat. Musyawarah penggalan gagasan ini menghasilkan daftar usulan-usulan kegiatan yang hendak diajukan untuk mendapatkan dana dari program PNPM MP. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Imam mastur, selaku Kepala Dusun Patoman:

“ sebelum musdes, Tiap-tiap dusun mengadakan musyawarah untuk menentukan usulan yang nantinya akan diusung sebagai usulan dusun pada musdes perencanaan mas... musyawarah dusun ini didakan dirumah saya dan dihadiri oleh perwakilan masyarakat...” (wawancara 10 Januari 2012)

Hal tentang musyawarah dusun ini dibenarkan oleh Bapak Nuryanto selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) desa Bendungan :

“Di rumah pak Kasun diadakan musyawarah buat menentukan usulan kegiatan yang mau diajukan untuk didanai program PNPM. Kalo ngga salah tiga kali kumpul, akhirnya di setuju pembangunan jalan sebagai usulan yang akan diajukan dari dusun patoman...” (wawancara 10 Januari 2012)

Dari hasil penggalian gagasan di Musyawarah antar Dusun maupun MDKP ditentukan gagasan-gagasan diajukan untuk mendapat dana PNPM MP adalah sebagai berikut

Tabel 2
Daftar Usulan dari Dusun dan MDKP Bendungan

No	Dusun	Usulan
1	Patoman	Perbaiki jalan Rabat Beton
2	Krajan	Simpan pinjam Perempuan dan Pembuatan saluran air atau gorong - gorong

Sumber : Data yang diolah

3). Musyawarah Perencanaan

Setelah gagasan dari dusun dan MDKP tersusun, diadakan Musdes perencanaan bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dari proses penggalian gagasan di dusun. Musdes Perencanaan di Desa Bendungan sendiri terlaksana bersamaan dengan MDKP yakni bertempat di Balai Desa Bendungan dan dihadiri oleh 16 orang (8 laki-laki, 8 perempuan).

Seperti yang dikemukakan oleh ibu Tri Asih selaku sekretaris TPK Desa Bendungan, sebagai berikut :

“Pada MusDes Perencanaan di Balai desa kemarin, 6 usulan dusun untuk menjadi usulan desa. Usulan yang terpilih menjadi usulan desa adalah SPP, rabat beton jalan Patoman, dan pembangunan gedung polindes, pembuatan WC umum dan gorong - gorong” (Wawancara 12 Januari 2012)

Hal senada diungkapkan Bapak Siswoyo selaku Kepala Desa Bendungan, sebagai berikut

“Dari usulan dari tiap-tiap dusun akan diajukan sebagai usulan desa pada program PNPM MP. MusDes Perencanaan sendiri terlaksan bersamaan dengan terlaksananya MDKP...”(Wawancara 12 Januari 2012)

Bapak Ibrahim juga menambahkan pernyataannya dengan penulis,

“setelah musyawarah desa perencanaan terlaksana, maka usulan – usulan dari tiap dusun Berdasarkan tabel penggalian gagasan, menetapkan satu usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok usaha ekonomi” (wawancara 12 Januari 2012)

Gagasan-gagasan yang menjadi usulan desa untuk diajukan ke MAD di Kecamatan Gondang dari Desa Bendungan pada program PNPM MP tahun 2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Daftar Usulan PNPM MP Desa Bendungan tahun 2011

No	Daftar Usulan
1	Perbaikan Jalan Rabat Beton
2	Simpan pinjam perempuan
3	Gorong – gorong

Sumber : Data yang diolah

4). Verifikasi Usulan

Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk di kecamatan dengan beranggotakan 5 orang yang memiliki keahlian sesuai usulan kegiatan. Berkaitan dengan usulan yang telah disepakati dalam MAD perencanaan, maka untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan terhadap usulan tersebut dibentuklah Dewan atau Tim Verifikasi Kecamatan. Selanjutnya Tim tersebut menindaklanjutinya dengan membuat rekomendasi sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Bapak Ma'ruf, selaku bendahara TPK Desa Bendungan:

"Setelah usulan-usulan desa dibawa ke kecamatan, nanti dari kecamatan akan diperiksa oleh tim verifikasi. Baik dari segi kelayakan usulan dan tingkat urgency usulan tersebut..." (wawancara 12 Januari 2012)

Hal senada juga dikemukakan oleh Bapak Fajar Iman Santoso, ST selaku FK Kecamatan Gondang:

"Setelah terkumpul usulan-usulan desa, selanjutnya usulan-usulan tersebut diverifikasi oleh Tim Verifikasi (TV), guna melihat kelayakan dan tingkat urgency usulan yang nantinya digunakan untuk menentukan, apakah usulan tersebut layak untuk didanai oleh program PNPM Mandiri Perdesaan..." (wawancara 12 Januari 2012)

5). MAD Prioritas Usulan

MAD prioritas usulan adalah pertemuan di kecamatan yang bertujuan membahas dan menyusun peringkat usulan kegiatan. Penyusunan peringkat didasarkan atas kriteria kelayakan sebagaimana yang digunakan oleh TV dalam menilai usulan kegiatan.

Hal ini seperti yang diutarakan oleh bapak Ma'ruf selaku bendahara TPK desa Bendungan:

"Dana yang didapat dari PNPM Mandiri Perdesaan terbatas mas, jadi tidak semua usulan diterima dan didanai. usulan-usulan dari desa ditampung dan diverifikasi untuk nantinya dapat ditentukan urutan prioritas usulan-usulan tersebut. Usulan yang nantinya akan didanai harus dilihat dari prioritas dan tingkat kemanfaatan untuk masyarakat banyak..." (wawancara 13 Januari 2012)

Hal mengenai prioritas usulan ini juga diamini oleh bapak Siswoyo, selaku Kepala Desa Bendungan :

"Kami mengajukan 6 usulan mas,. Namun usulan-usulan kami masih harus nilai kelayakannya oleh tim verifikasi dan diranking oleh UPK di kecamatan dengan memperbandingkan dengan usulan-usulan dari desa-desa lain..." (wawancara 13 Januari 2012)

Setelah usulan-usulan desa di urutkan, selanjutnya ditetapkan usulan mana saja yang didanai oleh PNPM. Keputusan pendanaan harus mengacu pada peringkat usulan yang telah dibuat pada saat MAD prioritas usulan.

6). Musyawarah desa Informasi Hasil Musyawarah Antar Desa

Musdes ini merupakan musyawarah sosialisasi atau penyebarluasan hasil penetapan alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan yang diputuskan dalam MAD penetapan usulan. Musdes ini dilaksanakan baik di desa yang mendapatkan dana maupun yang tidak. Didalam musyawarah desa informasi hasil Musyawarah Antar Desa ini akhirnya juga disepakati waktu pelaksanaan kegiatan selama 4 bulan yaitu bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2011.

Hal ini disampaikan bapak Siswoyo sebagai berikut,

“Dalam musdes informasi ini juga disepakati waktu pelaksanaan program selama 3 bulan mas yaitu bulan Maret – Juni 2011” (wawancara 15 Januari 2012)

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Dusun patoman Bpk. Imam mastur :

“Disetujuinya pembangunan jalan desa untuk mendapat dana dari PNPM MP, merupakan berkah buat warga Desa Bendungan, khususnya bagi warga Dusun patoman mas...waktu pengerjaan sudah di sepakati dalam musdes informasi selam 4 bulan” (wawancara 15 Januari 2012)

Bapak superman selaku kasun krajan juga menyatakan

“akhirnya kami mendapatkan dana bantuan PNPM mas, dimana dana tersebut kami gunakan dengan sebaik – baiknya untuk membangun desa “(wawancara 15 Januari 2012)

Didalam MusDes Informasi hasil ini juga di bentuk tim monitoring yakni tim yang nanti bertugas untuk memonitor dalam pelaksanaan PNPM MP

Tabel. 4

Susunan Tim Monitoring Desa Bendungan

Tim Monitoring	Anggota
----------------	---------

Tim 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asngat 2. Srianah 3. Supriyadi 4. Handoyo
Tim 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. pribadi 2. H. Djaelani 3. Murtiningsih 4. Suryono

Sumber : data yang diolah

Dari keseluruhan pelaksanaan tahap perencanaan ini dapat dilihat kualitas pengelola yang sudah melaksanakan tahapan sesuai dengan petunjuk operasional atau aturan program PNPM MP yaitu melaksanakan tahap perencanaan yang mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan.

b. Tahap Implementasi

Implementasi adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah di sepakati dalam pertemuan MAD serta rapat – rapat persiapan pelaksanaan. Pada tahap ini proses pelaksanaan mulai Pencairan dana 40% sampai Musdes Pertanggungjawaban 100%.

Setelah ditetapkan bahwa Desa Bendungan mendapat dana pembangunan sarana prasarana berupa perkerasan jalan rabat beton dusun Patoman, dan kegiatan simpan pinjam perempuan, desa harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB). Surat perjanjian ini yang selanjutnya menjadi dasar untuk besarnya penerimaan dana PNPM Mandiri Perdesaan tersebut. Sesuai wawancara dengan Bapak Ibrahim selaku ketua UPK desa Bendungan :

“Setelah usulan desa disetujui untuk mendapat dana dari PNPM Mandiri Perdesaan, kami minta untuk pihak desa untuk menandatangani SPPB yang selanjutnya menjadi dasar untuk besaran dana PNPM MP yang diperoleh desa...” (wawancara 17 Januari 2012)

Hal serupa diungkapkan oleh Bapak Siswoyo :

“Bener itu mas, setelah diumumkan lewat MusDes informasi hasil MAD bahwa Desa Bendungan mendapat bantuan dana Saprass untuk pembangunan dan spp, nselanjutnya tinggal menandatangani SPPB. Sambil menunggu dana cair, kami melakukan persiapan pelaksanaan yang lain..” (wawancara 17 Januari 2012)

Surat Prjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) yang telah diverifikasi oleh UPK dan Fasilitator Kecamatan diajukan ke penanggung jawab operasional kerja (PjOK) untuk segera dilakukan pengesahan. SPPB yang telah segera ditindaklanjuti oleh FK dan UPK untuk melakukan pengajuan dana ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN).

1. Alur Pencairan Dana PNPM MP

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Program PNPM MP penyaluran dana dilakukan lewat Kantor Pos/Bank pemerintah. Berkaitan dengan hal ini, UPK Kecamatan Gondang memiliki nomor rekening (rutin) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang/Unit Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Pemilihan rekening BRI sebagai bank penyaluran PNPM bertujuan untuk memudahkan dalam proses pengambilan dana. Pertimbangan banyaknya cabang BRI sehingga dapat dengan mudah diakses pihak UPK Kecamatan.

Hal itu dibenarkan oleh Bapak Ibrahim :

“Kami diharuskan untuk membuka rekening di BRI, hal ini untuk mempermudah dalam proses pengambilan dana PNPM MP, karena cabangnya banyak dan di setiap kecamatan pasti ada” (wawancara 19 Januari 2012)

Hal ini sesuai dengan keterangan Bapak Ma'ruf :

“Pertimbangan mengenai penunjukkan BRI sebagai mitra penyalur PNPM, tidak lain atas dasar banyaknya cabang BRI, sehingga akan lebih mudah diakses..” (wawancara 19 Januari 2012)

Model pencairan dilakukan dalam implementasi PNPM MP adalah secara kluster atau bertahap. Dimana TPK membuat RPD I (Rencana Pengajuan dana) disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB), kemudian diverifikasi oleh UPK kecamatan dan selanjutnya ditentukan tanggal pencairan dana. Setelah cair dan digunakan, TPK perlu membuat LPD I (Laporan Penggunaan Dana), yang kemudian akan digunakan untuk mengajukan RPDII, begitu seterusnya sampai pada

tahap LPD 100% dan Musyawarah Desa Serah Terima. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu Triasih selaku sekretaris TPK :

“Sebelum dana dari PNPM MP mengalir, kami perlu membuat RPD disertai beberapa syarat ketentuan yang lain, misal RAB, Ceklis Swadana dll. Setelah dan turun, lalu kami gunakan sesuai dengan RPD I, setelah itu membuat LPD I (laporan penggunaan dana) yang nantinya digunakan untuk pengajuan RPD II dan begitu seterusnya...” (wawancara 19 Januari 2012)

Bpk. Supriyadi, selaku anggota Tim monitoring Desa Bendungan juga mengatakan:

“TPK dan FD menghubungi kami bahwa akan nada pencairan dana PNPM dari UPK kecamatan, sehingga kami ikut mengawasi aliran dana dari kecamatan sampai ke balai desa. Di balai desa kami menghitung ulang jumlah uang yang diberikan untuk menghindari penyimpangan...” (wawancara 19 Januari 2012)

Hal senada diungkapkan oleh bpk. Handoyo :

“Penyaluran dana ini dilakukan secara bertahap dari kecamatan ke balai desa. Kami mengambil di UPK kecamatan, selanjutnya tim UPK ikut mengantar ke balai desa. Keseluruhan tahap pencairan ini diawasi secara langsung oleh tim monitoring, bahkan sesampainya di balai desa dana dihitung ulang...” (wawancara 19 Januari 2012)

Tahapan penyaluran dana PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Bendungan adalah sebagai berikut:

1). Pengajuan Rencana Pengajuan Dana (RPD), Sertifikasi Dana Pertama

Sebelum mengajukan pencairan dana, TPK harus terlebih dahulu membuat Rancangan Pengajuan Dana RPD 40% dari dana keseluruhan disertai dengan Rencana Anggaran Belanja I.

Namun demikian masih saja ada administrasi yang kurang lengkap hal inilah yang menjadi pekerjaan yang segera ditangani secara serius oleh UPK dan FK.

Seperti yang diungkapkan oleh ibu triasih :

“Wah, sulit sih mas memang, kita harus membuat RPD tersebut harus sesuai dengan juklak, Belum lagi format pembuatannya berbeda dengan PNPM PPK sebelumnya, beberapa kali harus dikembalikan ke saya untuk diperbaiki sesuai dengan format yang

diberikan oleh tim UPK. Saya juga hanya lulusan SMA saja mas, jadi tidak begitu mengerti dengan pengadministrasian PNPM MP ini. Pas disuruh membuat pembukuan, surat-surat, arsip itu awalnya saya buat manual mas, tulis tangan, dan nota-nota ditempel-tempel begitu saja mas. Setelah dikasih tau sama tim UPK kalau formatnya ketik ya sudah mas, saya sketik di rental pengetikan sebisa saya mas...” (wawancara 19 Januari 2012)

Pengajuan RPD inilah yang membutuhkan waktu karena harus menyakinkan ketertiban administrasi seperti model yang ditawarkan oleh PNPM-MP.

2). Penyaluran Dana 40% (Tahap I)

Setelah dilakukan verifikasi UPK melakukan pemesanan Bank satu hari sebelumnya tentang kebutuhan pencairan dana. FK juga memastikan bahwa TPK bahwa pada hari jam yang telah disepakati akan dilakukan pencairan dana. FD beserta TPK memberikan informasi pelaksanaan pencairan Dana kepada Tim Khusus, Kelompok Masyarakat dan Masyarakat pemanfaat.

3). LPD I Laporan Pertanggungjawaban Dana Pertama/ MP 40%

Setelah dana pertama digunakan TPK membuat laporan tentang penggunaan dana LPD I sebagai syarat untuk mengajukan RPD II, disini sekaligus diselenggarakan Musyawarah Pertanggungjawaban I. kegiatan ini terselenggara bertempat di balai desa Bendungan. Disini dilaporkan juga perkembangan pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan serta pemeriksaan bukti-bukti administrasi secara baik dan benar.

4). Pengajuan RPD & Dana Kedua

Kegiatan ini sama Tahap I hanya dalam pengajuan dana ini tidak ada SPPB Ditambah Berita Acara Musdes 40%. Pelaporan Penggunaan Dana Pertama (LPD I) yang dilampiri Bukti Kuitansi, Nota Penerimaan dan Pengadaan Barang Swadaya dll.

5). Penyaluran Dana 40% (Tahap II)

Di Desa Bendungan, Peyaluran dana 40% dengan jumlah dana yang dikucurkan. Kucuran dana ini disalurkan dengan sistematika yang sama dengan penyaluran dana pertama. Pelaksanaan penyaluran dana ini dilakukan dengan mengundang semua unsur dalam masyarakat.

6). Laporan Penggunaan dana II/ MP 80%

Setelah dana digunakan sesuai dengan kebutuhan, fungsi pelaporan dilaksanakan. Tahap pelaporan dengan membuat Laporan Penggunaan Dana II sekaligus melaksanakan Musyawarah Pertanggungjawaban II yang bertempat di balai desa Bendungan. Disini TPK mempertanggungjawabkan hal penggunaan dana terhadap masyarakat.

7). Pengajuan RPD & Dana Ketiga

Kegiatan ini hampir sama dengan Tahap II Ditambah Berita Acara Musdes 40% Tahap II. Sebelum selesai 100% Pelaksanaan Pekerjaan Lapangan & Administrasi 100%, maka 20% dana akan tertinggal di UPK sebagai Jaminan Kewajiban Penyelesaian. Pola ini yang merupakan bagian dari posisi tawar swadaya masyarakat yang akan dijadikan dana pendamping PNPM-MP. Diharapkan adanya pertanggungjawaban pelaksanaan di lapangan yang disesuaikan dengan rencana pengajuan berikutnya.

8). Penyaluran Dana 20% (Tahap III)

Sistem penyaluran dana sama seperti pada Penyaluran dana sebelumnya. FD perlu memastikan bahwa semua pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan bukti-bukti administrasi telah dilakukan secara baik dan benar bar dilakukan persiapan pelaksanaan LPD 100%. Pelaksanaan LPD dilakukan mengundang semua unsur dalam masyarakat.

9). LPD Penggunaan Dana Ketiga dan Musyawarah Serah Terima

Kegiatan ini diawali dengan TPK melakukan koordinasi dengan FK dalam pelaksanaan LPD 100%. FK perlu memastikan bahwa TPK melaksanakan semua pekerjaan pekerjaan di lapangan dan bukti-bukti administrasi telah dilakukan secara baik dan benar. Persiapan pelaksanaan LPD 100% dalam bentuk Musdes Serah Terima.

Sesuai dengan pernyataan ibu Triasih selaku sekretaris TPK :

“Setelah proses pembangunan selesai dilakukan Musyawarah Desa Serah Terima di balai desa, sekalian penyerahan Laporan Penggunaan Dana 100%...” (wawancara 19 Januari 2012)

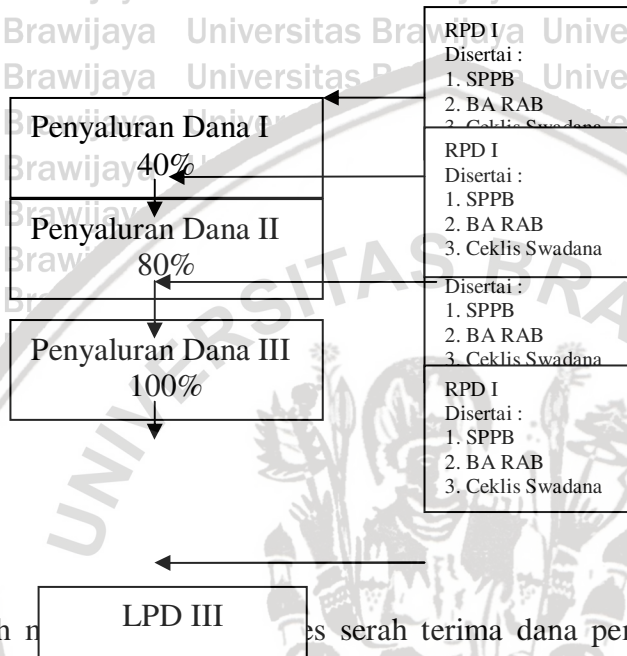
Dalam Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) ini diinformasikan bahwa telah terjadi revisi desain pada rabat beton jalan dusun patoman. Desain awal dimana terdapat saluran air, diubah menjadi jalan urugan penuh. Hal ini sesuai dengan pertimbangan yang telah diberikan oleh bapak Fajar Imam S, ST. selaku fasilitator dari Kecamatan demikian :

“Dengan kondisi jalan yang sudah tidak layak lagi, perlu adanya perbaikan yang serius, disebabkan karena jalan tersebut merupakan sarana aktivitas warga, baik untuk

pendidikan maupun perekonomian sehingga perlu adanya perbaikan yang serius ...”
(wawancara 20 Januari 2012)

Lebih lanjut untuk mempermudah pemahaman mengenai penyaluran dana PNPM MP berikut adalah bagan penyaluran dana PNPM MP di Desa Bendungan tahun 2011

Gambar 2 Skema Penyaluran Dana PNPM MP di Desa Bendungan tahun 2011



Setelah n... LPD III... es serah terima dana pembangunan selesai maka langkah selanjutnya pelaksanaan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam rapat musyawarah desa yaitu pembangunan jalan alternatif rabat beton di dusun patoman yang menghubungkan dengan dusun krajan di desa Bendungan kecamatan Gondang.

Adapun tahapan sebelum pelaksanaan pembangunan adalah :

1. Pengadaan Tenaga Kerja

TPK mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan kebutuhan tenaga kerjanya, serta upah dan hari kerja yang dibutuhkan sesuai RAB dan desain teknisnya. Pengumuman kebutuhan tenaga kerja ini terbuka bagi warga desa termasuk bagi kaum perempuan dan diutamakan bagi RTM. Pengumuman disampaikan melalui papan informasi di tempat strategis dimana masyarakat biasa berkumpul, sehingga setiap warga masyarakat tahu bahwa ada pembangunan di desanya. Calon tenaga kerja mengisi Format Pendaftaran satu kali sebelum mulai bekerja, akan tetapi boleh mendaftarkan diri sampai pelaksanaan selesai.

Didalam pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya masyarakat bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan dan pelaksanaannya, dimana dalam hal ini masyarakat mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan, terutama bagi penduduk desa rumah tangga miskin. Demikian dalam pengadaan tenaga kerjanya harus lebih mengutamakan rumah tangga miskin (RTM)

Hal ini disampaikan oleh bapak Ibrahim selaku ketua UPK desa bendungan,

“ sudah ada aturannya mas kalau dalam pelaksanaan kegiatan PNPM MP ini harus mengutamakan masyarakat desa, terutama masyarakat yang kurang mampu, karena hal ini juga menambah pemasukan bagi mereka..” (wawancara 20 Januari 2012)

Dalam hal ini TPK mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan kebutuhan tenaga kerjanya, serta upah dan hari kerja yang dibutuhkan sesuai RAB dan desain teknisnya. Pengumuman kebutuhan tenaga kerja ini terbuka bagi warga desa termasuk bagi kaum perempuan dan diutamakan bagi RTM. Bapak Ibrahim juga menambahkan,

“ Pengumuman disampaikan melalui papan informasi di tempat strategis dimana masyarakat biasa berkumpul, sehingga setiap warga masyarakat tahu bahwa ada pembangunan di desanya. Calon tenaga kerja mengisi Format Pendaftaran satu kali sebelum mulai bekerja, akan tetapi boleh mendaftarkan diri sampai pelaksanaan selesai.” (wawancara 20 Januari 2012)

Lebih lanjut bapak kepala desa membenarkan apa yang sudah disampaikan oleh bapak Ibrahim, berikut pernyataan beliau :

“dengan adanya program PNPM MP di desa Bendungan ini telah ikut meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu, karena seluruh pengerjaan proyek ini dikerjakan oleh warga desa bendungan yang miskin dan tidak mempunyai pekerjaan..” (wawancara 20 Januari 2012).

Dalam salah satu wawancara dengan warga desa bendungan yang ikut dalam pengerjaan proyek PNPM MP ini bapak Sunyoto mengungkapkan :

“kemarin waktu ada pengumuman siapa yang mau ikut menjadi tukang saya langsung ikut, lumayan mas dengan adanya proyek PNPM MP kemarin bisa menambah pemasukan saya, wong saya juga Cuma buruh tani...” (wawancara 20 Januari 2012)

Selain itu bapak Huda yang juga memberikan pernyataan:

“wah kalau ada PNPM MP setiap tahun itu lebih sangat membantu orang – orang seperti kami ini mas...saya bisa belikan sepeda buat sekolah anak saya ya karena ada proyek PNPM MP ini mas...” (wawancara 20 januari 2012).

Jadi program PNPM MP di desa Bendungan ini sedikit banyak telah membantu masyarakat miskin dalam menambah pemasukan dan meningkatkan perekonomian mereka.

2. Pengadaan Bahan dan Alat

Proses pengadaan bahan dan alat dalam PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan oleh masyarakat secara transparan. Atas persetujuan masyarakat, TPK menyelenggarakan proses pengadaan tersebut dan melaporkan setiap tindakannya kepada masyarakat melalui forum pertemuan masyarakat dan papan informasi. Untuk pengadaan bahan dan alat senilai atau kurang dari Rp 15 juta, TPK harus melakukan survey harga minimal kepada 3 (tiga) toko/penyedia dan menentukan toko/penyedia mana yang dipilih berdasarkan harga termurah dengan kualitas dan spesifikasi sesuai yang direncanakan. TPK melakukan survey harga ke beberapa toko untuk perbandingan harga, sehingga pada akhirnya dipakai untuk menyusun RPD dan RAB.

Seperti yang diutarakan oleh bapak Ibrahim:

“TPK harus survey harga ke toko-toko dulu mas, setidaknya 3 toko untuk melakukan perbandingan harga. Hal ini untuk menyusun RAB sebagai syarat pengajuan RPD, harga yang kita jadikan patokan kita ambil dari harga rata-rata mas. Misal untuk barang A harga tertinggi X dan harga terendah Y, maka kita ambil tengah-tengahnya mas, untuk jaga-jaga kalau-kalau nanti ada kenaikan harga...” (wawancara 21 Januari 2012)

Hasil survey dan penentuan toko/penyedia mana yang dipilih harus disampaikan dalam forum pertemuan masyarakat dan papan informasi. Pengadaan bahan dan alat dengan nilai di atas Rp 15 juta, TPK menyelenggarakan proses penawaran harga atau pelelangan yang diikuti sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyedia bahan dan alat. Jika ternyata hanya 1 (satu) dari beberapa penyedia mengikuti penawaran yang mendekati anggaran, sementara yang lainnya jauh dari harga yang dianggarkan, fasilitator perlu memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dana dan atau kolusi dalam pengadaan bahan dan alat tersebut.

Jika karena sesuatu hal hanya ada 1 (satu) penyedia di wilayah tersebut yang mengikuti penawaran, maka fasilitator memfasilitasi pertemuan masyarakat supaya kondisi ini dapat diketahui dan dibuktikan oleh masyarakat setempat.

Sesuai dengan pernyataan tersebut, bapak Ibrahim selaku ketua TPK dari desa Bendungan menambahkan hal sebagai berikut:

“Dari bapak FK menyarankan agar dalam perbaikan Jalan Rabat Beton, sebaiknya menggunakan bahan material berupa, Batu pecah, pasir cor, Semen, pasir urug bawah serta papan begesting berukuran 2x15x200, supaya kedepannya pemanfaatannya dapat lebih tahan lama...” (wawancara 21 Januari 2012)

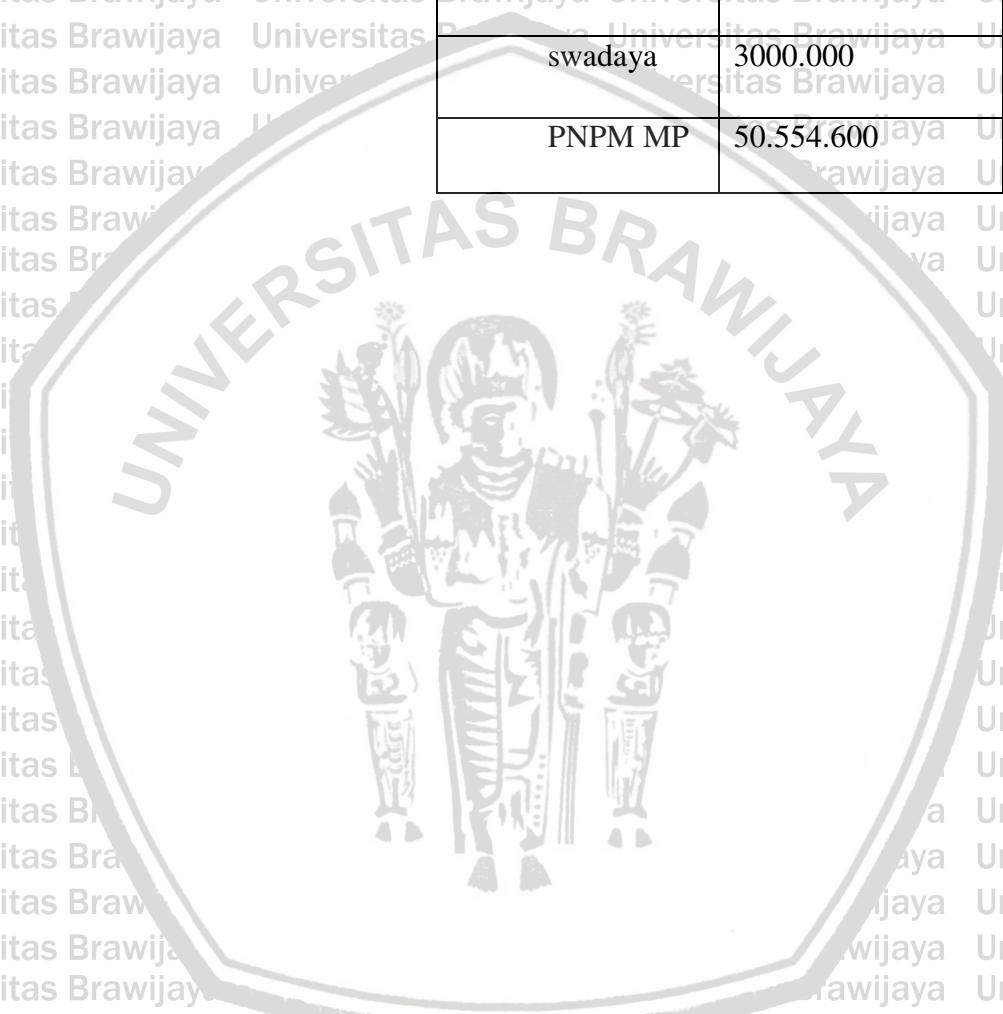
Perbaikan atau lebih tepatnya peningkatan jalan menggunakan komposisi material yang sudah di minimalisir dan disesuaikan dengan RAB. terlebih dalam penggunaan pasir urug bawah, Bpk. Ibrahim juga menambahkan :

“adanya swadaya masyarakat dalam hal pengadaan tanah urug, hal ini sangat membantu memotong anggaran. Sehingga post dana tersebut kami manfaatkan untuk membangun prasarana yang lain...” ((wawancara 21 Januari 2012)

Berikut tabel 5
pengadaan bahan rabat beton PNPM MP desa Bendungan

uraian	total	Harga satuan	Jumlah total
Batu pecah 2/3	84,96 m ³	200.000	16.991.400

Pasir cor	42,49m ³	70.000	2.974.400
Semen (pc)40kg	661sak	45.000	29.745.000
Pasir uruk bawah	33,98m ³	50.000	1.698.800
Papan begesting 2x15x200	429 lembar	5000	2.145.000
		total	Rp. 53.554.600
		swadaya	3000.000
		PNPM MP	50.554.600



Tabel.6

Pengadaan alat rabat beton PNPM MP desa Bendungan

Alat	Total	Harga satuan	Jumlah total
Ember	15 buah	8000	120.000
Sekop	3 buah	35000	105.000
Keranjang	4 buah	6000	24.000

Benang	2rol	4000	8000
Mobilisasi molen	1buah	150000	150.000
Papan nama proyek	1buah	250000	250.000
Prasasti	1 buah	200000	200.000
Sewa molen	19 hari	150000	2850.000
Gerobak dorong	2 buah	340000	680.000
		Total	Rp 4.387.0000

Setelah mekanisme pengadaan tenaga kerja dan pengadaan bahan dan alat pembangunan selesai tahapan selanjutnya adalah pengerjaan program pembangunan yaitu pembangunan jalan alternatif atau jalan penghubung yang berada di dusun patoman yang menghubungkan dengan dusn krajan

3.Rabat beton jalan alternatif dusun patoman.

Setelah melalui beberapa tahapan, akhirnya mulai dikerjakan pembangunan yang telah disepakati dalam rapat musyawarah desa. Untuk desa Bendungan telah disepakati untuk membangun jalan alternatif dan penghubung antar dusun patoman dengan dusun krajan yang panjang jalan kurang lebih 1 km. Dalam pengerjaan pembangunan jalan rabat beton ini telah selesai dikerjakan .

Tabel.7

Tabel rencana anggaran biaya khusus swadaya

uraian	volume			satuan	Harga satuan	Jumlah
	total	Dari swa daya	Dari dana			
Bahan						

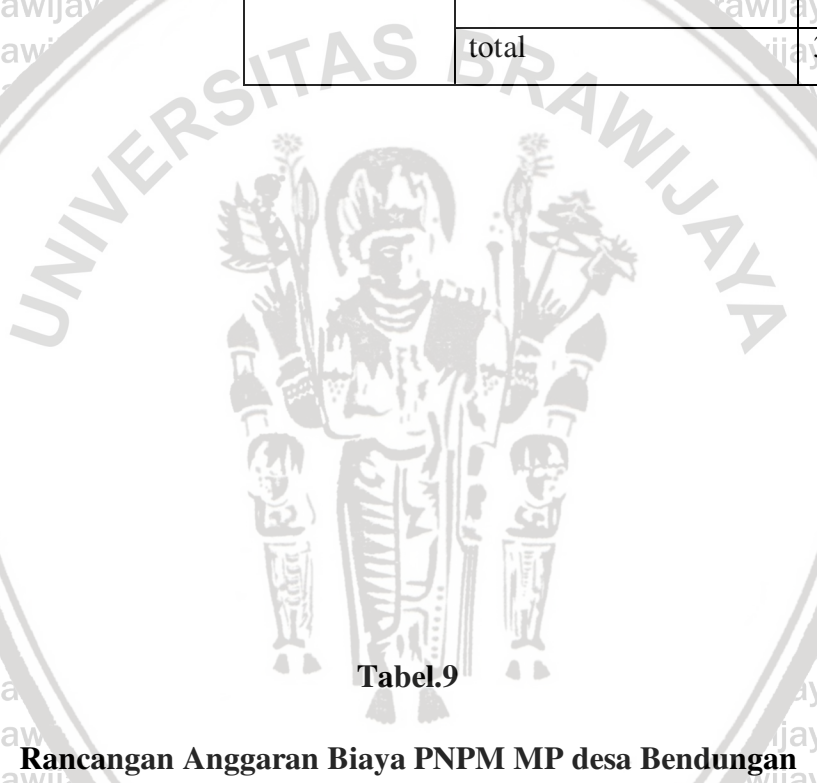
Batu pecah 2/3	92,66	-	92,66		200.000	-
Pasir cor	43,33	-	43,33		70.000	-
Semen 40kg	577,0	67	510,33		45.000	3000.000
Pasir urug bawah	57,5	-	57,49		50.000	-
Papan begisting	429,0	-	429,00			-
					Sub total	3000.000
Alat						
Ember	20	-	20	Buah	8000	
Sekop	2	--	2	Buah	35000	
Keranjang	5	--	5	Buah	6000	
Benang	3	-	3	Rol	4000	
Mobilisasi molen	1	-	1	is	150000	
Papan nama proyek	1	-	1	Buah	250000	
Prasasti	1	-	1	Buah	200000	
Sewa molen	21	-	21	hari	150000	

Tabel.8

Tabel rencana anggaran biaya khusus swadaya

uraian	volume			satuan	Harga satuan	Jumlah total
	total	Dari swadaya	Dari dana			
Upah						

Pekerja	170	-	170	HO K	22.500	-
Tukang	26	-	26	HO K	30.000	-
Kepala kelompok	3	-	3	HO K	30.000	-
swadaya				Non uang tunai		
				Uang tunai		3000.000
				total		3000.000



Tabel.9

Rancangan Anggaran Biaya PNPM MP desa Bendungan

uraian	volume		satuan	Kategori biaya	Harga satuan	Jumlah total
	total	Dari swaday				
	a	b	C=a-b	d	e	f
Bahan						G=cxf

Batu pecah	84,96	-	84,96		200.000	16.991.400
Pasir cor	42,49	-	42,49		70.000	2.974.400
Semen	661	-	661		45.000	29.745.000
Pasir urug bawah	33,98	-	33,98		50.000	1.698.800
Papan begesting	429	-	429		5000	2.145.000
					Sub total 1	53.554.600
					PNPM MP	4.387.000
					swadaya	-
Alat						
Ember	15,00	-	15,00		8000	120.000
Sekop	3,00	-	3,00		35.000	105.000
Keranjang	4,00	-	4,00		6.000	24.000
Benang	2,00	-	2,00		4.000	8.000
Mobilisasi molen	1,00	-	1,00		150.000	150.000
Papan proyek	1,00	-	1,00		250.000	250.000
Prasasti	1,00	-	1,00		200.000	200.000
Molen	19,00	-	19,00		150.000	2.850.000
Gerobak dorong	2,00	-	2,00		340.000	680.000
					Sub total 2	4.387.000
					PNPM MP	4.387.000
					swadaya	-
Upah						
Pekerja	156	-	156	Hok	22.500	3.510.000
Tukang	24	-	24	Hok	30.000	720.000
Kepala kelompok	2	-	2	Hok	30.000	60.000
					Sub total 3	4.290.000
					PNPM MP	4.290.000
					swadaya	-
				Sumber dana		62.231.000

					PNPM MP	59.231.600
					swadaya	3000.000

b. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktifitas/kegiatan pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bertujuan agar perempuan dapat membantu perekonomian keluarganya, seperti di desa Bendungan kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung. Satu bulan sekali kelompok ini mengadakan pertemuan rutin. Anggota kelompok ini memiliki usaha yang berbeda – beda diantaranya ada yang berdagang, usaha telur bebek dan berjualan barang kebutuhan sehari – hari.

Dana Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) berasal dari Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), BLM merupakan dana yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) per kecamatan maksimal 25 % dari alokasi BLM. Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan ini mempunyai sasaran yaitu rumah tangga miskin yang produktif yang sangat memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada dimasyarakat.

Adapun bentuk dari Kegiatan SPP ini adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

Di Desa Bendungan Kecamatan kecamatan Gondang terdapat 3 (tiga) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang didanai oleh PNPM Mandiri Pedesaan yaitu Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu; Mawar, Anggrek dan rosela. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mawar berada di Dusun Induk Desa, Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Anggrek berada di Dusun krajan, sedangkan Kelompok Simpan Perempuan (SPP) berada di Dusun patoman. Hal ini diungkapkan ibu Nurwati selaku ketua kelompok SPP desa Bendungan, berikut pernyataan beliau :

“Didesa Bendungan ada 3 kelompok SPP mas, yaitu kelompok mawar, anggrek dan rosela yang berada di dusun induk, krajan dan dusun patoman “

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam peesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum khususnya kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan.”(wawancara 3 Januari 2012)

1. Penentuan Bunga Simpanan dan Bunga Pinjaman

Penentuan tingkat bunga pinjaman ditetapkan melalui forum musyawarah. Musyawarah dilakukan di Kecamatan Gondang , dengan mengundang seluruh kelompok SPP yang ada di Kecamatan Gondang, untuk Desa Bendungan dihadiri oleh Ibu-ibu SPP yaitu kelompok Mawar, Anggrek dan Rosela.

Sebelum menetapkan tingkat pinjaman bunga terlebih dahulu pihak-pihak terkait yaitu Ketua TPK beserta anggota, UPK, dan Fasilitator, melakukan survey ke Bank-bank yang ada di Kecamatan Gondang untuk mengetahui tingkat bunga terendah Bank yang ada di Kecamatan Gondang. Hasil pengamatan ini digunakan untuk penetapan tingkat bunga yang akan diberlakukan pada kelompok SPP untuk disepakati oleh semua anggota kelompok.

Hal ini diungkapkan oleh bapak Fatur R selaku FT kecamatan Gondang :

“ sebelum menentukan penetapan tingkat bunga pinjaman, kami dari pihak kecamatan dan UPK terlebih dahulu mengadakan musyawarah dengan kelompok SPP di kecamatan Gondang ini “ (wawancara 3 Januari 2012)

bapak Ibrahim selaku ketua TPK desa Bendungan juga menambahkan dalam pernyataannya : *“ terlebih dahulu kami bersama pihak kecamatan melakukan survei mas ke bank – bank yang ada di kec. Gondang ini untuk mengetahui bunga yang paling rendah di antara bank – bank di kec Gondang ini, ini bertujuan agar nanti tidak memberatkan para kelompok SPP mas “(wawancara 3 Januari 2012)*

2. Aturan Pengelolaan Pinjaman

Sebelum Anggota kelompok mendapatkan dana dari PNPM Mandiri Pedesaan, semua kelompok pemanfaat harus memenuhi persyaratan-persyaratan baik itu yang ada dikelompok ataupun yang ada di pihak PNPM Mandiri Pedesaan. Penetapan persyaratan pinjaman ini tertuang dalam Perjanjian Pinjaman,

yaitu sebagai berikut:

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b) Mengisi Perjanjian Tanggung renteng (Surat pernyataan jika ada anggota kelompok yang tidak membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman, maka secara kelompok dan bersama-sama akan melunasinya)
- c) Anggota membayar tepat waktu
- d) Anggota membayar menghadiri pertemuan kelompok
- e) Setiap anggota wajib membayar uang social

hal ini dibenarkan oleh ibu Nurwati selaku ketua kelompok SPP desa Bendungan *“ memang benar mas kami harus menyertakan serta memenuhi persyaratan yang di berikan kepada kami dan bila tidak sanggup memenuhi maupun kurang persyaratannya maka kami tidak bisa menerima dananya “(wawancara 3 Januari 2012)*

PNPM Mandiri Pedesaan sebagai sumber dana dasarnya sangat terbuka kepada semua pemanfaat dana, setiap anggota kelompok akan diberikan dana pinjaman oleh PNPM Mandiri Pedesaan melalui UPK setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak UPK, kelompok mendapatkan dana sesuai dengan usulan.

Dana yang didapatkan oleh kelompok batasan minimumnya Rp 5.000.000 dan maksimum Rp 30.000.000. Kelompok menentukan jumlah dana yang mereka butuhkan dengan cara membuat rencana kegiatan yang tergantung pada rencana kegiatan anggota kelompok.

3. Jangka Waktu Pinjaman

Penetapan jangka waktu pinjaman oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan kepada kelompok ditetapkan di dalam perjanjian pinjaman, untuk Kelompok (SPP) Mawar, Angrek dan Rosela berjangka waktu 12 bulan yang dihitung mulai dana dicairkan yaitu tanggal 14 Juli 2010 dan berakhir pada 17 Juli 2011.

Hal ini dikatakan oleh ibu Mujiati selaku pengurus kelompok SPP mawar

“ Untuk menjalankan jangka waktu pinjaman oleh kelompok semua struktur yang ada pada kelompok harus berfungsi dengan baik, sehingga dalam jangka waktu pinjaman tidak ada yang terkendala, seperti pembayaran yang macet dan lain-lain. Penentuan jangka waktu pinjaman ini kelompok hanya mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan dalam pedoman Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan.” (wawancara 4 Januari 2012)

4. Jumlah Dana yang Disalurkan

Jumlah dana yang disalurkan dimasing-masing kelompok adalah dana yang diajukan oleh masing-masing kelompok kepada PNPM Mandiri Pedesaan, setelah pengajuan dana oleh kelompok kepada pihak PNPM Mandiri Pedesaan akan melakukan verifikasi ke kelompok selanjutnya apabila kelompok lulus verifikasi maka kelompok akan mendapatkan dana pinjaman yang telah mereka ajukan.

Untuk Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mawar jumlah dana yang disalurkan oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan kepada kelompok ini adalah sebanyak Rp 8.000.000, sedangkan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Anggrek sebanyak Rp 7.000.000 dan Rosela sebanyak Rp 30.000.000.

5. Prosedur Penyaluran Dana

Penyaluran dana merupakan proses penyaluran dari rekening kolektif BLM yang dikelola UPK kepada TPK di desa, berdasarkan wawancara dengan pihak UPK ibu Anik W, selaku ketua UPK kec gondang beliau mengatakan penyaluran dana terdiri dari beberapa tahap mas yaitu:

- Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran kwitansi.
- Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok.
- 3. Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP dikurangi Operasional UPK 2 % dari total seluruh pinjaman Rp 45.000.000 yaitu sebesar Rp 949.000 dan dana Operasional TPK desa 3% dari total pinjaman Rp. 45.000.000 yaitu sebesar Rp 1.422.000 dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh ketua masing-masing kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai pengelola kegiatan. Tujuan kwitansi ini adalah kelompok telah menerima langsung dari UPK dan selanjutnya mengembalikan kepada UPK.
- Kelompok membuat perjanjian pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kwitansi penerima dana.
- Kelompok menyerahkan kwitansi/tanda terima uang setiap kelompok UPK

6. Pengembalian Pinjaman

Kegiatan penting dalam kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah lancarnya pengembalian pinjaman anggota kepada kelompok dan kelompok kepada pihak PNPM Mandiri Pedesaan. Prosedur dalam pengembalian pinjaman terlebih dahulu anggota kelompok sesuai dengan waktu penyetoran pengembalian yang sudah ditetapkan oleh kelompok. Setelah dana terkumpul di kelompok, pengurus kelompok menyerahkan kepada

Ketua TPK desa Bendungan Bapak Ibrahim selanjutnya Ketua menyerahkan kepada UPK Ibu Anik Widayati yang ada di Kecamatan Gondang. Kalau dilihat prinsip kerja antara Grameen Bank dengan Prinsip Kerja kegiatan perguliran dana PNPM Mandiri Pedesaan, maka prinsip kerja perguliran PNPM Mandiri Pedesaan sudah menggunakan prinsip yang dimiliki oleh Grameen Bank.

3. Rapat Evaluasi TPK

Rapat dimaksudkan untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan di lapangan untuk penyiapan bahan dan rencana kerja periode berikutnya.

4. Proses Pelestarian

Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable). Di samping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek good governance, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri Pedesaan harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pascapelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung jawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahapan pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip PNPM Mandiri Pedesaan. Sistem pemeliharaan PNPM Mandiri Pedesaan diarahkan kepada adanya perawatan dan pengembangan berbagai sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat secara terus-menerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif dan efisien. FK dibantu Fasilitator Kabupaten memberikan pelatihan kepada anggota Tim Pemelihara atau yang ditunjuk pada waktu pelaksanaan program hampir selesai.

Dalam pelatihan tersebut, masyarakat diberi penjelasan mengenai kepentingan pemeliharaan, organisasi pengelola dan pemeliharaan, dan teknik-teknik yang digunakan seperti: teknik membuat inventarisasi masalah dan teknik memperbaikinya. Tim pemelihara ini terdiri dari warga dari Dusun patoman, dusun dan krajan, dengan asumsi bila yang merawat adalah warga yang merasa empunya, pasti dirawat dengan baik.

Hal ini seperti yang diutarakan oleh Bpk. Suminto selaku ketua dari Tim Pemelihara Prasarana PNPM MP Desa Bendungan 2011 :

“Saat proses pembangunan hampir selesai, kami dari warga dusun Patoman dan krajan dibentuk tim untuk memelihara sarana yang didanai oleh PNPM yakni Jalan Rabat Beton Dusun Patoman. Kami diberi pelatihan mengenai cara memperbaiki, jangka waktu perawatan dll..!” (wawancara 22 Januari 2012)

Hal ini juga dikemukakan oleh Bpk. Heri bramanto :

“Tim pemelihara ini diambil, terutama dari warga yang dekat dengan jalan, sehingga ada rasa memiliki. Kami diberi pelatihan untuk mendata kerusakan, memperbaiki, serta dilengkapi dengan system pengumpulan dana untuk pemeliharaan...” (wawancara 22 Januari 2012)

Demikian halnya bapak Suroto juga menambahkan,

“dalam penunjukan tim pemeliharaan ini sebenarnya adalah penawaran diri mas, la wong kalau ditunjuk malah banyak yang tidak mau, mungkin tidak mau repot dalam mendata kerusakan – kerusakan kali, makanya kami menawarkan diri...” (wawancara 22 Januari 2012)

Adapun pembentukan tim pemelihara di Desa Bendungan untuk program PNPM MP tahun 2011 adalah seperti pada bagan berikut ini:

Tabel 10

Tim Pemelihara Desa Bendungan

Nama	Dusun
1. Suminto	Patoman
2. Suroto	Patoman
3. Heri Bramanto	Krajan

Sumber : Kantor Desa Bendungan

2. Hambatan-hambatan yang Ada dalam Pelaksanaan PNPM MP

Sebuah kebijakan meskipun telah direncanakan serta diperhitungkan dengan matang, tidak menutup kemungkinan muncul hambatan-hambatan yang kurang mendukung keberhasilan tujuan kebijakan. Hambatan itu bisa muncul dari beberapa faktor yang sangat berpengaruh.

Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain adalah :

a. Hambatan pada pemahaman terhadap PNPM MP dan kualitas pengelola

Ketika sosialisasi program dilaksanakan terjadi ketidaktahuan, ketidakpahaman dan kesulitan dalam mengerti seluruh rangkaian kegiatan suatu program adalah hal yang biasa terjadi karena memang program itu baru, atau bisa karena program itu masih sulit untuk dimengerti. Tetapi dalam program PNPM MP ini segalanya sudah sangat tersistematis dari tahapan sosialis hingga tahap pelestarian. Di dalam buku petunjuk pelaksanaan sudah sangat runtut dan rinci tentang apa yang harus dilakukan. Kesulitan petugas dalam pembuatan LAK khususnya bendahara TPK, pada hal ini pihak TPK khususnya bendahara TPK mengalami kesulitan yang disebabkan karena latar belakang tingkat pendidikan dari bendahara hanya sebatas SMA, sehingga tidak begitu menguasai hal-hal pengadministrasian PNPM MP, sehingga tidak mengetahui bentuk laporan pertanggung jawaban yang benar.

“Wah, sulit sih mas memang, kita harus membuat RPD tersebut harus sesuai dengan juklak, Belum lagi format pembuatannya berbeda dengan PNPM PPK sebelumnya, beberapa kali harus dikembalikan ke saya untuk diperbaiki sesuai dengan format yang diberikan oleh tim UPK. Saya juga hanya lulusan SMA saja mas, jadi tidak begitu mengerti dengan pengadministrasian PNPM MP ini. Pas disuruh membuat pembukuan, surat-surat, arsip itu awalnya saya buat manual mas, tulis tangan, dan nota-nota ditempel-tempel begitu saja mas. Setelah dikasih tau sama tim UPK kalau formatnya ketik ya sudah mas, saya ketik di rental pengetikan sebisa saya mas...” (wawancara 19 Januari 2012)

Selain itu, membuat laporan rincian penggunaan dana per jenis anggaran cukup rumit dan menyita waktu. Hal ini antara lain disebabkan TPK harus melaporkan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan juklak yang tidak selalu sama dengan realisasi penggunaannya. Terbatasnya pemahaman TPK terhadap ketentuan penggunaan PNPM, menyebabkan pembuatan Laporan Penggunaan Dana sedikit tersendat dan perlu direvisi beberapa kali. Seperti yang diutarakan Ibu Triasih sebagai berikut :

“Memang beberapa kali LPD dari TPK perlu direvisi. Namun bukan kesalahan yang fatal, hanya format yang salah saja. Mungkin dikarenakan pemahaman yang masih kurang,

dikiranya PNPM MP ini formatnya sama dengan program yang dulu-dulu., padahal beda...” (wawancara 24 Januari 2012)

Untuk melakukan konsultasi penyusunan laporan tersebut TPK harus mengeluarkan biaya, paling tidak untuk transportasi setiap melakukan konsultasi. Selain itu mereka perlu menyediakan waktu untuk bolak balik (antara 3-5 kali) ke UPK Kecamatan untuk memperbaiki laporan.

b. Hambatan pada komunikasi organisasi pelaksana

Secara umum kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan PNPM MP adalah kesulitan pada tahap awal kegiatan dalam pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai Program PNPM MP. Sehingga masih ada dari sebagian masyarakat yang pesimis akan keberhasilan PNPM MP ini. Hal ini dikarenakan adanya proses sosialisasi yang kurang berjalan dengan lancar antara pemerintah desa dan para anggota pengurus PNPM MP di desa Bendungan.

Hal ini diakui oleh bapak kepala desa Bendungan, berikut pernyataan beliau : *“ memang benar mas dalam tahap sosialisasi tidak selalu berjalan dengan lancar, masih kurangnya pemahaman dari para anggota PNPM MP dalam mensosialisasikan kepada masyarakat menyebabkan ada sebagian masyarakat yang meragukan akan program ini.” (wawancara 24 Januari 2012).*

Memang dalam memberikan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat membutuhkan kesabaran hal ini dikarenakan program ini termasuk baru di desa Bendungan dan melibatkan jumlah uang yang besar dimana acapkali apabila ada program yang melibatkan biaya besar masyarakat cenderung berfikiran negatif. Hal ini seperti yang diutarakan oleh salah satu masyarakat yang meminta tidak ditulis namanya, beliau mengungkapkan :

“ alah mana ada mas jaman sekarang itu kalau sudah berurusan dengan uang tidak di korupsi?apalgi ini uang yang cukup besar...” (wawancara 24 Januari 2012).

Ini adalah bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap program PNPM MP di desa Bendungan. Ketidakpercayaan ini juga bisa jadi karena masyarakat tidak dapat memahami bagaimana proses pelaksanaan PNPM MP, dan hal ini terjadi karena mungkin kurang cakupannya anggota PNPM MP dalam memberikan penjelasan dan pengertian kepada masyarakat. Hal ini menjadi salah satu penghambat dalam kegiatan pelaksanaan PNPM MP di desa Bendungan.

Selain itu hambatan yang terjadi adalah sewaktu diadakannya musdes dimana para peserta yang hadir cenderung apatis dalam pelaksanaan musyawarah hal ini bapak kepala Desa menambahkan,

“pada waktu musdes kemarin itu banyak masyarakat yang hanya mau hadir saja apabila ada uang hadir dan ada makanan mas, jadi mereka itu dalam musyawarah hanya jadi pendengar saja..” (wawancara 24 januari 2012)

Hal ini memang benar di akui oleh salah satu masyarakat peserta musdes yang ikut hadir bapak Sunarto,

“iya mas, kalau tidak ada uang hadirnya saya juga malas untuk datang..” (wawancara 24 januari 2012)

Sealain itu menurut salah satu pemuda warga desa Bendungan mas Margono juga mengatakan bahwa

“dalam musdes kemarin itu yang diberi tahu dan dikasih undangan itu hanya orang – orang tua saja mas, la para pemuda itu jarang yang di kasih undangan, malah banyak yang tidak tahu kalau ada musyawarah desa..” (wawancara 24 januari 2012)

Hal senada juga diungkapkan oleh ketua organisasi karangtaruna desa Bendungan bapak Basuki Utoyo

“dalam sturktur organisasi PNPM MP yang dibentuk sewaktu musdes kemarin hanya sebagian kecil dari pemuda desa yang ikut dilibatkan mas, kebanyakan didominasi oleh bapak – bapak..jadi kebanyakan kami hanya jadi pendengar saja...” (wawancara 24 januari 2012)

Hambatan komunikasi ini terjadi pada awal-awal tahapan PNPM MP ini, hal ini dikarenakan sosialisasi di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa yang kurang mengena.

Hambatan komunikasi ini perlahan dapat diatasi sejalan dengan berjalannya program PNPM MP ini. Senada dengan hal tersebut, Bapak Ibrahim menerangkan :

“Memang komunikasi pada saat awal-awal tahapan perencanaan sedikit mengalami hambatan dikarenakan sosialisasi di kecamatan dan desa yang berlangsung hanya 1 hari saja, namun seiring berjalannya waktu, komunikasi semakin membaik dan lancar baik

dari TPK ke Kecamatan, maupun dari TPK ke masyarakat...” (wawancara 25 Januari 2012)

c. Waktu pengerjaan yang dibatasi untuk setiap kegiatan.

Pendanaan dan waktu kegiatan yang dibatasi dalam setiap kegiatan pembangunan menjadikan hambatan dalam meminimalisir biaya produksi dan lama waktu pengerjaan agar pembangunan prasarana dan sarana selesai. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Ibrahim :

“ waktu pengerjaan yang telah ditentukan menjadi hambatan dalam pengerjaan pembangunan program ini mas, hal ini dikarenakan kami harus mengerjakan sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam rapat sebelumnya..” (wawancara 25 Januari 2012)

Selain itu beliau juga menambahkan dalam pernyataannya,

“ karena kami dituntut harus tepat waktu dalam menyelesaikan pembangunan, jadi kami seperti terburu – buru dalam mengerjakannya. Apalagi para pekerja kami ini banyak yang masih belajar menjadi tukang jadi kurang maksimal mas mengerjakannya..” (wawancara 25 Januari 2012).

Dalam kesempatan wawancara dengan salah satu pekerja, mas Huda mengungkapkan:

“kalau saya sendiri sudah terbiasa dengan pekerjaan ini mas karena memang itu pekerjaan saya, tapi kan kebanyakan ini masih belajar semua tukang nya, sedangkan tidak ada pelatihan sebelumnya, latihannya juga waktu pengerjaan dimulai bagaimana hasilnya baik kalau dikejar waktu?” (wawancara 25 Januari 2012)

d. Adanya sebagian warga yang tidak ikut berpartisipasi dalam program PNPM MP

Adanya sebagian sikap dari masyarakat desa Bendungan yang memandang sebelah mata terhadap berlangsungnya program PNPM MP di Desa Bendungan menjadi kendala tersendiri bagi kelancaran program pembangunan PNPM MP di desa Bendungan.

Hal ini di akui oleh bapak Siswoyo selaku kepala desa Bendungan berikut pernyataan beliau:

“ iya memang benar mas, ada sebagian masyarakat yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam program PNPM ini, tapi ya tidak banyak kok Cuma beberapa warga saja ya mungkin

repot dengan urusannya sendiri dan ini tidak menjadi kendala yang berarti karena masih banyak warga yang ikut berpartisipasi dalam program ini” (wawancara 26 januari 2012)

Dan pernyataan bapak kepala Desa dibenarkan oleh bapak Ibrahim beliau menambahkan dalam pernyataannya :

“ memang ada mas salah satu dari warga yang lingkungannya terkena pembangunan rabat beton jalan tidak membolehkan pekarangan rumahnya dijadikan sebagai tempat penempatan material pasir dengan alasan yang berbelit - belit, padahal kalau boleh diletakan didalam pekarangannya pekerjaan lebih mudah dan lebih dekat bila kami mengambil bahan bangunan. Ya akhirnya kami cari tempat lain yang agak jauh dari tempat pengerjaan..” (wawancara 26 januari 2012)

Hal ini juga di benarkan oleh ketua RT setempat mengenai adanya salah satu sikap dari warganya yang tidak ikut berpartisipasi, berikut pernyataan bapak Pribadi :

“ ya memang warga ini agak kaku orangnya mas, juga jarang keluar rumah dan membaur dengan masyarakat jan kebangetan mas, masak pekarangan ditempati pasir saja tidak boleh, padahal ini demi kepentingan bersama dan juga lingkungan” (wawancara 26 januari 2012)

e. Terlambatnya pasokan bahan baku bangunan

Sering terlambatnya pasokan bahan baku bangunan menjadikan pengerjaan proyek pembangunan menjadi terssendat. Hal ini dikarenakan para tukang dan kuli bangunan harus menunggu pasokan bahan baku datang untuk mengerjakan proyek pembangunan.

Hal ini diungkapkan oleh bapak Supriyadi selaku tim monitoring PNPM MP desa Bendungan berikut pernyataan beliau :

“ keterlambatan pasokan bahan baku bangunan ini membuat pengerjaan proyek rabat beton agak tersendat mas, la kita kan harus menunggu datangnya bahan – bahan yang akan dipakai pembangunan” (wawancara 27 januari 2012)

Bapak Handoyo selaku tim monitoring juga menambahkan dalam pernyataannya :

“ keterlambatan bahan – bahan bangunan ini dikarenakan ketelatan dan habisnya bahan ditempat kami biasa membeli mas, soale selain dari desa Bendungan juga ada desa yang lain yang juga melaksanakan proyek pembangunan PNPM jadi hal ini bukan dikarenakan lambatnya pengerjaan, tapi memang antri dalam pembelian bahan bangunan “ (wawancara 27 januari 2012)

f. Dalam kegiatan Simpan Pinjam Khusus perempuan (SPP) juga terdapat beberapa macam hambatan yaitu :

- a. Kurangnya Koordinasi antara Pengurus Kelompok dengan Anggota.
- b. Pengurus kelompok banyak yang tidak kenal dengan anggota baik dari segi karakter maupun kemampuannya dalam membayar.
- c. Pengurus kelompok tidak menyampaikan setoran dari anggota ke UPK.
- d. Usaha yang dijalankan oleh pengurus maupun anggota mengalami masalah.
- e. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya perempuan di desa Bendungan sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu adanya program SPP

Dalam wawancaranya dengan penulis ibu Nurwati selaku pengurus SPP desa Bendungan mengungkapkan dalam pernyataannya sebagai berikut : *“ memang ada berbagi masalah mas dalam kelompok spp ini, salah satunya adalah adanya salah satu anggota dari kelompok yang tidak mau membayar pinjaman dan tentunya hal ini merugikan seluruh anggota kelompok “(wawancara 25 januari 2012)*

ibu Mudjiati selaku anggota spp juga menambahkan pernyataannya sebagai berikut, *“yang susah itu kalau ada salah satu anggota yang mbalelo mas, dalam artian dia tidak mau bertanggung jawab untuk mengembalikan dan yang sudah di pinjamnya dengan alasan yang mbulet sudah kita tagih berkali tetap saja ndak mau, malah dengan enteng bilang alah wong ini ya uange negara ae masak lo mau dipenjara...”(wawancara 25 januari 2012)*

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa Bendungan kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari penulis dapat disimpulkan bahwa proses yang dilakukan dalam tahapan – tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi merupakan langkah – langkah pengelolaan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM – MP). Pelaksanaan program PNPM –MP di desa Bendungan Kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung adalah sebagai program pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin desa Bendungan yang di beri wadah dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM –MP). Sehingga dalam hal ini masyarakat desa Bendungan belajar untuk berorganisasi dan bekerja sama serta lebih berdaya dan berkemandirian sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan di desa Bendungan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan di desa Bendungan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan desa Bendungan , strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat desa

Bendungan dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Secara umum pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Ada tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Yang perlu diubah dari perilaku masyarakat tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengorganisasian masyarakat dapat dijelaskan sebagai suatu upaya masyarakat untuk saling mengatur dalam mengelola kegiatan atau program yang mereka kembangkan. disini masyarakat dapat membentuk panitia kerja, melakukan pembagian tugas, saling mengawasi, merencanakan kegiatan, dan lain-lain. Munculnya pemberdayaan masyarakat karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu, ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah.

Proses inilah yang telah berusaha diterapkan oleh pemerintah Desa Bendungan dimana sebelum pelaksanaan kegiatan proyek PNPM terlebih dahulu dibentuk organisasi – organisasi persiapan pelaksanaan program PNPM – MP seperti anjuran yang telah ditetapkan buku pedoman umum PNPM – MP. Langkah – langkah pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Bendungan ini sesuai dengan pendapat Kartasmita (1996: 144 – 145) mengatakan bahwa : “ setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta untuk mengembangkannya “.

Pada sisi lain Ginjar mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat terkait dengan istilah keberdayaan masyarakat, yaitu kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sehat fisik

dan mentalnya seras terdidik dan kuat tentu memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (survive), dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Sedangkan memberdayakan masyarakat upaya untuk meningkatkan martabat masyarakat yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. dengan kata lain memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Lebih lanjut bahwa, dalam proses pelaksanaan (implementasi) program merupakan usaha mendasar dalam pembangunan. Sebaik-baiknya kebijakan dalam suatu pembangunan, bila tidak ada tindak lanjut/dilaksanakan maka kebijakan tersebut tidak akan mempunyai dampak yang berarti karena belum akan dapat memberikan implikasi tertentu dalam masyarakat.

Menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan memberikan arti bahwa masyarakat diposisikan sebagai salah satu pilar penting dan strategis di samping pemerintah dan swasta. Posisi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai pelaksana pembangunan, tetapi di samping itu masyarakat juga berperan sebagai perencana dan pengontrol berbagai program pembangunan baik program-program yang datang dari pemerintah maupun program-program yang lahir dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri.

Salah satu diantara berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan nasional adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP).

Oleh karena itu kesadaran tersebut harus dibimbing dan diarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri. Dengan adanya keterlibatan itu, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan secara merata, dan tidak hanya oleh pihak-pihak tertentu saja. Pembangunan yang tidak merata adalah karena suatu pembangunan sudah tak memandang arti pentingnya keterlibatan subyek dalam menyelenggarakan pembangunan itu sendiri. PNPM-MP pada dasarnya program yang mempunyai transparansi yang baik serta mengupayakan keterlibatan penuhnya masyarakat di dalam proses pelaksanaannya.

Oleh karena itu proyek yang telah didapatkan oleh desa Bendungan Kecamatan Gondang dari adanya program PNPM-MP, kemudian disosialisasikan kepada masyarakat untuk membahas langkah apa yang sebaiknya dilakukan agar proyek dapat terlaksana dengan baik dengan memperhatikan kualitas dari proyek tersebut.

Pada Desa bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan terhitung cukup baik. Hal ini dapat dilihat dimana desa Bendungan telah melaksanakan proses pelaksanaan PNPM – MP sesuai dengan langkah – langkah dan metode pemberdayaan dalam buku pedoman umum PNPM yaitu tahapan perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap atau proses pelestarian.

1. Perencanaan

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di desa, di kecamatan, dan di kabupaten. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari MAD Sosialisasi sampai dengan Pelatihan KPMD/K. Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap penggalian gagasan sampai dengan musdes perencanaan atau dikenal dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). Perencanaan kegiatan di kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai dengan MAD penetapan usulan. Perencanaan kegiatan di kabupaten adalah perencanaan koordinatif, dimulai dari keterlibatan utusan kecamatan dalam forum SKPD sampai dengan musrenbang kabupaten.

Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat desa Bendungan merupakan proses dimana masyarakat diberikan kepercayaan agar dapat menentukan proses pembangunan yang dibutuhkan mereka sendiri, sementara pemerintah dan lembaga lain mempunyai peran sebatas pendukung dan memfasilitasi. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini akan mengantar masyarakat dalam berproses untuk mampu menganalisa masalah dan peluang yang ada serta mencari jalan keluar sesuai sumberdaya yang mereka miliki.

Dengan dilaluinya tahapan – tahapan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut berarti PNPM MP di desa Bendungan sudah berjalan sesuai dengan prinsip dasar PNPM MP dimana prinsip – prinsip itu meliputi :

a. Bertumpu pada pembangunan manusia.

Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata. Dalam hal ini pemerintah desa Bendungan berusaha untuk membangun masyarakat desa Bendungan khususnya bagi masyarakat miskin yang selama ini kurang berdaya dengan melibatkan peran serta masyarakat miskin dalam proses dan pelaksanaan PNPM –MP di desa Bendungan.

b. Otonomi.

Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar. Dalam pengertian prinsip otonomi ini pemerintah desa Bendungan memberikan keleluasaan pada masyarakat untuk menetapkan dan merencanakan pembangunan.

c. Desentralisasi.

Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat

d. Berorientasi pada masyarakat miskin.

Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin

e. Partisipasi.

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil

f. Kesetaraan dan keadilan gender.

Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik

g. Demokratis.

Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat

h. Transparansi dan Akuntabel.

Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrative

i. Prioritas.

Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan

j. Keberlanjutan.

Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya

2. Pelaksanaan

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia, termasuk masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Karena itu, TPK dan UPK perlu mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan. Pelatihan UPK, BP-UPK, TPK, dan pelaku desa lainnya dilakukan dalam masa setelah penandatanganan SPPB oleh Camat, sampai dengan masa persiapan pelaksanaan.

Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di desa Bendungan sebelumnya juga sudah melaksanakan tahapan – tahapan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu :

a. Langkah pertama menyusun kelompok kecil sebagai penerima awal atas rencana program pemberdayaan.

Pada tahap awal program PNPM MP terlebih dahulu menemukan beberapa orang perencan, dalam hal ini pemilihan Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dipilih dalam musyawarah Desa (musdes). Para calon pelaku PNPM MP harus memiliki tanggung jawab terhadap perencanaan program dan implementasinya.

b. Langkah kedua mengidentifikasi atau membangun kelompok peserta belajar tingkat wilayah.

c. Langkah ketiga, memilih dan melatih fasilitator kelompok

Fasilitator dalam hal ini adalah KPMD dan TPK menciptakan potensi untuk proses pemberdayaan sehingga perlu dipilih dan di latih secara hati – hati. Pelatihan KPMD dan TPK merupakan upaya untuk memberikan pemahaman dan pemberian ketrampilan mengenai cara dan pendekatan yang diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

d. Langkah keempat, Pengaktifan kelompok

Pengaktifan kelompok dalam PNPM MP adalah melalui dibentuknya suatu musyawarah yang mempertemukan anggota masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan.

e. Langkah kelima, menyelenggarakan pertemuan – pertemuan fasilitator.

Dalam PNPM MP langkah pemberdayaan dengan menyelenggarakan pertemuan – pertemuan para pelaku yaitu kader KPMD dan TPK melalui pelatihan.

f. Langkah keenam, mendukung aktifitas kelompok yang sudah berjalan.

Setelah diadakan pelatihan KPMD dan TPK mendampingi kelompok dalam setiap aktifitas kegiatan. Pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh TPK dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan seperti survey dan pembuatan desain.

g. Langkah ketujuh, mengembangkan hubungan antar kelompok.

Mengembangkan hubungan kelompok dalam kaitannya dengan proses pelaksanaan PNPM MP dilakukan melalui musyawarah – musyawarah, pelaksanaan kegiatan yaitu pada program infrastruktur, pertemuan di musyawarah khusus perempuan yang dimaksudkan untuk mengembangkan hubungan antar masyarakat ataupun antar kelompok.

h. Langkah kedelapan, menyelenggarakan sebuah lokakarya untuk evaluasi.

Pada langkah ini evaluasi program PNPM MP dilaksanakan melalui musyawarah dengan seluruh aspek masyarakat. Semua pihak baik aparat desa, tokoh masyarakat, masyarakat dikumpulkan. Karena pada tahap evaluasi PNPM MP melalui 3 tiga tahapan yaitu, oleh masyarakat, pemerintah dan secara independen yaitu oleh pihak – pihak yang tidak ikut serta dalam proses PNPM MP. Semua tahap evaluasi dilakukan melalui musyawarah.

3. Proses Pelestarian

Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin dapat member manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable). Di samping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek good governance, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan secara benar.

Hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang berupa prasarana, simpan pinjam, dan kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat atau pengembalian macet maka desa atau kecamatan tidak akan mendapat dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun berikutnya. Pelestarian kegiatan merupakan tahapan pascapelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggung jawab masyarakat. Namun demikian dalam melakukan tahapan pelestarian, masyarakat tetap berdasarkan atas prinsip PNPM Mandiri Perdesaan.

Pendekatan pemberdayaan yang dilakukan pada saat pelaksanaan sosialisasi program sesuai dengan tujuan umum dari Program Pemberdayaan Masyarakat yaitu tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kemandirian masyarakat tersebut adalah masyarakat ikut menyuarakan pendapatnya, karena pada saat pelaksanaan sosialisasi bukan hanya kegiatan pemberian pemahaman saja melainkan untuk melakukan musyawarah dalam rangka menampung pendapat dari keseluruhan masyarakat dan penetapan program apa saja yang diperlukan dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Tujuan adanya dari program PNPM MP tersebut sesuai dengan pendapat Elliot dan Broadhead (1996) dalam (Kuswanto,2005:37), mengatakan bahwa ada tiga pendekatan dalam memberdayakan masyarakat :

a. Pendekatan kemanusiaan

Tujuan pendekatan ini adalah membantu secara sukarela dan spontan kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan bantuan terkena musibah.

b. Pendekatan pengembangan masyarakat

Bertujuan mengembangkan, memandirikan dan menswadayakan masyarakat.

c. Pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan ini bertujuan memperkuat tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekanan disegala bidang dan sektor.

Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan, konsep yang dilaksankan oleh pemerintah desa Bendungan sesuai dengan pendapat Kartasmita (1997) dalam (Kuswanto,2005 : 38), bahwa dalam meberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara sebagai berikut :

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah – langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana baik fisik (irigasi, jalan, listrik) maupun sosial (sekolah dan pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan bawah.
- c. Memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Dalam pelaksanaan PNPM –MP di desa Bendungan adalah sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin. Cara dengan menciptakan mekanisme dari dalam (build-in) untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh. Hal ini dapat dibuktikan selama dalam proses pelaksanaan PNPM – MP di desa Bendungan, masyarakatlah yang berperan dalam segala penentuan dan pengambilan keputusan serta pelaksanaan PNPM – MP di desa Bendungan.

Sementara Freire (Sutrisno, 1999) menyatakan empowerment bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif. Konsep lain menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah (Priyono dan Pranarka, 1996).

Dalam pandangan Pearse dan Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yakni primer dan sekunder. Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya (Priyono dan Pranarka, 1996).

Sedangkan dalam kajian ini pengertian “pemberdayaan” dimaknai sebagai segala usaha untuk membebaskan masyarakat miskin dari belenggu kemiskinan yang menghasilkan suatu

situasi di mana kesempatan-kesempatan ekonomis tertutup bagi mereka, karena kemiskinan yang terjadi tidak bersifat alamiah semata, melainkan hasil berbagai macam faktor yang menyangkut kekuasaan dan kebijakan, maka upaya pemberdayaan juga harus melibatkan kedua faktor tersebut. Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya.

Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis. Pada tingkat ideologis, pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep top-down dan bottom-up, antara growth strategy dan people centered strategy. Sedangkan di tingkat praksis, proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi. Maka, konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development).

Community development adalah suatu proses yang menyangkut usaha masyarakat dengan pihak lain (di luar sistem sosialnya) untuk menjadikan sistem masyarakat sebagai suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik, mengembangkan dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupannya, mengembangkan fasilitas dan teknologi sebagai langkah meningkatkan daya inisiatif, pelayanan masyarakat dan sebagainya. Secara filosofis, community development mengandung makna 'membantu masyarakat agar bisa menolong diri sendiri', yang berarti bahwa substansi utama dalam aktivitas pembangunan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri.

2.Hambatan-hambatan Pelaksanaan PNPM MP

a. Hambatan pada pemahaman terhadap PNPM MP dan kualitas pengelola

Pembangunan sarana prasarana perdesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perdesaan merupakan upaya untuk menunjang peningkatan kualitas infrastruktur dasar desa. Upaya tersebut dimaksud untuk mendorong kemandirian masyarakat perdesaan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program PNPM MP di desa Bendungan dikarenakan metode sosialisasi yang kurang aktif yang disampaikan oleh pengurus PNPM MP kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tidak meratanya peserta musyawarah dan anggota struktur kepengurusan PNPM MP.

Proses sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat ini seharusnya lebih dioptimalkan lagi supaya masyarakat benar – benar memahami tentang program PNPM MP ini. Hal ini penting karena dengan pemahaman kepada masyarakat menjadikan masyarakat percaya dan

optimis akan keberhasilan program PNPM MP tersebut dan ini menjadi kunci akan keberhasilan pelestarian hasil pembangunan.

Ketidak mertaan ini dapat dilihat dari berbagai macam komentar yang telah penulis sajikan melalui wawancara dari beberapa masyarakat desa Bendungan yang dimana pihak aparat desa kurang memberi kesempatan kepada pemuda desa Bendungan dalam proses pelaksanaan PNPM MP. Kurangnya keterlibatan dan partisipasi pemuda dalam pengajuan usul serta pelaksanaan program PNPM MP di desa Bendungan ini dapat dilihat dari minimnya pemuda yang ikut menjadi pengurus teknis program PNPM MP ini. Merujuk dari daftar susunan pengurus PNPM MP desa Bendungan, kebanyakan pengurus masih di dominasi oleh peran orang tua. Sebenarnya potensi yang dimiliki oleh pemuda desa Bendungan itu sangat besar hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikannya.

Hal inilah yang seharusnya dirubah oleh pemerintah desa yang dimana tidak percaya dengan peran para pemudanya. Program PNPM MP ini adalah program untuk pembelajaran masyarakat agar bisa untuk berdaya dan untuk menggali potensi yang ada dari para pemuda desa. Dalam struktur pemerintahan desa Bendungan pun sudah ada organisasi karangtaruna, seharusnya organisasi tersebut dapat dimaksimalkan perannya dalam pembangunan desa Bendungan. Seharusnya dalam hal ini, peran pemudalah yang harus lebih dioptimalkan lagi agar supaya dalam pprogram PNPM MP selanjutnya lebih baik lagi dan dapat berjalan dengan lebih lancar.

b. Hambatan pada komunikasi organisasi pelaksana

Untuk menunjang kemampuan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Bendungan perlu diperkuat dengan adanya Pengelola kegiatan yang berkualitas, seperti penempatan Kader Teknik di setiap desa.

Langkah yang dilakukan PNPM Mandiri perdesaan merupakan upaya untuk mewujudkan desa yang memiliki kemampuan sendiri dalam mengelola kegiatan pembangunan terutama kegiatan infrastruktur dasar yang ada di desa.

Dengan adanya Kader Teknik, masyarakat desa mampu menemukan strategi pembangunannya sendiri, dengan pola pembangunan desa yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat desa. dalam hal ini pengelola kegiatan (TPK) pada desa Bendungan kurang menguasai mengenai mekanisme Program PNPM MP, seperti pembuatan RPD yang terkadang sering dilakukan Revisi berulang kali karena karena harus disesuaikan dengan format yang

ditetapkan. Namun hal tersebut segera diatasi oleh UPK dengan cara pemberian intensitas bimbingan yang lebih, sehingga diharapkan setelah program ini berakhir masyarakat dapat pengalaman dan pengetahuan yang berarti untuk dapat menumbuhkan kemendiriannya sendiri.

Masyarakat yang mandiri tidak mungkin diwujudkan secara instan, melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Terkadang proses komunikasi dapat menjadi penghambat, hal ini dapat terjadi dikarenakan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) kerkaitan antara lembaga pemerintahan satu dengan lembaga pemerintahan yang lain mempunyai hubungan yang bersifat penugasan (komando), apabila komunikasi yang disampaikan tidak begitu baik maka informasi yang diterima menjadi tidak baik.

Desa Bendungan sebagai organisasi pemerintahan terkecil sebenarnya peran yang vital dalam proses pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kemandirian didesa yang dalam hal ini ialah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP). proses Komnikasi yang baik dan benar dalam penyampaian informasi mulai dari pemerintah Pusat, kemudain turun ke Provinsi kemudian pada Kabupaten seterusnya ke kecamatan dan sampai pada yang terkecil yaitu Desa senantiasa harus ditata dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman terlebih lagi penyimpangan dan penyalahgunaan.

Namun yang menjadi kendala menurut kutipan wawancara pada penyaian data adalah kurangnya metode penyampaian dalam sosialisasi sehingga menyebabkan adanya sebagian masyarakat yang merasa mempunyai keahlian menjadi pesimis terhadap kelancaran program PNPM MP di desa Bendungan.

Selain itu kendala yang menjadi hambatan dalam PNPM MP di Desa Bendungan adalah sikap sebagian masyarakat desa bendungan yang malas datang pada waktu diadakannya musyawarah desa dimana sebagian masyarakat tidak mau hadir dalam musyawarah.

Selain itu pelaksana musdes dalam hal ini adalah pihak pemerintah desa kurang memberi stimulus kepada masyarakat agar mau untuk hadir dalam muswyawarah desa yang di selenggarakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya warga yang enggan hadir karena tidak adanya undangan kepada mereka.

c. Waktu pengerjaan yang dibatasi untuk setiap kegiatan.

Waktu pengerjaan pelaksanaan pembangunan yang dibatasi terasa menjadi beban yang dirasakan oleh masyarakat. Karena harus menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang telah ditentukan. Program PNPM MP adalah program yang baru bagi masyarakat di desa Bendungan, dikarenakan program yang baru masyarakat desa Bendungan khususnya para pekerja bangunan yang rata – rata masih dalam tahap pembelajaran merasa terbebani dengan tuntutan waktu pengerjaan. hal ini dikarenakan kurangnya tenaga ahli yang dibutuhkan dimana tenaga ahli tersebut banyak yang bekerja diluar program ini.

Sehingga dalam pengerjaan pembangunan terkesan seperti terburu – buru karena harus mengejar target waktu yang telah ditentukan. Belum lagi apabila kondisi alam yang tidak bersahabat seperti hujan tambah membuat pengerjaan pembangunan menjadi tersendat. Sehingga juga mempengaruhi dari kualitas hasil pembangunan itu sendiri.

d. Adanya sebagian warga yang tidak ikut berpartisipasi dalam program PNPM MP

Adanya sebagian dari masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam program PNPM MP menjadikan kendala tersendiri bagi keberlangsungan program PNPM ini, walaupun itu dirasa tidak menjadi hambatan yang besar bagi pelaksanaan proyek PNPM MP di desa Bendungan. Adanya sebagian warga yang melarang lahan pekarangannya digunakan sebagai tempat peletakan bahan – bahan bangunan yang akan digunakan dalam pembangunan proyek PNPM menjadikan para pekerja harus mencari tempat lain yang dimana itu lebih jauh dari tempat pengerjaannya.

Dalam pengambilan bahan – bahan bangunan yang harus bolak – balik lebih jauh, tentunya ini juga mengurangi keefisienan dalam pengerjaan itu sendiri sehingga pengerjaan kurang maksimal.

e. Terlambatnya pasokan bahan baku bangunan

Keterlambatan pasokan bahan baku bangunan adalah penyebab salah satu kendala pelaksanaan program pembangunan PNPM di desa Bendungan. Keterlambatan pasokan bahan bangunan ini lebih disebabkan oleh karenan kurangnya ketersediaan bahan baku di toko dimana telah dipercaya untuk memasok baahan baku pembangunan di desa Bendungan.habisnya stok

bahan bangunan di toko juga tidak lain disebabkan oleh banyaknya permintaan dari desa lain untuk memasok bahan – bahan bangunan untuk proyek pembangunan PNPM desa mereka.

Tapi keterlambatan pasokan bahan baku ini tidak terjadi setiap saat, karena dengan berjalannya waktu pihak toko juga sudah mengetahui adanya program PNPM ini sehingga mereka juga meningkatkan jumlah ketersediaan bahan baku untuk pembangunan.

f. Hambatan pada pelaksanaan kegiatan SPP

Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat seorang ketua kelompok yang menerima bantuan akan tetapi dia tidak memiliki usaha, dan bantuan tersebut digunakan hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja.

Menurut yang bersangkutan ia mendapatkan bantuan karena ia sebagai pengurus TPK dan berfungsi untuk mendampingi anggota kelompoknya dalam kegiatan SPP. Dan ini kami anggap sebagai salah satu masalah dalam pelaksanaan SPP di Desa Bendungan. Karena adanya pelaksanaan pemberian bantuan dana dengan tidak tepat sasaran.

Selain itu permasalahan yang ada yakni, masih banyak yang kurang maksimal dalam mengembangkan usaha (khususnya perempuan di tingkat mikro). Karena tidak adanya pelatihan yang berorientasi pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Tersendatnya proses pemberdayaan perempuan karena adanya keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah sehingga target penerima manfaat masih dalam sekup yang relatif sedikit. Berpotensi menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap dana SPP, dikarenakan tidak adanya penerapan aturan main yang tegas dan jelas, dalam hal ini berkaitan dengan batasan peminjaman dana.

Padahal mengenai batasan peminjaman telah ditetapkan oleh pihak PNPM Mandiri Pedesaan. Hal ini karena tidak adanya sosialisasi yang jelas dari pihak PNPM Mandiri itu sendiri. Tidak semua masyarakat mengetahui program SPP dan adanya perbedaan pada pemahaman dan pelaksanaan terhadap program SPP hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan kurang jelas dan tidak maksimal.

Secara umum hambatan – hambatan yang terjadi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di desa Bendungan adalah kesulitan pada tahap awal kegiatan dalam pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai program PNPM MP,

keterbatasan pengetahuan kader, keterbatasan pengetahuan anggota kelompok dalam administrasi kelompok, serta kurangnya pelatihan tenaga ahli bangunan. Untuk itu upaya yang dilakukan selama ini sudah dilaksanakan adalah melakukan sosialisasi dalam pertemuan – pertemuan informal kepada para pelaku PNPM MP.

Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Lebih lanjut Tjokroamidjojo (1995:222) mengungkapkan bahwa usaha pembaharuan tersebut, pada umumnya dilakukan dengan peranan pemerintah yang aktif dan dengan usaha berencana. Pembangunan sering diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik.

Siagian (2003:4) mendefinisikan pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Pembangunan bangsa adalah bagian integral dari pembangunan nasional suatu negara. Pembangunan setiap negara berkembang bersifat multidimensional, yakni pembangunan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Kemudian selanjutnya, ide pokok pembangunan menurut Siagian, bahwa pembangunan merupakan suatu proses; pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; pembangunan mengarah kepada modernitas; modernitas dicapai melalui pembangunan multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Lebih lanjut, wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat.

Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas.

Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta penumbuhan

kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (empowerment) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung melalui tahap-tahap berikut :

d. Perencanaan

- 1) Pelaksanaan PNPM MP di desa Bendungan telah melalui tahapan – tahapan pengelolaan program yaitu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Program – program yang dilaksanakan berorientasi pada kebutuhan individu masyarakat yang mempertimbangkan aspek lingkungan.
- 2) Pendekatan pemberdayaan yang dilakukan pada saat pelaksanaan sosialisasi program sesuai dengan tujuan umum dari Program Pemberdayaan Masyarakat yaitu tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kemandirian masyarakat tersebut adalah masyarakat ikut menyuarakan pendapatnya, karena pada pelaksanaan sosialisasi bukan hanya kegiatan pemberian pemahaman saja melainkan untuk melakukan musyawarah dalam rangka menampung pendapat dari keseluruhan masyarakat dan penetapan program apa saja yang diperlukan dan sesuai kebutuhan masyarakat.

e. Tahap Pelaksanaan

- 1) Pada tahap pelaksanaan pembangunan PNPM MP di desa Bendungan kecamatan Gondang telah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari selesainya program pembangunan sesuai dengan tepat waktu dan berjalan ssesuai dengan mekanisme yang ada didalam buku pedoman PNPM MP walaupun tidak sepenuhnya akan tetapi sudah bisa dibilang cukup baik.
- 2) Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) telah berjalan di Desa Bendungan selama kurang lebih 2 tahun, yakni mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2011, Dalam pelaksanaannya program yang bertujuan gunamemberdayakan perempuan ini, di satu sisi mampu memberikan manfaat bagi kaum perempuan dan sisi lain memiliki kurangan.

Manfaat yang dirasakan oleh para target sasaran program ini (perempuan) yaitu: terbebasnya masyarakat dari jeratan bank keliling, mampu mengembangkan usaha mikro yang telah kaum perempuan miliki sebelum menerima bantuan modal (seperti: usaha kredit pakaian, warung kelontong, jual pulsa elektrik, dan lain sebagainya), menjadikan wanita lebih berdaya dan mandiri sehingga mampu bertransformasi ke ranah publik dan hal ini terwujud dalam aktivitas kaum perempuan yang meningkat (seperti: aktif dalam kegiatan PKK, mampu mengelola usaha mikro yang mereka miliki, dan lain sebagainya)

Tahap/proses pelestarian

- 1) Tujuan dari adanya Program PNPM MP tersebut merupakan salah satu upaya untuk meberdayakan masyarakat dengan cara pendekatan pengembangan masyarakat yang bertujuan mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat Secara keseluruhan pelaksanaan program PNPM-MP yang didasarkan dari hasil penelitian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan program PNPM-MP telah berjalan sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan hasilnya telah dapat dirasakan masyarakat secara langsung meskipun dalam pelaksanaannya sendiri masih ada kekurangan, kelemahan dan hambatan yang diharapkan kekurangan dan kelemahan dan hambatan tersebut dapat diantisipasi dalam proses PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada phase dan siklus berikutnya.

2. Hambatan-hambatan yang Ada dalam Pelaksanaan PNPM MP di desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Adapun hambatan – hambatan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM MP) di desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung adalah :

- a. Hambatan pada pemahaman terhadap PNPM MP dan kualitas pengelola
- b. Hambatan pada komunikasi organisasi pelaksana
- c. Waktu pengerjaan yang dibatasi untuk setiap kegiatan.
- d. Adanya sebagian warga yang tidak ikut berpartisipasi dalam program PNPM MP
- e. Terlambatnya pasokan bahan baku bangunan
- f. Hambatan pada pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan

- a) Kurangnya Koordinasi antara Pengurus Kelompok dengan Anggota.
- b) Pengurus kelompok banyak yang tidak kenal dengan anggota baik dari segi karakter maupun kemampuannya dalam membayar.
- c) Pengurus kelompok tidak menyampaikan setoran dari anggota ke UPK.
- d) Usaha yang dijalankan oleh pengurus maupun anggota mengalami masalah.
- e) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya perempuan di desa Bendungan sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu adanya program SPP

Secara umum hambatan – hambatan yang terjadi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di desa Bendungan adalah kesulitan pada tahap awal kegiatan dalam pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai program PNPM MP, keterbatasan pengetahuan kader, keterbatasan pengetahuan anggota kelompok dalam administrasi kelompok, serta kurangnya pelatihan tenaga ahli bangunan. Untuk itu upaya yang dilakukan selama ini sudah dilaksanakan adalah melakukan sosialisasi dalam pertemuan – pertemuan informal kepada para pelaku PNPM MP.

Adanya sebagian sikap warga yang tidak mau berpartisipasi menjadikan kurang maksimalnya pengerjaan proyek pembangunan PNPM.

Keterlambatan pasokan bahan baku bangunan juga ikut mendorong kurang maksimalnya pengerjaan proyek pembangunan.

Didalam kegiatan SPP terdapat beberapa permasalahan baik itu oleh dari anggota maupun pengurusnya. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengertian mengenai dari arti pemberdayaan itu sendiri, para anggota maupun pengurus hanya sekedar berfikir bagaimana mendapat dana dan bagaimana harus mengembalikan sehingga menjadikan ketergantungan pada program SPP ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

- 1) Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan merupakan orang yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan PNPM MP. Maka hendaknya para pelaku memahami betul karakteristik dari masyarakat. Selain itu sebagai instruktur harus menjadi pembimbing yang dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat.

- 2) Perlunya peningkatan standarisasi pembuatan proposal sehingga tidak ada kesan yang pandai membuat proposal yang menang.
- 3) Sebaiknya tahap sosialisasi dilaksanakan dengan lebih intensif, tidak hanya melalui proses formal PNPM, namun dengan memanfaatkan perkumpulan-perkumpulan atau kegiatan warga yang lain.
- 4) Hendaknya ada pendampingan kelompok, agar anggota SPP tidak pasif dalam semua tahapan partisipasi. Pendampingan ini bias dilakukan secara berkala agar bisa mengontrol aktivitas kelompok dan keterlibatan kelompok dalam berbagai kegiatan SPP.
- 5) Untuk mencapai keberlanjutan kegiatan kelompok SPP diharapkan adanya kemauan kelompok untuk lebih mempedulikan prinsip-prinsip keorganisasian, mempunyai anggaran dasar rumah tangga, sanksi yang tegas pada anggota kelompok yang tidak bertanggung jawab sehingga kelompok dapat berkembang dan lebih maju serta berkelanjutan.
- 6) Pemerintah desa Bendungan dalam hal ini adalah bapak kepala desa harus lebih mengoptimalkan peranan organisasi karangtaruna dan pemuda – pemuda desa bendungan agar berpartisipasi dalam struktur dan pelaksanaan kegiatan PNPM MP yang lebih didominasi oleh peranan orang tua. Sehingga para pemuda desa ini terberdayakan dan keluar potensi yang dimiliki dan mempunyai pengalaman berorganisasi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Bryant, Coralie & Louise G. White, 1987, “Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang”, Jakarta, LP3ES

Budiman, Arif. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

H., Khairuddin. 1992. *Pembangunan masyarakat: tinjauan aspek sosiologi, ekonomi, dan perencanaan*. Yogyakarta: Liberty

Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*). CIDESS. Jakarta

-----, 1997. *Administrasi Pembangunan : Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia*. LP3ES. Jakarta

Korten, David C dan Sjahrir, 1988 “Pembangunan berdimensi Kerakyatan”, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia

Miles, Mathew B, dan A. Michael Huberman. 1999. *Analisa Data Kualitatif, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi*, UI Press, Jakarta.

Moleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.

Ndraha, Taliziduhu, 1987. *Pembangunan masyarakat: mempersiapkan masyarakat tinggal landas*. Jakarta: Bina Aksara

Pranaka A.M.W. dan Prijono Onny S, 1996, “ pemberdayaan : konsep, Kebijakan dan Implementasi”, Jakarta, CSIS.

Rusli, Said (ed). 1995. Metodologi Identifikasi Golongan dan Daerah Miskin: Suatu Tinjauan dan Alternatif. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Utama dan Institut Pertanian Bogor

Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strateginya*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Slamet, M. 1980. *Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan*, P3M Universitas Brawijaya, Malang.

Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pembangunan Masyarakat*. PT Bina Rena Pariwara, Jakarta.

Suryono, Agus & Trilaksono Nugroho. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Banyumedia Publishing, Malang.

Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan kebijakan social, dan pekerjaan social: Spektrum pemikiran*. Bandung. Lembaga studi pembangunan- sekolah tinggi kesejahteraan social.

Yogyakarta: Gajahmada Press (buku asli diterbitkan tahun 1984)

Tjokroamidjojo, B., 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta: PT. Pustaka LP3ES

-----, 1981. *Perencanaan Pembangunan*, PT Gunung Agung, Jakarta.

Data dan Informasi Kemiskinan 2002 dan 2003. BPS Jakarta. 2002 dan 2003 dan 2006

Arsyad, Lincoln. 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: YKPN Press.

Depperindag. 2001. *Kebijakan Pembangunan Industri dan Perdagangan Tahun 2001*. Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag).

Kartasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)*. Jakarta: CIDESS.

Kartasmita, Ginandjar 1997. *Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan : Teori, Kebijaksanaan, dan Penerapan*. Jakarta.

Pranaka dan Vidhyandika. 1996. *Pemberdayaan (Empowerment)*. Jakarta: Centre of Strategic and International Studies (CSIS).

Riggs, F.W. 1964. *Administration in Developing Countries, The Theory of Prismatic Society*. Boston. Houghton Mifflin Company.

Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sondang, P. Siagian. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. 2005.

Soekartawi (1990). *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan (Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sanusi, B. 2000. *Pengantar Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.

Slamet, M. 2003. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Disunting oleh Ida Yustina dan Adjat Sudradjat. Bogor: IPB Press.

Tjokroamidjojo. B. (1974). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit LP3ES.

Riggs, F.W. 1964. *Administration in Developing Countries, The Theory of Prismatic Society*. Boston, Houghton Mifflin Company.

Dari internet :
<http://www.tulungagung.go.htm>



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN GONDANG
DESA BENDUNGAN

SURAT KETERANGAN

Reg.Des No. : 145 / 174/ 407.416.12 / 2011

Yang bertanda tangan dibawah ini kami, Kepala Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : SIAGA BASU MURBENG
Alamat : Dusun Krajan RT 05 / 01 Desa Bendungan
Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung
P e k e r j a a n : Mahasiswa Universitas Brawijaya Malang
NIM : 0610313163
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : Administrasi Pembangunan

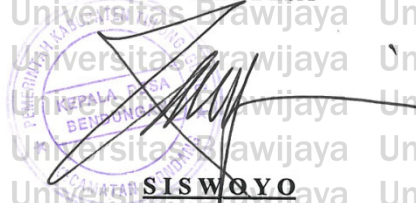
Mengadakan survey / riset tentang Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan / PNPM – MP di Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung mulai tanggal 1Desember 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

Dan hasil penelitian tersebut sebagai bahan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah / Skripsi yang bersangkutan dan telah berjalan dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bendungan, 31 Desember 2011

KEPALA DESA


SISWOYO

